

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS
SUMBERDAYA EKONOMI LOKAL MELALUI
*ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)***

(Studi Pada Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SITI AMINATUL INDAH FATMAWATI
NIM. 115030107111081



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016

MOTTO



*Impian Jangan Hanya dalam Ingatan Saja
Ia Harus Diusahakan
Dengan KERJA KERAS
Dimaksimalkan
Dengan KERJA CERDAS,
Dan Dibarengi
Dengan DOA-DOA*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui *One Village One Product* (OVOP)

Disusun oleh : Siti Aminatul Indah Fatmawati

NIM : 115030107111081

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang,

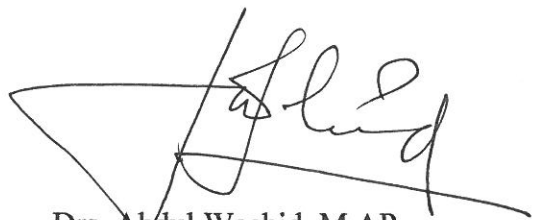
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 19850 1 003



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN

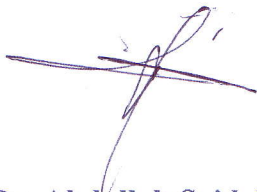
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2016
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Siti Aminatul Indah Fatmawati
Judul : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui *One Village One Product* (OVOP) (Studi Pada Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

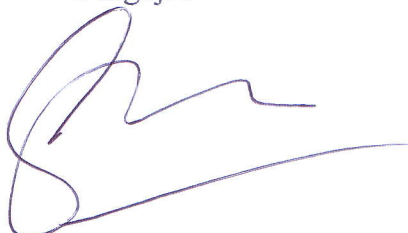
Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP

NIP. 19561209 198703 1 008

Penguji I



Dr. Suryadi, MS

NIP. 19601103 198703 1 003

Penguji II



Dr. Rer. Pol Rommy Hermawan, MAP

NIP. 19740725 200604 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang,

Mahasiswa



Siti Aminatul Indah Fatmawati

NIM. 115030107111081

Halaman Persembahan

Karya ini Ku persembahkan kepada:
Kedua Orang Tuaku, Ayahku tercinta Almahrum Sutikno dan
Ibuku Tercinta Siti Mutmainah serta
Kepada Keluargaku Tercinta

RINGKASAN

Siti Aminatul Indah Fatmawati, **Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui *One Village One Product* (Studi Pada Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)**, Dr. Abdullah Said, M.Si. Drs. Abdul Wachid, MAP.

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi dibidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil produksi yang tinggi dan variasi macam pada sub sektor pertanian yaitu tanaman hortikultural. Salak Suwaru termasuk tanaman hortikultural sektor yang tumbuh subur dan menjadi salah satu tanaman unggulan di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran. Potensi ini dibarengi dengan adanya usaha masyarakat lokal dibidang olahan buah yaitu kripik dan jenang atau dodol. Namun kenyataannya di Desa Suwaru potensi yang ada belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi pada sektor ini membutuhkan komitmen dan koordinasi antara aktor/*stakeholder* yang memiliki kapasitas dalam mengembangkan sumberdaya lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan usaha lokal berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal yang menekankan satu desa satu produk atau *one village one product* (OVOP) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Peran dan kapasitas aktor atau kelambagaan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal serta koordinasi antar aktor serta aspek-aspek pada usaha lokal yang mengembangkan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki. Selain itu yang menjadi fokus yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha lokal berbasis sumberdaya ekonomi lokal.

Hasil penelitian di Desa Suwaru menunjukkan bahwa pengembangan usaha lokal yang berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal berjalan dengan baik. Desa Suwaru memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan berkembangnya usaha lokal serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Usaha lokal yang ada di Desa Suwaru sudah memiliki karakteristik dalam pengembangan sumberdaya lokal melalui OVOP yaitu menekankan pada 3 prinsip; lokal tapi global, kemandirian dan kreatifan, serta pengembangan sumberdaya manusia. Dukungan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal menunjukkan hal yang positif. Aktor-aktor yang terlibat yaitu: 1) Pemerintah Daerah 2) Pelaku Usaha Lokal 3) Masyarakat Lokal 4) Koperasi 5) Lembaga Keuangan 6) Perguruan Tinggi.

Berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal di Desa Suwaru terutama di Kabupaten Malang belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani khusus tentang OVOP dan hasil produksinya. Koperasi yang ada di Desa Suwaru juga belum memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang menangani sumberdaya lokal di unit desa. Pemasaran untuk hasil produksi yang dihasilkan usaha lokal belum mampu menggunakan merek dagang sendiri.

Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala di Desa Suwaru dalam mengembangkan usaha lokal yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal yang menekankan pada satu desa satu produk unggulan. Segera di bentuk BUMD atau kelembagaan pada Kabupaten Malang yang secara khusus menangani OVOP. Serta mengembalikan tugas, peran dan memberdayakan koperasi di Desa Suwaru yang berfokus pada potensi lokal yang dimiliki yaitu salak suwaru.

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal, Peran Aktor, *One Village One Product* (OVOP).



SUMMARY

Siti Aminatul Indah Fatmawati, The Development of Small and Medium Enterprises Based Economi Resources Locale Through One Village One Product (Study In Suwaru in The Village Malang District) Dr. Abdullah Said, M.Si. Drs. Abdul Wachid, MAP.

Malang district is one district that has the potential in agriculture. This can be seen from produce high and variation kind of to ini the agricultural sector namely holtikultural plants. Salak Suwary including the holtikultural sectors thrives and was one of plants unseeded in the village Suwaru in performance. The potential is accompanied by local community business in fruit and processed is kripik and jenang or dodol. But in reality in the village suwaru potential there still maximized well by state and local community. Economic development in the sector requires commitment and coordination between the actor/stakeholders that has the capacity to develop local resources. The purpose of this research is to find local businesses based on local economy resources thar emphasizes one village one product (OVOP) and to know supporting factors and inhibitors factors of the implementasi.

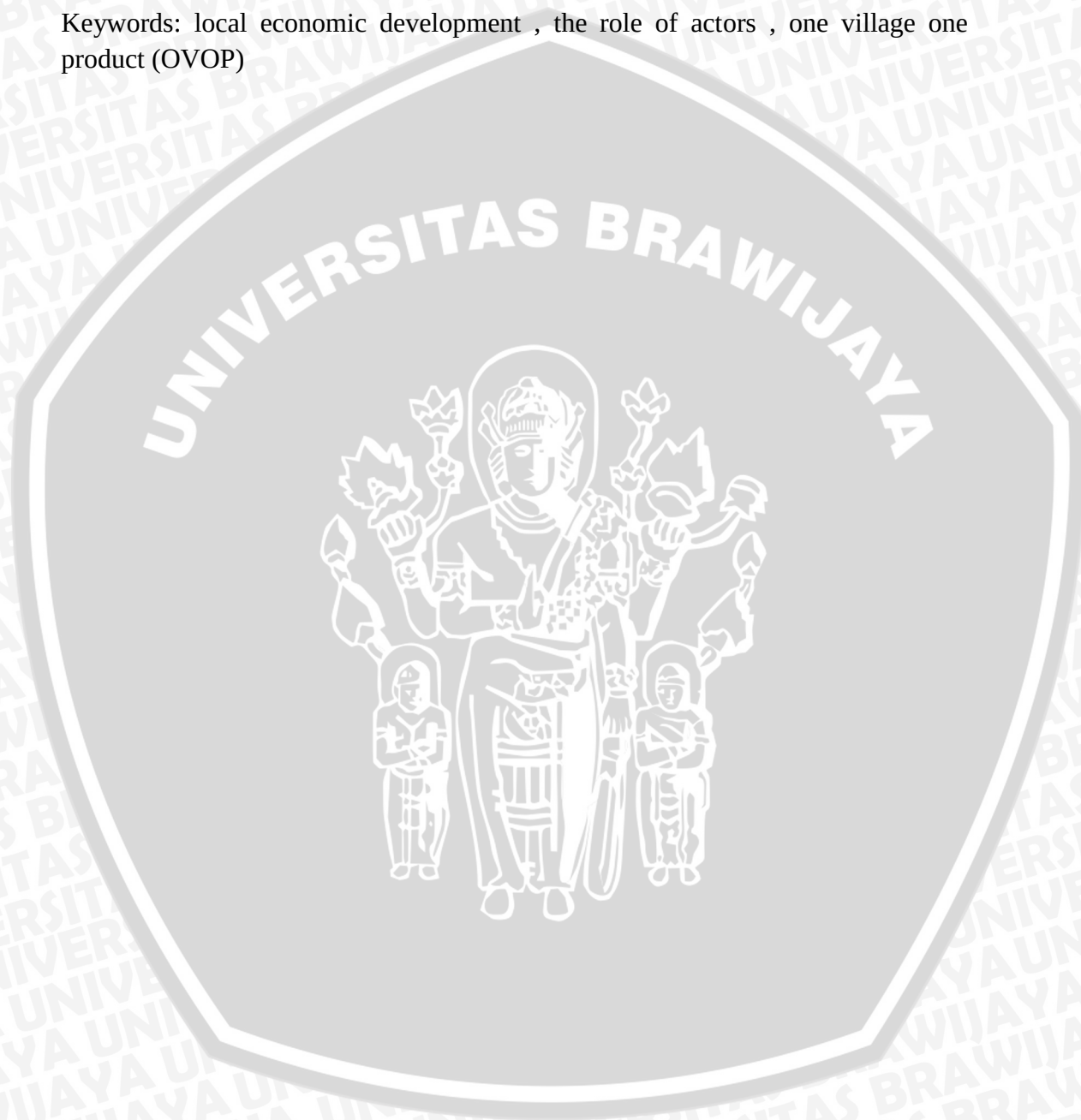
The study is done by using the kind of research deskritif by approach kualitatif. This study focused on the role capacity actor or institution in the development of local economy resource and coordination between the actor and aspect a venture potential local resources owned. In addition a focus is supporting factors and inhibitors in the development of local business resources based local economy.

Research results in the village suwaru shows that local businesses based on local economy resources going well. Village suwaru has the potential to progress based on the local business and public participation high in development potentials. Local business that existed in the village suwaru has characteristic in resources development ovop locale through the emphasis on 3 principle; local but global, independence and kreatifan, and human resources development. Support from actors are involved in the development of local economy resources shows a positive thing. Actors involved namely: 1) local governments 2) local businesses 3) locals 4) cooperatives 5) financial institutions 6) college. Based on the development of a local economy in the village suwaru particularly in the district of unfortunate no enterprises (BUMD) the plan that particular about ovop and results production. The cooperatives in the village suwaru not yet maximal of actor is institution handle resources in village. Marketing of the local results production is not yet capable has use merk self.

There needs to be effort to overcome constraints in the village suwaru in developing local business based local economy resources emphasis on one village

one top products. Everything in shape or institutional plan on district poor specifically handle OVOP. And then restore duty, and empower cooperative role in the village suwaru focusing on local potential owned the salak suwaru.

Keywords: local economic development , the role of actors , one village one product (OVOP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui One Village One Product (OVOP) (Studi Pada Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan serta kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan serta kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama ini.
7. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha dan para Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu dalam proses perijinan penelitian.
8. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Pagelaran, PG. Kreet, PNPM Mandiri Perdesaaan Kecamatan Pagelaran, dan Koperasi Kuba Salaka Suwaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. UD. Intan Suwaru dan pemilik UMKM “Griyo Oleh-Oleh” Suwaru yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, atas

kerjasamanya sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua informan yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan waktu dalam pengambilan data penelitian skripsi ini.
11. Kepada orang tuaku tercinta dan keluargaku, yang selalu memberikan doa serta dukungan semangat mulai awal masuk kuliah sampai dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-temanku di Jurusan Administrasi Publik angkatan 2011 yang telah memberikan bantuan dan doa tulus sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 14
A. Administrasi Publik	14
B. Administrasi Pembangunan	16
C. Pembangunan di Era Otonomi Daerah	17
1. Otonomi dan Desentralisasi	17
2. Pembangunan Daerah di Era Otonomi	20
3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah	21
D. Pengembangan Ekonomi Lokal	23
1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal	23
2. Paradigma Baru dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	24
3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal	26
4. Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal	27
5. Tahapan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	30
6. Kelembagaan dan Aktor dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	32

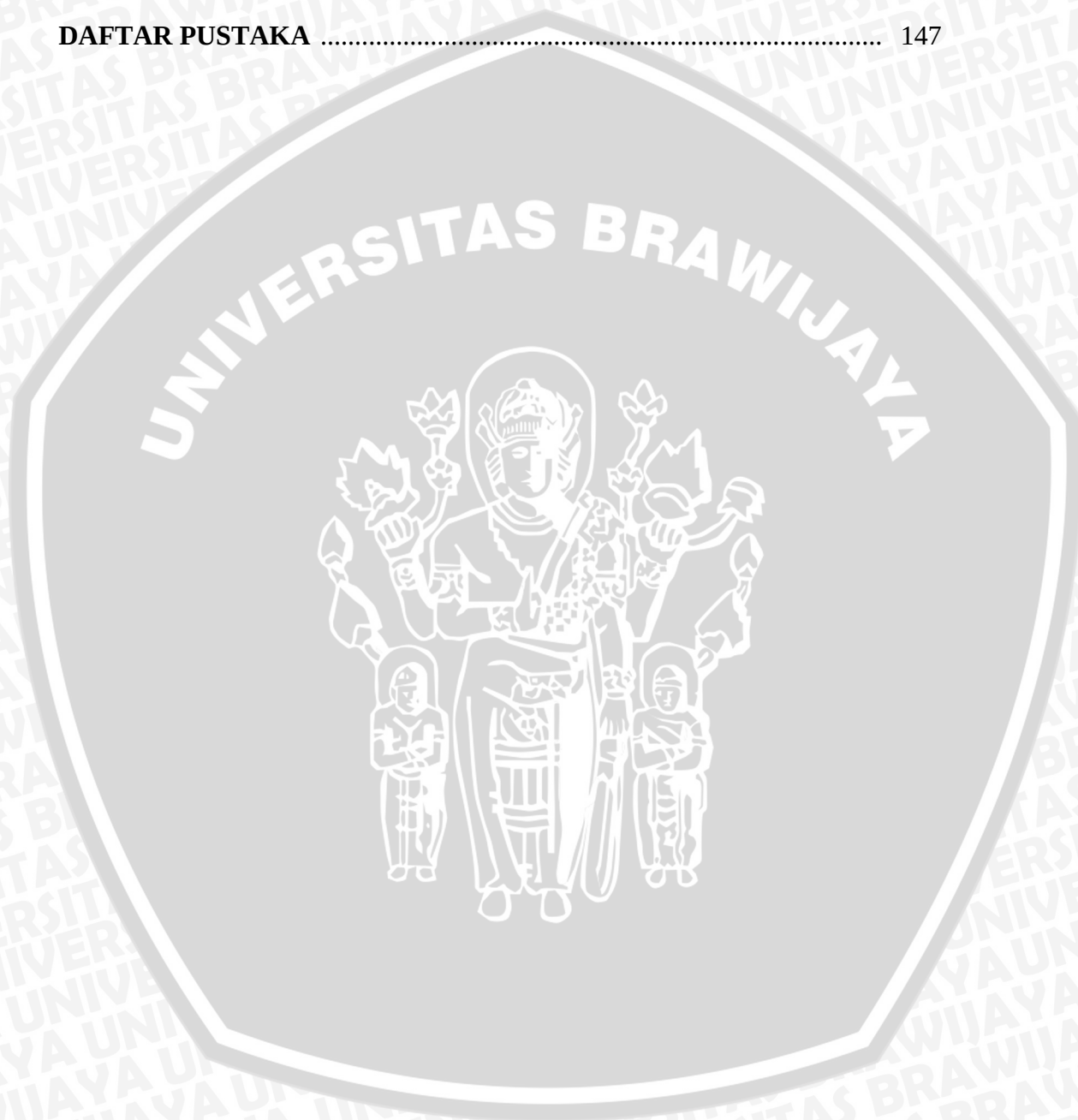
7. Konsep Quadruple Helix dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	36
8. Sumberdaya Utama dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	37
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	38
1. Definisi UMKM	38
2. Pengembangan UMKM	39
3. Strategi Pengembangan UMKM	42
F. <i>One Village One Product</i> (OVOP)	44
1. Pengertian OVOP	44
2. Tujuan dan Sasaran OVOP	45
3. Prinsip OVOP	46
4. Peran Instansi dalam OVOP	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian	58
G. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum	64
1. Kabupaten Malang	64
a) Sejarah Kabupaten Malang	64
b) Visi dan Misi Kabupaten Malang	68
c) Kondisi Geografis Kabupaten Malang	66
d) Kependudukan dan Sosial Ekonomi Kabupaten Malang	70
2. Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang	72
a) Gambaran Umum	72
b) Visi dan Misi Desa Suwaru	73
c) Kondisi Kependudukan dan Sosial Ekonomi Desa Suwaru	74
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	76
1. Pengembangan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang	76
a) Kelembagaan dan aktor/ <i>stakeholder</i> yang terlibat	80

1) Pemerintah Daerah	82
2) Pelaku Usaha Lokal	88
3) Masyarakat Lokal	91
4) Koperasi	95
5) Lembaga Keuangan	96
6) Perguruan Tinggi	99
b) Aspek-aspek dalam pengembangan UMKM	100
1) Aspek Manajemen	102
2) Aspek Produksi	103
3) Aspek Pemasaran	104
4) Aspek Keuangan	106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal melalui OVOP Di Desa Suwaru Kabupaten Malang	107
a) Faktor Pendukung	107
b) Faktor Penghambat	109
C. Pembahasan	111
1. Pengembangan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang	111
a) Kelembagaan dan aktor/ <i>stakeholder</i> yang terlibat	113
1) Pemerintah Daerah	114
2) Pelaku Usaha Lokal	117
3) Masyarakat Lokal	120
4) Koperasi	123
5) Lembaga Keuangan	124
6) Perguruan Tinggi	126
b) Aspek-aspek dalam pengembangan UMKM	131
1) Aspek Manajemen	131
2) Aspek Produksi	133
3) Aspek Pemasaran	134
4) Aspek Keuangan	135
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang	136
a) Faktor Pendukung	136
b) Faktor Penghambat	138

BAB V PENUTUP

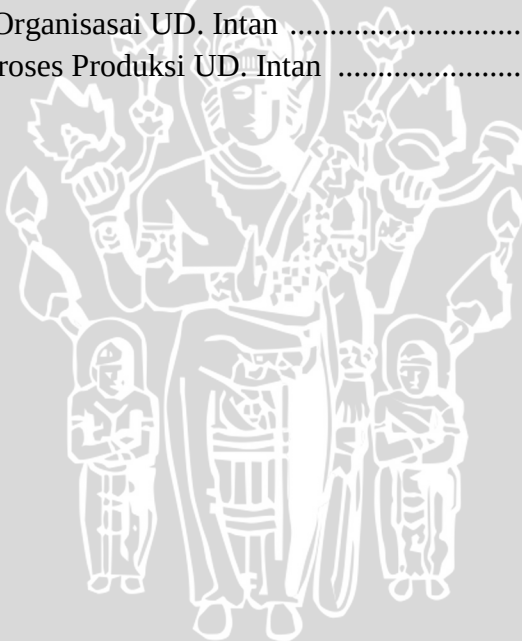
A. Kesimpulan	141
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA	147
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Paradigma Baru dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	25
Tabel 2. Sumberdaya Utama dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	37
Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	38
Tabel 4. Data Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2010-2013	70
Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2013	71
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Suwaru	74
Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Suwaru yang Bekerja	75
Tabel 8. Data Keuangan UD. Intan Tahun 2010-2013	106
Tabel 9. Waktu dan Cara Panen Salak Suwaru	122
Tabel 10. Peran aktor/ <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam Pengembangan UMKM berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang	128
Tabel 11. Manajemen Organisasi UD. Intan	132
Tabel 12. Waktu dan Proses Produksi UD. Intan	134



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Heksagonal Pengembangan Ekonomi Lokal	28
Gambar 2. Tahap Pengembangan Ekonomi Lokal	31
Gambar 3. Kelembagaan dan Aktor Pengembangan Ekonomi Lokal	32
Gambar 4. Model Analisis Data Seidel	62
Gambar 5. Peta Kabupaten Malang	69
Gambar 6. Peta Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran	73
Gambar 7. Pameran Produk Unggulan Antar Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2012	84
Gambar 8. Peresmian Show Room Produk Unggulan Pagelaran Desa Suwaru dan Peresmian Balai Desa Suwaru	87
Gambar 9. Tempat Pemasaran Produk UD. Intan	88
Gambar 10. Perkebunan Salak Milik UD. Intan	91
Gambar 11. Lapak Pedangan Buah Salak di Desa Suwaru	93
Gambar 12. Alat-alat Produski Milik UD. Intan	104
Gambar 13. Produk-Produk UD. Intan	120
Gambar 14. Skema Pengajuan dan Penyaluruan Prekeditan Modal SPP PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Pagelaran	126
Gambar 15. Struktur Manajamen Organisasai UD. Intan	132
Gambar 16. Proses Produksi Kripik UD. Intan	134

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
- Lampiran 2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
- Lampiran 3. Surat Ijin Untuk Melakukan Riset dari Kantor Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran
- Lampiran 4. Daftar wawancara
- Lampiran 5. Lampiran Surat Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, No.13/Dep.7/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010 tentang Daftar Usulan Potensi Produk Unggulan Daerah *One Village One Product* (OVOP) Tahun 2010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sehingga pembangunan nasional tidak menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Siagian (2001:4) bahwa pembangunan sendiri merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Tolak ukur suatu pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidaklah merata sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya perekonomian nasional yang ada menjadikan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Perlu adanya

peningkatan perekonomian nasional sehingga mampu memperkuat pondasi perekonomian Indonesia serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang serta bersaing dengan perusahaan yang lebih menggunakan modal besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak berbagai hambatan dan kendala, baik dari segi internal maupun eksternal seperti hal produksi pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha (Adisasmita, 2011;130).

Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dalam wadah UMKM. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep atau strategi pembangunan yang melibatkan peran serta sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya seperti sarana, modal, kelembagaan, kepemimpinan, dan lainnya (Adisasmita, 2011;131). Meskipun masyarakat memiliki potensi yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tetapi bila tidak ada pihak yang menggerakkan, tidak ada yang memprakarsai, dan tidak ada yang mengorganisasikan kegiatan tersebut, maka sudah jelas kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terealisasi. Sehingga perlu adanya dukungan dalam pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu pemerintah Indonesia

mengeluarkan sebuah kebijakan untuk dilaksanakan oleh seluruh elemen baik mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut tertuang melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah peningkatan efektifitas pengembangan *cluster*, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP).

One Village One Product (atau Satu Desa Satu Produk) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM. Hal ini memberikan pengertian bahwa masyarakat dapat mengelolah dan memberikan nilai tambah produk-produk yang dihasilkannya. Kekuatan ekonomi Indonesia yang selama ini banyak tersembunyi di perdesaan diharapkan dapat terangkat dengan pendekatan OVOP. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengartikan OVOP ini adalah

“*One Village One Product* (OVOP) adalah salah satu upaya membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat yang bertujuan mempercepat tekad pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengatasi pengangguran di Indonesia melalui pengembangan satu desa satu produk unggulan” (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;3).

Kementerian Koperasi dan UKM memaknai OVOP lebih cenderung membangun masyarakat pedesaan atau daerah melalui pendekatan pembangunan yang bersandar pada potensi sumberdaya, modal dan keseimbangan lingkungan pada lingkup koperasi dan UMKM. Khususnya dalam menghadapi ketatnya

persaingan usaha dalam era pasar bebas. Adanya peran koperasi ataupun UMKM tersebut menjadi optimal sebagai wadah pengembangan desa atau daerah yang memiliki komoditas atau produk unggulan.

Sebagai refleksi adanya pasar bebas, para negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India (www.bappekab.malangkab.go.id). Lima hal yang tidak boleh dibatasi dalam peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus investasi dan Arus tenaga kerja terlatih. Hal ini akan berdampak pada negara Indonesia yang akan menjadi pasar dari produk asing dan masyarakat Indonesia hanya sebagai penonton, karena tidak mampu bersaing.

Pergerakan pembangunan dengan sistem pasar bebas dimana antar wilayah, negara sudah tidak ada batas, maka diperlukan pendekatan satu desa satu produk (OVOP) dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi daerah. Potensi daerah tersebut sebagai modal dasar utama untuk mendorong berkembangnya produk-produk lokal untuk bersaing dengan produk-produk negara ASEAN lainnya. Konsep OVOP ini membutuhkan sebuah teori dan pendekatan yang sesuai dengan tujuan OVOP yaitu pengembangan ekonomi lokal atau teori *Local Economic Development* (LED).

Hal ini dilakukan untuk memperjelas arah pengembangan UMKM agar tetap berkembang dan meningkat. Pengembangan ekonomi lokal atau LED

merupakan suatu proses pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki sehingga menciptakan lapangan kerja, memberikan stimulasi kegiatan ekonomi (Blakely, 1989;58). Sedangkan menurut Said (2015;10) pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu proses kerjasama dan peran antara lembaga pemerintah daerah, swasta dan kemasyarakat menentukan dalam pengembangan ekonomi lokal.

Isu utama pengembangan ekonomi lokal adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembangunan dimana didasarkan pada karakteristik atau kekhasan daerah masing-masing. Tidak dapat dipungkiri setiap daerah dalam kebijakan pembangunan memiliki pendekatan yang berdeda dalam pendayagunaan sumberdaya lokal. Hal ini karena wilayah Indonesia secara geografis sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, kaya akan keanekaragaman potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ekonomi, budaya, institusi lokal, dan lain-lain. Disamping itu, saat ini sistem pemerintahan telah lebih terdesentralisasi dan meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat (sentralistik). Secara finansial, pemerintah memiliki keterbatasan keuangan negara, sementara secara manajerial pemerintah memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan sumberdaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya pemanfaatan sumberdaya dan sumberdana untuk

menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan peran swasta (baik dunia usaha dan masyarakat). Dimana sasaran utama pembanguana ekonomi dalam konsep pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang tersedia dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan suatu masyarakat dimana mereka bertempat tinggal (Said, 2015;1).

Persoalan yang paling mendasar dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber yang berpotensi dan dimiliki oleh masyarakat lokal, baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi maupun kelembagaan (Said, 2015; 1). Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya pemanfaatan sumberdaya untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan peran pemerintah dan swasta (baik dunia usaha maupun masyarakat) yang saling terkait satu sama lain. Ada pengembangan ekonomi lokal mampu menggerakkan kembali kekuatan ekonomi masyarakat lokal sebagai basis pengembangan perekonomian wilayah secara terukur, terencana, dan berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah daerah baik Kabupaten atau Kota wajib mengembangkan dan mengurus daerahnya dimana hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:

“Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Perkembangan komoditas atau produk hasil pertanian dapat diandalkan menjadi tulang punggung kegiatan perekonomian di pedesaan atau daerah.

Dukungan sumberdaya alam yang melimpah di Tanah Air mampu menjadikan bidang pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi Indonesia maupun daerah. Pembangunan yang berbasis pertanian merupakan bagian utama dari upaya peningkatan pendapatan paling rasional bagi masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sejumlah pedesaan atau daerah tidak terkecuali Kabupaten Malang, dimana bidang pertanian masih menjadi tumpuan utama perekonomian setempat. Oleh karena itu, bidang pertanian atau hortikultura masih sangat potensial dan layak dikembangkan dengan pendekatan OVOP agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pelaku usaha dan berdaya saing di lokal hingga mampu berdaya saing dipasar luar negeri.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah rencana rintisan yang ada di Provinsi Jawa Timur sesuai usulan potensi daerah melalui pendekatan OVOP di tahun 2010. Potensi daerah yang akan menjadi produk unggulan daerah yaitu salah satunya adalah keripik buah (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;85). Pemilihan keripik buah menjadi rencana rintisan produk unggulan tidak terlepas dari adanya sumber daya alam Kabupaten Malang yang memiliki aneka jenis buah-buahan yang tumbuh subur dan dikembangkan melalui UMKM. Harapanya dengan adanya pendekatan OVOP di Kabupaten Malang dapat meningkatkan kualitas produk dan peluasan pasar serta berkembang ekonomi lokal.

Salah satu strategi pemerintah Kabupaten Malang pada pembanguana ditahun 2010-2015 yaitu peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi (RPJMD Kab. Malang, 2010; 70). Strategi ini diarahkan melalui peningkatan produksi

komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri untuk tujuan ekspor. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang pada saat acara temu solusi perumusan pengembangan produk unggulan daerah di Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa pendekatan OVOP merupakan merupakan suatu gerakan revitalisasi daerah. Revitalisasi ini bertujuan untuk mengembangkan produk asli atau produk unggulan daerah supaya mampu bersaing ditingkat global. Sehingga dengan pengembangan komoditas unggulan yang ada dapat memajukan koperasi, industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Malang.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor perumusan produk unggulan beberapa waktu lalu dimana outputnya adalah tersusunnya rencana tindak dan solusi pengembangan produk unggulan olahan apel di Kab.Malang. Produk unggulan olahan apel merupakan salah satu dari sekian banyak potensi yang tersebar diseluruh desa/kelurahan dan Kecamatan di Kab.Malang. Diharapkan selain apel, tanaman kentang serta 11 komoditi hortikultura lainnya dimiliki Kab.Malang, di kembangkan sebagai produk unggulan daerah dan memiliki ciri khas yang dapat meningkatkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah Koperasi atau UKM.” (www.malangkab.go.id).

Sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang bahwa komoditas hortikultura lainnya selain apel dapat berkembang sebagai produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP. Komoditas hortikultura yang menjadi salah satu ciri khas daerah Kabupaten Malang selain apel adalah salak suwaru. Salak suwaru memiliki karakter berbeda dari salak-salak lainnya, yaitu rasa yang manis agak kemasaman dan memiliki

kandungan air yang lebih banyak dan dagingnya tebal. Salak suwaru banyak dibudidayakan di Kecamatan Pagelaran, tepatnya disekitar Desa Suwaru.

Produksi rata-rata salak suwaru setiap panennya pada pucak panen bulan september mencapai 32.960,3 ton (www.pertanian.jatimprov.go.id). Melimpahnya salak suwaru dimanfaatkan oleh warga sekitar menjadi olahan makanan ringan salah satunya adalah UD. Intan yang mengembangkan olahan keripik salak dan jenang salak. Salah satu hasil produksi usaha masyarakat di Desa Suwaru ini dipasarkan didaerah Malang Raya, Bali hingga Jakarta. Produk salak suwaru ini juga menjadi salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Malang.

Pengembangan usahan olahan salak suwaru sejak berdiri ditahun 2006 banyak mengalami berbagai masalah mulai dari pemasaran, modal (finansial), sumberdaya alam maupun manusia tetapi saat ini usaha UD. Intan adalah satu satunya usaha masyarakat yang ada di Kecamatan Pagelaran yang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta dan UD. Intan dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Peran pemerintah dan swasta banyak membantu dalam pengembangan usahan olahan buah salak, mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, penciptaan pasar hingga bantuan modal.

Melihat pemasaran hasil produksi salak suwaru yang belum mampu berdaya saing dipasar Indonesia maupun pasar luar negeri. Perlu adanya pengembangan dari berbagai kalangan baik dari pemerintah dan pelaku usaha. Harapannya dengan pengembangan ekonomi lokal melalui OVOP yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Malang, produk olahan salak suwaru dapat menjadi produk unggulan daerah dan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, dengan adanya konsep pengembangan ekonomi lokal yang mengidentifikasi aktor/*stakeholder* yang terlibat dalam OVOP. Sehingga dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki akan lebih besar berkembang, terencana, dan berkelanjutan.

Berdasarkan keinginan, potensi, dan teori yang digunakan, maka penulis tertarik pada pengembangan ekonomi lokal yang dikembangkan melalui *one village one product* (satu desa satu produk) maka judul skripsi ini adalah **“Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui *One Village One Product* (OVOP)” (Studi Pada Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui *one village one product* (OVOP) di Desa Suwaru Kabupaten Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui *one village one product* (OVOP) di Desa Suwaru Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah olahan buah salak Desa Suwaru Kabupaten Malang yang dikembangkan berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui *one village one product*.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah olahan buah salak Desa Suwaru Kabupaten Malang yang dikembangkan berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui *one village one product*.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai baik secara teoritis maupun praktis terhadap adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Kontribusi secara akademis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau sumber informasi di bidang administrasi publik dengan teori-teori yang dihubungkan pada praktek di lapangan mengenai pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui *one village one product* yang bertujuan untuk pembangunan daerah.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi secara praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat, pihak pemodal sebagai fasilitator dan medioator yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.

E. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara singkat mengenai penulisan skripsi dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang berisi dasar alasan penulis melakukan penelitian dan terdapat rumusan masalah yang diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dasar teori-teori atau landasan digunakan penulis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penyusunan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

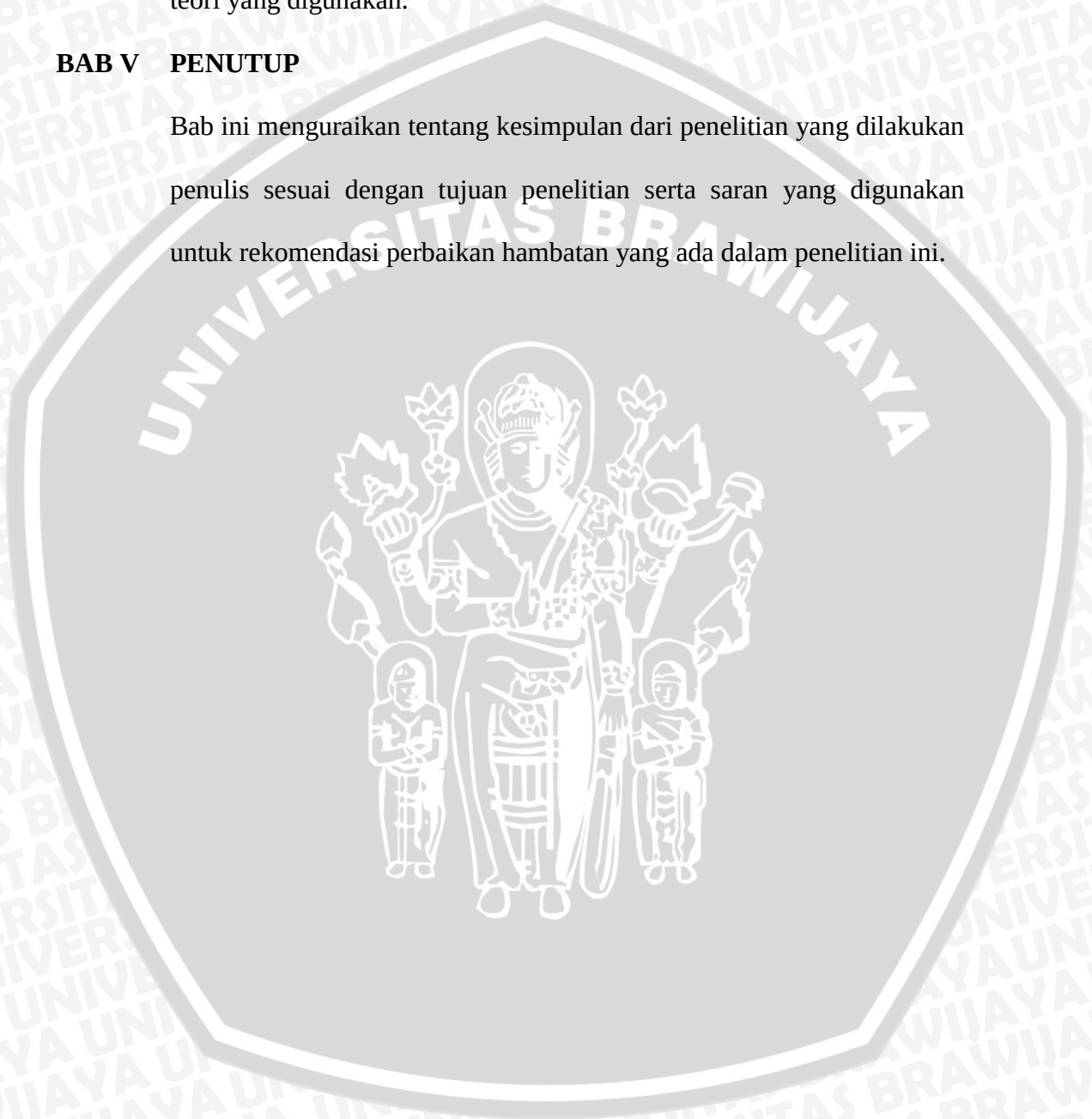
Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dimana dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis dan interpretasi data hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian serta saran yang digunakan untuk rekomendasi perbaikan hambatan yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini disebabkan karena perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah dan meningkatnya tuntutan-tuntutan masyarakat untuk mencapai kebutuhan. Administrasi memiliki dua arti yaitu arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit seperti yang diungkapkan Siagian (2001;47) sebagai berikut:

“Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan-kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai ‘darah’ bagi suatu organisasi”.

Disimpulkan bahwa administrasi dalam arti yang sempit merupakan kegiatan tata usaha yang didalamnya melakukan pencatatan setiap aktifitas yang dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan tujuan bersama. Sedangkan administrasi secara luas dapat diartikan sebagai proses segenap rangkaian kegiatan penataan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (Gie dalam Syafiie, 2006;14). Administrasi secara luas mempunyai unsur-unsur proses pelaksana sebagai berikut: (1) Pengorganisasian; (2) Manajemen; (3) Tata Hubungan; (4) Kepegawaian; (5) Keuangan; (6) Perbekalan; (7) Tata usaha; (8) Perwakilan (Gie dalam Syafiie, 2006;15).

Perbedaan pandangan dikalangan ilmuwan dan mahasiswa mengenai administrasi publik merupakan hal yang wajar dan merupakan bagaian dari visi keilmuan yang mengembangkan ilmu administrasi publik di perguruan tinggi (Dwiyanto dalam Thoha, 2008;76). Perkembangan administrasi perlu adanya pemerintah untuk memberikan jasa atau *servis* guna memberikan batasan kebebasan individu-individu yang telah banyak menimbulkan macam-macam kepentingan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Administrasi publik lah yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.

Berkembangnya administrasi publik di Indonesia pada era demokrasi membawa pergeseran titik tekan dari *Public Administration* dimana negara menjadi salah satu agen tunggal implementasi fungsi negara menjadi *Public Administration* yang menekankan fungsi pemerintah atau negara sebagai *public service*. Lebih jelasnya Utomo dalam Thoha (2008;78) menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam Perkembangan konsep ilmu administrasi negara, maka telah terjadi pergeseran titik tekan dari *Administration of Public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan; *Administration for Public* yang menekankan fungsi negara/pemerintahan yang bertugas dalam *Public Service*; ke *Administration by Public* yang berorientasi bahwa *public demand are differentiated*, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik pada *putting the customers in the driver seat*. Dimana determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama atau sebagai *driving forces*”.

Pemahaman seperti itu memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang menjadi dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat tersebut. Hal ini menurut Thoha (2008;75) merupakan suatu kajian yang

sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai para ahli bahwa administrasi publik merupakan kerjasama sekelompok orang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan baik antara pemerintah, swasta, rakyat dalam menata kehidupan sosial dan ekonomi dalam mengembangkan sumberdaya yang ada. Sehingga administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat.

B. Administrasi Pembangunan

Pembangunan secara estimologi berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk, dalam kata kerja “bangun” juga diartikan membuat, mendirikan atau membina (Suryono, 2010). Lebih lanjut pengertian pembangunan diartikan oleh berbagai ahli dengan perfektif-perfektif yang berdeda, diantaranya yaitu Siagian dalam Suryono (2010) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Selanjutnya Katz dalam Suryono (2010) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai dari sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya

yang satu ke budaya lain atau dari negara yang satu ke negara yang lain. Oleh karena itu dalam pembangunan (*develompent*) terkandung unsur-unsur (Suryono, 2010):

- a. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- b. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik;
- c. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terus menerus oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka memperbaiki kehidupan lebih baik yang mengarah pada modern. Pembangunan sendiri tidak terlepas dari adanya pembangunan di daerah-daerah yang akan menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya adalah adanya pembangunan daerah di era otonomi daerah.

C. Pembangunan di Era Otonomi Daerah

1. Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi berasal dari dua bahasa Yunani yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (undang-undang), yang berarti perundangan sendiri (*Izelf Wetgeving*). Selanjutnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah supaya lebih optimal dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemberian daerah otonom kepada pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah pusat memberdayakan pemerintah dalam mengelola pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, implentasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemberdayaan ini harus lebih mengupayakan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

Disamping itu diberikan pula pedoman standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sehingga memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian daerah sebagai daerah otonom juga akan memberikan kewenangan dan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan desentralisasi.

Di era otonomi daerah dimana pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah otonomi melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi didefinisikan secara

berbeda-beda dari perspektif masing-masing oleh para ahli. Menurut Rondinenelli et al. dalam Febryanti (2014;20) mendefinisikan desentralisasai dalam perspektif administrasi yaitu:

Decentralization is the transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central government and its agencies to field units or government agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, area-wide, regional or functional authorities, or non governmental private or voluntary organizations.

(Desentralisasi adalah proses atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memajemen fuungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional, wewenang fungsional, peemerintah otonomi lokal, atau lembaga-lembag non pemerintah).

Sehingga adanya desentralisasi memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam pembagaian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib (politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama) dimana pemerintah pusat yang tidak boleh dibagi dengan pemerintah daerah dan urusan pilihan dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur daerahnya. Terbentuknya sistem desentralisasi dalam tata pemerintahan yang otonom merupakan dorongan kuat untuk memberikan dan memperbaiki pelayanan sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan berdasarkan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat.

2. Pembangunan Daerah di Era Otonomi

Pembangunan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi suatu wilayah untuk meningkatkan taraf hidup warganya. Sekitar tahun 1950-an, definisi pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000;3). Tetapi pendapatan per kapita sebagai ukuran pembangunan memiliki banyak kelemahan karena kurang mencerminkan tingkat kesejahteraan sebenarnya dan tidak menjamin kesempatan kerja dan pemerataan. Pada kenyataannya memang ada sejumlah negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cukup tinggi selama tahun 1960-an dan 1970-an, namun masalah-masalah pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan pendapatan riil dari 40 persen penduduknya yang paling miskin tidak banyak mengalami perbaikan atau bahkan dalam banyak kasus justru semakin buruk.

Masalah pokok pembangunan terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan daerah-daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan otonomi, daerah harus mampu menyelenggarakan kewajiban mengembangkan sumberdaya produktif di daerah. Penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus menyesuaikan dengan potensi sumberdaya daerah. Sumberdaya yang dimaksud

adalah sumberdaya manusia, yaitu kekuatan masyarakat lokal untuk meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan sumberdaya alam yaitu potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan pengelolaan yang optimal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan daerah merupakan proses kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di era otonomi daerah harus memahami dengan benar apa yang dimiliki, dibutuhkan, dan dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun optimalisasi potensi daerah harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Tahap pertama dalam setiap organisasi dalam pembangunan daerah adalah menentukan peran (*role*) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Pembangunan identik dengan upaya suatu bangsa, negara dan pemerintah, ketiga elemen ini harus saling terkait satu sama lain. Akan tetapi harus diakui bahwa pemerintah memainkan peran yang paling dominan dalam proses pembangunan. Apalagi di era otonomi daerah saat ini dibutuhkan peran pemerintah yang bisa menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan kondisi dan

potensi daerahnya. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah ada 4 (empat) peran yang dapat diambil dalam proses ekonomi daerah menurut Blakely dalam Kuncoro (2004;113-114) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Wirausaha
Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan pro aktif dalam mengembangkan bisnis daerah. Termasuk dalam hal bagaimana memanfaatkan aset pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan bisnis daerah dan pemberdayaan masyarakat marginal.
- b. Koordinator
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan dan strategi ekonomi.
- c. Fasilitator
Pemerintah daerah memfasilitasi kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan dalam mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya seperti pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan dalam kebijakan pembangunan ekonomi.
- d. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Sehingga peran pemerintah dalam pembangunan tidak hanya sebagai pembuat dan pemangku kebijakan. Akan tetapi pemerintah harus berperan aktif dalam berbagai hal dimana pemerintah harus mampu menggerakkan masyarakat agar turut aktif dalam pembangunan daerah. Karena tanpa adanya peran aktif dari masyarakat apa yang telah dibuat dan direncanakan pemerintah tidak akan berjalan.

D. Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada era otonomi prioritas pembangunan berada pada skala daerah, dimana pembangunan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada di daerah. Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut pula diungkapkan oleh Blakely (1989;58) mengenai pengembangan ekonomi lokal.

“Locally based economic development is not merely new rhetoric but represent a fundamental shift in the actors as well as the activities associated with economic development. it is essentially a process by which local government and/ or community based groups manage their existing resources and enter into new partnership arrangement with the privat sector, or with each other to create new jobs and stimulate economic activity in a defined economic zone. The central feature in locally oriented or based economic development is in the emphasis on "endogenous development" policies using the potential of local human, institutional, and physical resources. This orientation leads to a focus on taking local initiatives in the development process to create new employment and stimulating increased economic activity”.

Berdasarkan pengertian diatas dimana pembangunan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tapi merupakan perubahan mendasar didalam aktor serta kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Menurut Said (2015; 54) pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Pembangunan ekonomi lokal pada intinya bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan berbagai peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat. Dibutuhkan

peran aktif dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat dan menggunakan sumber lembaga berbasis daerah (dimana daerah tersebut ada dan memiliki potensi ekonomi) diperlukan untuk menilai potensi dan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan ekonomi lokalnya.

Orientasi ini memiliki fokus pada pengambilan inisiatif lokal dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi agar meningkat. Fokus pengembangan ekonomi lokal lebih dijelaskan oleh Said (2015;11) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kandungan lokal
- 2) Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis
- 3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi
- 4) Pembangunan berkelanjutan
- 5) Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal
- 6) Pengembangan usaha kecil dan menengah
- 7) Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif
- 8) Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- 9) Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah
- 10) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

2. Paradigma Baru dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Konteks pembangunan daerah terdapat paradigma baru dalam mengembangkan pembangunan ekonomi daerah agar dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan memiliki keseimbangan antara kegiatan ekonomi, dampak sosial, dan keseimbangan lingkungan. Lingkungan dan sosial tidak lagi hanya sebagai objek melainkan sebagai perhatian untuk dijaga dan dilestarikan.

Menurut Blakely (1989;69) paradigma baru dalam pengembangan ekonomi lokal adalah:

Tabel 1. Paradigma Baru dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = Semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang cocok dengan kondisi penduduk daerah
Unggulan Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokal	Keunggulan komparatif didasarkan pada saet fisik	Keunggulan komparatif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Kesediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Blakely (1989;69)

Paradigma baru yang disampaikan Blakely ini merupakan terobosan baru untuk mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas utama Pemerindah Daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Empat komponen dalam konsep paradigma baru yang disampaikan Blakely tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Adisasmita (2011;45), yaitu sebagai berikut:

- Organisasi harus mengembangkan pekerjaan yang cocok dengan kondisi penduduk daerah. Kecocokan atau keserasian (*suitable condition*) mencerminkan kondisi optimalitas (yang terbaik atau sebaik mungkin). Meskipun sumberdaya terbatas, harus diupayakan untuk dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selanjutnya dilakukan perencanaan dan pelaksanaan secara ekonomis, efisien, dan efektif, untuk mencapai hasil yang optimal.
- Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Pada saat sekarang lembaga-lembaga ekonomi di daerah berskala kecil, modalnya lemah, manajemennya terbatas, pasarnya lokal, pengembangannya terkendala, maka diperlukan upaya penguatan melalui kemitraan dan privatisasi sehingga berskala besar dan berorientasi pasar yang lebih luas, maka diharapkan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi daerah yang

tinggi, peningkatan produksi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan taraf hidup masyarakat yang lebih tinggi.

- c) Keunggulan komparatif berbasis lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada sumberdaya alam yang potensial, sehingga dicapai keunggulan komparatif pada tingkat biaya produksi yang rendah, daya saing bertambah kuat, dan pasar menjadi lebih luas. Namun demikian, produksi jangan dilaksanakan secara maksimal, dikhawatirkan dapat merusak lingkungan (contoh: pertambangan, kehutanan, perkebunan secara berlebihan akan mengakibatkan erosi, banjir, tanah longsor) menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang sangat besar, yang merugikan masyarakat di daerah.
- d) Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Pembangunan ekonomi dilaksanakan menerapkan *knowledge management* (manajemen ilmu pengetahuan), artinya mendasarkan pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana masa depan. Berdasarkan masa lalu dan sekarang akan diperoleh pelajaran yang terbaik, sehingga perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi yang terbaik menghadapi perkembangan masa depan.

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal

Sebagai sebuah strategi, pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, pemerintah lokal dan industri-industri lokal. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publik, bisnis, masyarakat serta mendorong terjadinya kondisi yang nyaman bagi pertumbuhan ekonomi maupun ketenagakerjaan tersirat makna bahwa PEL melibatkan berbagai pihak sebanyak mungkin *stakeholder* yang ada. Berdasarkan fokus penerapannya, tujuan PEL meliputi (Supriyadi, 2007):

- a. Membentuk jaringan kerja kemitraan antar pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional dan global
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaannya.
- c. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publik, bisnis, dan masyarakat,
- d. Secara kolektif mendorong kondisi yang nyaman bagi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Melihat tujuan pengembangan ekonomi lokal maka dapat dilihat keberhasilan ini akan berdampak pada perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha serta berdayanya lembaga usaha masyarakat (mikro, kecil dan menengah) dalam proses produksi dan pemasaran. Lebih detailnya tujuan dan sasaran yang pengembangan ekonomi lokal menurut Said (2015;13) yaitu:

- 1) Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
- 2) Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.
- 3) Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
- 4) Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
- 5) Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
- 6) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
- 7) Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
- 8) Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Sehingga dengan adanya tujuan dan sasaran dalam pembangunan ekonomi lokal dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

4. Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal

Pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal perlu adanya komponen yang benar dan memberdayakan segala potensi sehingga dapat menjawab dan melaksanakan sesuai tujuan dan sasaran pengembangan ekonomi lokal pada suatu daerah. Komponen dalam pengembangan ekonomi lokal diupayakan untuk

mendorong upaya pemanfaatan dana pembangunan yang terbatas untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah masyarakat secara efektif agar bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan kemampuan ekonomi dan pendapatan daerah. Komponen pengembangan ekonomi lokal ada enam unsur yang disebut dengan heksagonal. Terdapat 6 (enam) segitiga yang secara keseluruhan membentuk heksagonal, yang berfungsi untuk mengorganisasikan konsep utama dan instrumen pengembangan ekonomi lokal. Menurut Said (2015:14) heksagonal pengembangan ekonomi lokal digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Heksagonal Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber: Said (2015:14)

Berdasarkan gambar 1. Heksagonal Pengembangan Ekonomi lokal Terdiri dari (Said, 2015:16-27) :

- a) Kelompok Sasaran, adalah pelaku usaha yaitu terdiri dari pelaku usaha lokal, investor luar, dan pelaku usaha baru.

- b) Faktor lokasi, faktor yang menggambarkan daya tarik dari sebuah lokasi bagi penyelenggaraan kegiatan usaha), terdiri dari: faktor lokasi terukur (*tangible factor*), faktor lokasi tidak terukur (*intangible factor*) bagi pelaku usaha dan faktor lokasi tidak terukur (*intangible factor*) individual.
- c) Kesinergian dan fokus kebijakan, tiga hal yang saling berkaitan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas, serta pembangunan wilayah. Ketiga hal tersebut memiliki tujuan yang berbeda namun saling berhubungan dan membentuk keterkaitan.
- d) Pembangunan berkelanjutan, terdiri dari pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Aspek ini merupakan bagian dari pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang inovatif.
- e) Tata pemerintahan, segitiga dalam ketatakepemrintahan memastikan bahwa hubungan pelaku usaha dan masyarakat dibangun atas berlangsungnya reformasi sektor publik dan pengembangan organisasi pelaku usaha.
- f) Proses manajemen, pengembangan ekonomi lokal merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari diagnosa dan perencanaan, implementasi dan monitoring, serta evaluasi, patok duga (*benchmark*) dan refleksi.

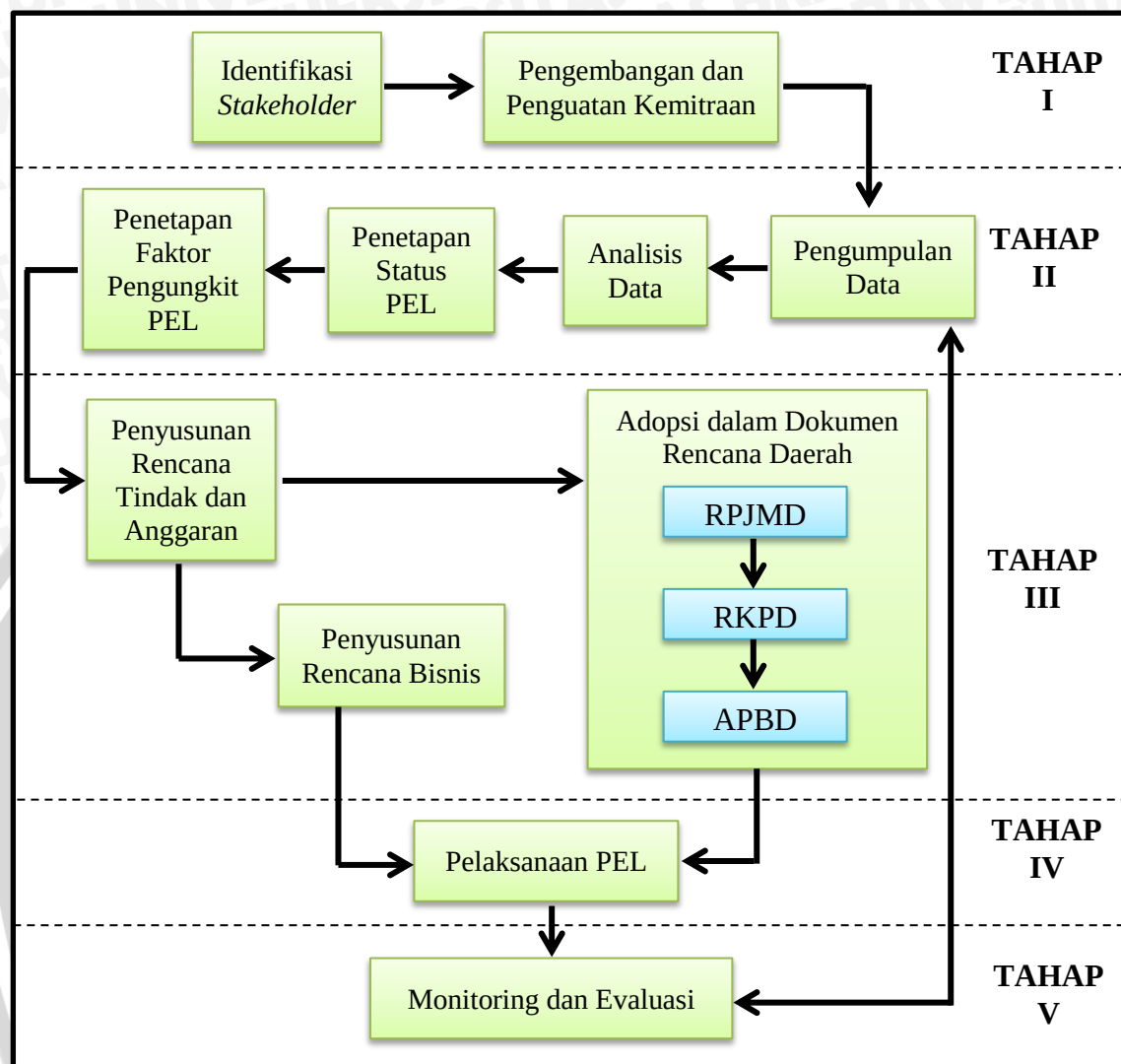
Dapat ditarik kesimpulan bahwa heksagonal komponen pengembangan ekonomi lokal terdiri dari segitiga pertama dan kedua yaitu kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal dan faktor lokasi merupakan instrumen kunci dari pengembangan ekonomi lokal. Segitiga ketiga dan keempat yaitu keterkaitan dan

fokus kebijakan, dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan faktor inovatif yang akan memperluas cakupan pengembangan ekonomi lokal. Faktor kelima dan keenam merupakan isu penting yang terjadi dalam proses penerapan pengembangan ekonomi lokal.

5. Tahapan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Sebagai suatu proses kebijakan, pengembangan ekonomi lokal mempunyai tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan adanya pengembangan ekonomi lokal. Tahapan ini berguna untuk menentukan apakah potensi daerah tersebut dapat dikembangkan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal. Menurut Said (2015:29) tahapan pengembangan ekonomi lokal terbagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal
- 2) Kajian Cepat Status Pengembangan Ekonomi Lokal
- 3) Penyusunan Rencana dan Anggaran
- 4) Pelaksanaan
- 5) Monitoring dan Evaluasi



Gambar 2. Tahap Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber: Said (2015;28)

Berdasarkan gambar 2. hal terpenting dalam pengembangan ekonomi lokal adalah mengidentifikasi *stakeholder* (Identifikasi *stakeholder*). Ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang berperan menjadi kunci dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal. Hasil yang diharapkan dalam identifikasi *stakeholder* ini adalah diketahuinya *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal.

6. Kelembagaan dan Aktor dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Isu pokok dalam pengembangan sumber-sumber ekonomi daerah adalah bagaimana membangun kapasitas kelembagaan atau badan itu sendiri sehingga mereka mampu mengelola potensi-potensi sumber-sumber ekonomi daerah yang dimiliki secara optimal. Lebih jelasnya Said (2015;3) menjelaskan tentang konsep pengembangan ekonomi lokal juga membahas mengenai peran kelembagaan dan aktor yang ada dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah.



Gambar 3. Kelembagaan dan Aktor Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber: Said (2015;3)

Berdasarkan Gambar 3. tentang kelembagaan dan aktor pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dapat dilihat bahwa dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal terdapat aktor yang berperan penting. Secara lebih

terperinci Said (2015;3) menyatakan bahwa peran setiap yang dimaksud mencakup peran aktif dalam proses maupun aktor yang berperan sebagai pendukung terlaksananya pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya secara lengkap Said (2015;3) menjabarkan berdasarkan analisis konsep pengembangan ekonomi lokal, aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu aktor utama dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Kewajibannya adalah melakukan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah berperan dalam mengkoordinir pembuatan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi daerah di tingkat daerah, berperan aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan sumberdaya manusia serta mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah.

2) Pelaku usaha lokal dan Pelaku usaha baru

Pelaku usaha lokal merupakan salah satu aktor yang berperan dalam melakukan usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah. Pengelolaan ini merupakan upaya dalam meningkatkan nilai jual sumberdaya yang ada ataupun mendistribusikan sumberdaya alam yang ada pada luar wilayah sentra produksi. Sedangkan pelaku usaha baru adalah pelaku usaha yang bergabung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dengan menciptakan inovasi usaha untuk mendukung proses pengembangan yang telah berlangsung. Kedua pelaku usaha tersebut sama-sama memiliki peran

untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dan mendukung dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

3) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor utama dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Masyarakat lokal yang melaksanakan pengembangan serta pengelolaan sumberdaya alam yang di wilayah tersebut. Masyarakat lokal yang mengkoordinir proses sumberdaya alam diperoleh, distribusi, pengelolaan, serta pengelolaan sumberdaya manusia yang ada. Masyarakat juga berperan sebagai kontrol atas pelaksanaan pengembangan yang dilaksanakan. Pelaksanaan peran masyarakat lokal juga bermitra atau bekerjasama dengan pihak lain.

4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik secara mandiri dibentuk maupun hasil kemitraan dengan pihak lain dalam mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah. BUMD merupakan badan yang menaungi proses pengelolaan khusus pada sektor tertentu.

5) Koperasi

Koperasi merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinir urusan sumberdaya pada sektor tertentu yang ada di kawasan khusus. Urusan yang dimaksud adalah urusan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya modal, serta sumberdaya pendukung lainnya.

6) Lembaga Keuangan di daerah

Lembaga keuangan yang ada di daerah memiliki peran dalam menyediakan sumberdaya modal dalam menunjang proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Lembaga keuangan ini dapat berasal dari Pemerintah Daerah artinya yang menyediakan adalah Pemerintah Daerah atau berasal dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta.

7) Perguruan Tinggi

Merupakan aktor pendukung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di suatu wilayah. Perannya adalah memberikan evaluasi dan kontribusi akademis terhadap proses pengembangan. Selain itu juga memberikan aksi langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya baik secara perseorangan maupun dari hasil kerjasama.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengembangan ekonomi lokal melibatkan semua sektor yang ada dan yang terpenting ialah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat lokal maupun pelaku usaha lokal harus berperan aktif dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki dengan dasar landasan pengetahuan dan regulasi yang jelas yang telah diterapkan pemerintah. Adanya masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pihak ketiga atau pihak swasta (lembaga keuangan, BUMD, koperasi dan perguruan tinggi) memiliki arti yang penting dalam memberikan masukan informasi dan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya agar pengembangan ekonomi lokal yang telah direncanakan pemerintah daerah dapat terus berlanjut.

7. Konsep *Quadruple Helix* dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Keterlibatan para aktor dalam pengembangan ekonomi lokal melibatkan adanya para akademisi. Keterlibatan para akademisi ini memberikan pengetahuan atau *knowledge* terhadap kebutuhan pasar atau pengguna dalam mengembangkan ekonomi lokal yang ada. Sama halnya dengan konsep pengembangan ekonomi lokal dimana melibatkan masyarakat luas konsep *quadruple helix* juga melibatkan masyarakat luas (*civil society*) meliputi: individu, asosiasi ataupun kelompok di luar akademisi, bisnis dan pemerintah. Perkembangan model ini sangat didukung oleh fenomena *bottom up* melalui *open innovation* dari anggota masyarakat, yang dikenal dengan istilah masyarakat industri (*industrial society*) dan model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (*use-oriented innovation approach*) yang diciptakan oleh para akademisi (Zuhal, 2012;49).

Aktifitas inovasi pada *quadruple helix* lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Model *Quadruple helix* sangat melibatkan masyarakat dalam proses menciptakan inovasi. Hal ini menguntungkan pengusaha UKM karena dapat mempersingkat waktu inkubasi, dan meminimumkan biaya dan resiko yang berasosiasi dengan pengembangan sebuah produk maupun servis baru (Zuhal, 2012;49). Menurut Zuhal (2012; 49-50) ada lima elemen kunci peranan dalam mekanisme model *quadruple helix*, yakni:

- a) terbentuknya jaringan kemitraan;
- b) terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna;

- c) munculnya para pengusaha berbasis *enterprise*, yang meningkatkan *corporate venturing*, *starts-up* dan *spin-off*;
- d) Pengelolaan HKI secara proaktif; dan
- e) berkembangnya strategi *Connect and Develop* (C&D) yang tujuan untuk mencapai tingkat *competitive advantages* di pasar.

8. Sumberdaya Utama dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Diperlukan sebuah unsur-unsur yang harus diperhatikan bila ingin membangun ekonomi suatu daerah mulai dari alam hingga buatan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal. Jika salah satu unsur-unsur tersebut tidak ada atau hilang, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi, bahkan bila unsur-unsur lain hadir didalamnya. Menurut Blakely (1989) ada 5 (lima) unsur kunci yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi lokal suatu daerah yaitu:

Tabel 2. Sumberdaya Utama dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Unsur Sumberdaya	Indikator
a) Bahan	• Tanah • Bangunan • Lokasi • Infrastruktur/Sumberdaya Alam
b) Sumberdaya Manusia (tenaga kerja/buruh)	• Tenaga Yang Terampil (Keahlian Pribadi) • Kapasitas Tenaga Kerja • Pendidikan dan Kapasitas Pelatihan
c) Pasar	• Kompetisi • Penetrasi • Strategi Pemasaran
d) Manajemen	• Struktur Organisasi • Manajer/Operator • Penelitian dan Pengembangan • Pemasaran dan Penjualan
e) Modal/Uang	• Modal Kepemilikan • Dana Pinjaman/Utang • Lembaga Modal • Subsidi dan Pengganti Modal Langsung

Sumber: Blakely (1989;137)

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Didalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang telah diatur dalam payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada UMKM, diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, definisi UMKM merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria UMKM yang dimaksudkan sesuai dengan Pasal 6 UU UMKM yang terlihat pada tabel 3. Berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel kriteria UMKM menurut Pasal 6 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didefinisikan oleh Kemenegkop dan UKM ini berdasarkan kekayaan bersih usahanya dan omzet yang dihasilkan pertahunnya. Kekayaan bersih yang dimaksudkan bukan termasuk harga dan bangunan. Definisi UMKM tidak hanya berdasarkan kekayaan bersih usahanya, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kuncoro (2010) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut kategori BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, usaha mikro, kecil (UMKM) dan menengah harus mampu memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pengembangan UMKM. Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dimana pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing. Pada saat ini telah cukup banyak upaya yang dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan UMKM akan tetapi kenyataannya masih banyak

kelemahan dalam berbagai aspek seperti manajerial, permodalan dan masing-masing instansi atau lembaga yang melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan UMKM menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah.

Sebagai usaha masyarakat, pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi pengembangan usaha dalam berbagai bidang seperti produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi (Pasal 16 UU UMKM). Selain itu penentu pengembangan UMKM menurut Kuncoro (2010;89) yang diawali dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Proses Produksi

Peningkatan proses produksi dalam hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan alat produksi, efisiensi dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditujukan untuk memperbaiki proses produksi UMKM.

b. Sumber Daya Manusia

Hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses produksi suatu UMKM tersebut, kualitas SDM harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Masalah dasar UMKM adalah terbatasnya tenaga kerja yang terampil, rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya kerja pendidikan, terbatasnya tenaga kerja lokal dan rendahnya pengalaman internasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM bagi pelaku, pengrajin, manajer, dan pekerja yang bergerak dalam bidang UMKM perlu menjadi prioritas.

c. Bahan Baku

Ketersediaan bahan baku juga menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM karena tersedia bahan baku, substitusinya dan bahan bantu yang lebih efisien dan tersedia dengan mudah mampu meningkatkan proses produksi.

d. Akses Pasar/Pembeli

Menjamin pasar bagi produk-produk dari UMKM diperlukan upaya meningkatkan daya saing produk-produk UMKM, salah satunya dengan usaha untuk dapat memenuhi standard pembelian/industri, seperti HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektuan) dan standar mutu internasional (ISO) dan perluasan pasar pemasaran.

e. Modal

Masalah modal dilakukan dalam pengembangan UMKM dengan diupayakannya mendapat jaminan tersedianya modal kerja dan investasi dengan prosedur yang sederhana dan dekat lokasi, tersedianya dana untuk langkah inovasi, revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penjaminan kredit UMKM.

f. Manajemen

Hal terakhir dalam pengembangan UMKM adalah dalam manajemen. Pada dasarnya manajemen UMKM merupakan tempat terutama dalam pemasaran produk sehingga apabila pemasaran produk kurang efisien, sistem akuntansi dan audit yang baik belum diterapkan, kurang mampunya beradaptasi dengan lingkungan usaha, manajer kurang kompeten, belum memenuhi kepuasan

pelanggan, etika manajemen kurang mendukung. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dari sisi manajemen diprioritaskan pada dua hal yakni: (1) manajemen administrasi, keuangan, dan proses produksi; (2) layanan pengembangan bisnis.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan UMKM memerlukan beberapa aspek-aspek yang harus dikembangkan. Aspek-aspek tersebut dijadikan penentu untuk mengembangkan usaha. Sedangkan menurut Suryana (2006;186) aspek-aspek di dalam mengembangkan usaha adalah sebagai berikut:

- a) Aspek Manajemen, berkaitan dengan sumberdaya manusia dalam kepemilikan usaha, manajemen usaha, karyawan.
- b) Aspek Produksi, berkaitan dengan bahan baku, mesin dan peralatan, volume produksi.
- c) Aspek Pemasaran, berkaitan dengan perkembangan pasar terhadap produk, prospek pasar dan pemasaran, sasaran pemasaran, dan rencana pemasaran.
- d) Aspek Keuangan, berkaitan dengan kebutuhan akan sumber dana, keuntungan dan kerugian usaha.

3. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha kecil, mempunyai fungsi, peran dalam berbagai bidang maka dari itu agar dapat berfungsi dan berperan secara maksimal sebagai pemberdaya bidang ekonomi dan sosial untuk waktu yang akan datang, diperlukan upaya pengelolaan, pengembangan atau penguatan kemampuan dalam operasional

usahanya. Penguatan kemampuan usaha bagi usaha kecil, memerlukan strategi khusus, agar supaya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Strategi yang dapat digunakan adalah strategi berbasis sumber daya (*resource based strategy*) (Mahoney dalam Suryana, 2006;170). Strategi ini dinilai potensial untuk memelihara keberhasilan perusahaan ketika berada dalam situasi eksternal yang bergejolak, misalnya pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Strategi berbasis sumber daya ini menurut Albert Wijaya dalam Suryana (2006;171) lebih murah dan ampuh karena usaha kecil bisa memanfaatkan sumberdaya alam dan tenaga kerja lokal. Pusat perhatian dalam strategi berbasis sumberdaya ini dalam perusahaan/usaha kecil untuk menciptakan keunggulan daya saing untuk mencari keuntungan besar merupakan strategi jangka pendek dan statis, karena untuk meraih keuntungan yang berkesinambungan yang diperlukan adalah daya saing jangka panjang (Suryana, 2006;170). Dapat ditarik kesimpulan bahwa perhatian utama harus diletakkan pada keunggulan daya saing untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi melalui potensi sumber-sumber daya alam (lokal) yang ada dan sumberdaya manusia yang dibekali dengan ilmu teknologi pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Dengan menggunakan strategi berbasis sumberdaya, dunia usaha Indonesia akan bangkit dan berusaha untuk menciptakan sumberdaya khusus dari perusahaan atau usahanya serta tidak lagi terlalu mengandalkan strategi kekuatan pasar dan fasilitas pemerintah.

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi berbasis sumber daya diantaranya (Grant dalam Suryana, 2006;171):

- a) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya, seperti teknologi, kapabilitas karyawan, paten dan merk, kemampuan keuangan, kecanggihan pemasaran, pelayanan pelanggan.
- b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan atau kapabilitas.
- c) Menyotir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi.
- d) Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya ini dan kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen.

F. *One Village One Product* (OVOP)

1. OVOP

One Village One Product (Satu Desa Satu Produk-OVOP) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang berada di pedesaan/daerah dalam wadah koperasi atau usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, OVOP adalah salah-satu upaya membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat yang bertujuan mempercepat tekad pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengatasi pengangguran. Gerakan OVOP di Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;2):

- a) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- b) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP).
- c) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product-OVOP*) di Sentra

- d) Keputusan Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPRRI tahun 2008 agar program OVOP dapat dikembangkan di Provinsi lain.
- e) Telah diamanatkan dalam Program Kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tidak semua produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat menjadi produk OVOP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan produk IKM yang dipilih untuk dikembangkan dengan pendekatan OVOP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah.
- b) Unik khas budaya dan kearifan lokal
- c) Bermutu dan berpenampilan baik
- d) Berpotensi pasar domestik dan ekspor
- e) Diproduksi secara kontinyu dan konsisten

2. Tujuan dan Sasaran OVOP

Keberhasilan dari pendekatan OVOP menurut Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK yaitu didukung dari adanya kesadaran pentingnya para pelaku usaha atau petani di daerah dan pedesaan dapat secara sukarela mengerahkan konsentrasinya terhadap suatu komoditas atau produk yang paling sesuai untuk dirinya, lingkungannya dan desa setempat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;18). Kesadaran akan semangat dan potensi yang

dimiliki akan mencapai tujuan dan sasaran adanya pendekatan OVOP dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal di desa atau daerah.

Adapun tujuan utama pendekatan OVOP yaitu untuk peningkatan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan sasaran dari adanya OVOP adalah sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;9):

- a) Pertumbuhan Koperasi dan UKM yang mandiri di daerah;
- b) Penguatan koperasi dan UKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan nasional;
- c) Peningkatan kemampuan pemasaran dan daya saing produk Koperasi dan UKM sesuai standar internasional;
- d) Penciptaan peran koperasi dan UKM dalam penciptaan lapangan kerja
- e) Peningkatan perolehan nilai tambah produk unggulan untuk meningkatkan pendapatan
- f) Peningkatan Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ke Seluruh wilayah Indonesia.

3. Prinsip *One Village One Product*

Pada dasar *One Village One Product* (OVOP) adalah dimana masyarakat desa/daerah mampu mencari dan menggali komoditas/produk yang bisa menjadi unggulan secara berkesinambungan. Disemua daerah yang melaksanakan OVOP harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah dicanangkan oleh Deputi Bidang

Pengkajian Sumberdaya UKMK yaitu sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;19-20):

a. Lokal Tapi Global

Pengembangan OVOP ditujukan untuk mengembangkan dan memasarkan satu produk unggulan yang dapat menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Tujuan gerakan ini bukan sekedar menampilkan kemampuan membuat cinderamata untuk para wisatawan yang datang. Namun mampu membuat inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan produk lokal yang khas dan layak pasar. Sisi pemasaran pun tidak sekedar tergantung dalam memenuhi permintaan pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar luar negeri.

Pengembangan OVOP bertujuan agar dapat mengembangkan dan memberikan perluasan pasar bagi para pelaku usaha/petani, sehingga mampu meraih reputasi bisnis internasional. Gerakan OVOP pada intinya ditujukan agar masyarakat pelaku usaha/para petani dapat menggunakan sumberdaya lokal untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah (*added value*). Dengan demikian prinsip pertama yang menjadi landasan gerakan OVOP adalah merevitalisasi setiap masyarakat setempat dengan mengerahkan sumberdaya lokalnya untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan sekaligus tetap melakukan konservasi lingkungan.

b. Kemandirian dan Kreativitas

Unsur kemandirian dan kreativitas sangat penting di dalam menjalankan usaha (bisnis). Melalui OVOP dapat diciptakan kemandirian dan kreativitas

yang sesuai dengan bidang/sektor masing-masing. Kehadirannya harus bisa datang dari warga setempat. Masyarakat di masing-masing desa/daerah diberi kewenangan memilih komoditas/produk yang akan mereka kembangkan.

Potensi-potensi alam yang terdapat disetiap pedesaan/daerah patut menjadi perhatian. Kearifan masyarakat setempat akan mampu mengikat kebersamaan diantara para pelaku gerakan OVOP. Keberhasilan gerakan OVOP di suatu desa/daerah diisyaratkan agar memilih tokoh-tokoh masyarakat (orang-orang yang disegani) yang menjadi panutan setempat. Panutan bermanfaat bagi penentuan awal menetapkan jenis usaha (bisnis) yang akan dijalankan secara bersama-sama di dalam wadah koperasi. Mengacu pada prioritas potensi, dengan menampilkan ciri khas/keunikan desa/daerah setempat dan dapat dijadikan andalan bisnis masyarakatnya.

Gerakan OVOP dapat dijadikan landasan kampanye dalam memfasilitasi pembangunan regional melalui kesadaran potensi lokal. Semangat kemandirian harus didorong secara optimal agar masyarakat petani memahami arti kemandirian yang sesungguhnya tanpa bersandar pada subsidi pemerintah. Pemerintah biasanya membantu dalam penyediaan bantuan teknis dan dukungan untuk promosi pemasaran, meliputi festival produk, pendirian perusahaan untuk mempromosikan produk OVOP, lembaga riset pemasaran di Kota dan memberikan penghargaan kepada orang dan kelompok yang berprestasi dalam gerakan OVOP.

c. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sebagai komponen terpenting dalam mengkampanyekan OVOP. Seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat pelaku usaha/petani harus menghasilkan nuansa khas dan unik di desa/daerahnya. Mereka harus terpacu mendorong sumberdaya manusia disekitarnya agar mampu berinovasi dan berkreasi. Berani menghadapi tantangan-tantangan baru disektor industri, pertanian, pariwisata, pemasaran dan sektor-sektor lainnya. Langkah-langkah pengembangan SDM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Daerah/desa pertanian harus didukung oleh para petani handal yang terletak pada kesadaran generasi muda setempat. Oleh karena itu OVOP harus mampu melibatkan alih di bidang pertanian. Peningkatan kualitas SDM juga harus ditata secara moderen dan komprehensif.

4. Peran Pemerintah dalam *One Village One Product*

Pengembangan OVOP yang lebih dipusatkan untuk daerah pedesaan menjadikan pemerintah daerah memiliki peranan dalam berbagai hal. Kementerian Koperasi dan UKM menjabarkan bahwa peran pemerintah sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;25):

- a. Fasilitasi
Mempersiapkan “lapangan pertandingan” yang baik buat pelaku ekonomi lokal untuk persaingan sehat di pasar dan memperliharaan keadaan persaingan sehat antara pelaku ekonomi lokal yaitu:
 - 1) Membebaskan dari berbagai hambatan bisnis
 - 2) Menghapuskan pelaku fasilitasi khusus untuk pelaku tertentu
 - 3) Memantau kondisi kesehatan persaingan di pasar
- b. Informasi

Mencari dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal dan memberikan informasi yang benar kepada semua pelaku ekonomi terkait:

- 1) Informasi mengenai pasar, mutu dan harga
 - 2) Informasi mengenai input pertanian, alat-alat teknik/teknologi
 - 3) Informasi mengenai produk serupa di luar
- c. Mendorong semangat
- Memberikan insentif dan stimulan yang tepat kepada pelaku ekonomi lokal agar mereka lebih mandiri, yaitu:
- 1) Membangkitkan berbagai macam pemimpin lokal dari komunitas lokal
 - 2) Memanfaatkan “outsiders” (termasuk orang lokal yang kembali ke komunitas lokal dari luar)
 - 3) Menciptakan dan memelihara suasana yang selalu memunculkan ide-ide baru dan kreatif di komunitas lokal
 - 4) Meningkatkan SDM untuk membangkitkan pelaku ekonomi lokal yang selalu berpikir secara mandiri

Didalam koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan Dinas Koperasi terkait bertanggung jawab terhadap pengembangan OVOP (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;25). Terlihat bahwa Dinas koperasi memiliki peran yang penting. Koperasi berperan penting dalam memperkuat posisi atau keberadaan kelompok masyarakat sehingga mendapatkan kepastian hukum dan dapat meningkatkan produksi dan juga dapat berfungsi sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;52):

- a) Untuk memediasi akses pembiayaan
- b) Untuk memediasi akses produksi
- c) Untuk memediasi akses pemasaran
- d) Untuk memenuhi persyaratan pengucuran program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian harus memiliki relevansi dengan masalah yang dihadapi sehingga mendapatkan sebuah karya ilmiah yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan kualitatif ini bertolak pada pemahaman fenomena atau gejala sosial yang berhubungan sangat dekat dengan objek penelitian, dimana peneliti berusaha untuk memahami dan menafsirkan fenomene tersebut dari segi makna. Artinya data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah data yang mendalam dan mengandung makna dari suatu nilai dibalik data yang tampak pasti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013;13).

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka peneliti memilih jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Menurut Gabrielian dalam Annahar (2013;48) bahwa penelitian eksploratif berfungsi untuk menyelidiki fenomena yang kurang dimengerti, untuk mengidentifikasi atau menemukan hal-hal penting, dan menghasilkan penelitian untuk masa depan. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ekploratif dengan pendekatan kualitatif karena berupaya untuk menggali dan menganalisis bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui

one village one product (OVOP) di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, kemudian penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisa apakah pengembangan ekonomi lokal yang tujuan utamanya untuk meningkatkan pembagunan dan perekonomian masyarakat lokal dapat terwujud.

B. Fokus Penelitian

Membatasi suatu penelitian dan menentukan identifikasi masalah yang diperlukan agar peneliti dapat mempertajam bahasan dalam mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa maka diperlukan fokus penelitian. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2013;38) bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi dilapangan. Sehingga diperlukan hal-hal untuk menentukan fokus penelitian, seperti yang diungkapkan Spradley dalam Sugiyono (2013;38) ada empat alternatif dalam menentukan fokus penelitian yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menentukan fokus berdasarkan domain-domain tertentu (*organizing domain*)
3. Menentukan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Maka dari itu agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus ini didasarkan atas teori pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development*) yang dijadikan sebagai landasan utama dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga fokus penelitian ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dilapangan sebagai berikut:

1. Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

a) Kelembagaan dan aktor/*stakeholder* yang terlibat

- 1) Pemerintah Daerah
- 2) Pelaku Usaha Lokal
- 3) Masyarakat Lokal
- 4) Koperasi
- 5) Lembaga Keuangan di Daerah,
- 6) Perguruan Tinggi,

b) Aspek-aspek dalam pengembangan UMKM

- 1) Aspek Manajemen
- 2) Aspek Produksi
- 3) Aspek Pemasaran
- 4) Aspek Keuangan

2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

a) Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran para pelaku usaha dan petani salak suwaru akan potensi yang dimiliki
- 2) Inovasi dan kreativitas masyarakat lokal
- 3) Kejelasan kepengurusan manajemen UD. Intan

b) Faktor Penghambat

- 1) Belum terbentuknya kelembagaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfokus pada pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP dan hasil-hasil produksinya
- 2) Belum mempunya UD. Intan memasarkan secara luas hasil produksinya dengan merek dagang sendiri yaitu Osari
- 3) Tidak berfokusnya Koperasi Kuba Salaka di Desa Suwaru pada pertanian salak.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Situs dalam penelitian ini adalah di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Peneliti mengambil lokasi dan situ tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Suwaru merupakan desa dengan karakteristik masyarakat dan lingkungannya yang tetap menjaga dan membudiyakan salak suwaru, dimana salak suwaru merupakan salah satu potensi daerah Kecamatan Pagelaran atau komoditas khas yang dimiliki oleh Kabupaten Malang.

2. Usaha masyarakat lokal yang memanfaatkan potensi salak suwaru masih belum banyak, terlihat di Desa Suwaru sendiri hanya ada 1 usaha lokal.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan instansi pemerintah Kabupaten Malang yang berwenang menangani berbagai upaya pemberdayaan UMKM.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif jenis dan sumber data cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan (Arikunto, 2002;85) bahwa sumber data dan jenis data dalam penelitian terbagi sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) (Arikunto, 2002;85). Data pirmer dalam penelitian yaitu berasal dari:
 - a) Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.
 - b) Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

- c) Kepala Bidang Perijinan Makanan dan Minuman pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang
 - d) Ketua PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagelaran
 - e) Seketaris Desa Suwaru.
 - f) Pemilik usaha olahan buah salak suwaru UD. Intan.
 - g) Manajer pemasaran UD. Intan.
 - h) Manajer produksi UD. Intan
 - i) Pegawai UD. Intan
 - j) Pedagang buah salak di Desa Suwaru
 - k) Petani salak di Desa Suwaru
 - l) Anggota koperasi Kuba Salaka Desa Suwaru
 - m) Pegawai PG. Krebbe
2. Data Sekunder, adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian. Data sekunder meliputi: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan dan laporan resmi, selain itu data sekunder berasal dari informasi melalui jenis data lain seperti rekaman media masa, artikel-artikel, jurnal atau sumber lain (Arikunto, 2002;85). Data sekunder yang peneliti peroleh berupa dokumen yaitu sebagai berikut:
- a) Rencana Pembangunan Jangkah Mengenal Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015
 - b) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
 - c) Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2014
 - d) Kecamatan Pagelaran Dalam Angka Tahun 2014

e) Selayang Pandang Desa Suwaru Tahun 2013

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data-data yang diperoleh peneliti diperlukan teknik atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategi utama peneliti untuk mendapatkan data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan mewawancarai nara sumber yang dapat memberikan informasi secara akurat dan relevan dalam mengumpulkan data. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pemahaman peneliti dalam melihat keseluruhan situasi dilapangan. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2013;55) dalam penelitian kualitatif yang diobservasikan dinamakan situasi sosial terdiri dari tiga komponen yaitu: *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Dengan demikian obyek yang menjadi observasi peneliti secara langsung adalah peran SKPD Kabupaten Malang dalam mengembangkan usaha lokal melalui OVOP yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar. Selain itu observasi juga dilakukan pada pemerintahan Desa Suwaru, Pengusaha olahan buah salak UD. Intan dan petani salak serta pedagang buah salak di Desa Suwaru. Hasil-hasil observasi dapat dilihat pada hal 88, 91, 93, 104, 120, 122, 126, 130, 132, 134

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada nara sumber melalui tanya jawab. Seperti yang diungkapkan Esterberg dalam Sugiyono (2013;58) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur agar peneliti mendapatkan informasi yang pasti. Selain itu wawancara yang dilakukan juga menggunakan semiterstruktur untuk mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka maka peneliti dapat mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan nara sumber diluar pedoman wawancara. Sehingga dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para informan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, Kantor Desa Suwaru, Pemilik dan Karyawan Usaha Oalahan Buah Salak UD. Intan Suwaru, dan Petani serta Masyarakat Desa Suwaru.

3. Dokumentasi

Untuk mengambil data dan mencatat fenomena dilapangan perlu adanya dokumentasi. Dokumentasi dapat mendukung hasil penelitian dari observasi maupun wawancara. Menurut Sugiyono (2013;60) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi kegiatan berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang, dan Pelaku usaha lokal UD. Intan serta Petani dan Pedangan Salak di Desa Suwaru. Dokumentasi tersebut berupa data-data dan gambar-gambar yang terdapat pada bab IV hasil pembahasan hal 69, 70, 71, 73, 74, 75

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007;4) bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Sangat tidak mungkin bila tidak memasukkan peneliti sebagai instrumen penelitian, sebab peneliti tidak dapat menyesuaikan diri dengan fakta-fakta di lapangan. Dimana peneliti menggunakan panca inderanya untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, sedangkan instrument penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan diajukan peneliti kepada nara sumber untuk mempermudah memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan fokus penelitian dalam mengajukan pertanyaan.
2. Catatan lapang (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.
3. Perangkat penunjang dilapangan, merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan observasi dilapangan dan melakukan wawancara kepada nara sumber seperti buku, bolpoin untuk

mencatat hasil wawancara, kamera dan alat perekam (*tape recoder*) untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan pengamatan keadaan dilapangan.

4. Dokumen dan Arsip-arsip, berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang dimaksud berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang ada.

G. Analisis data

Analisis data merupakan cara berfikir peneliti untuk memproses data yang akan diperoleh dan akan diolah dari sebelum melakukan pengamatan dan setelah pengamatan di lapangan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013;80) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan ditemukan dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap data-data yang akan diteliti kemudian mengumpulkan penunjang data-data dan informasi dan berfikir tentang hal yang menarik yang dapat dikembangkan dari penelitian ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan di lapangan. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian eksploratif, penelitian ini memiliki empat karakteristik menurut Malhotra dalam Annahar (2013;48) yaitu:

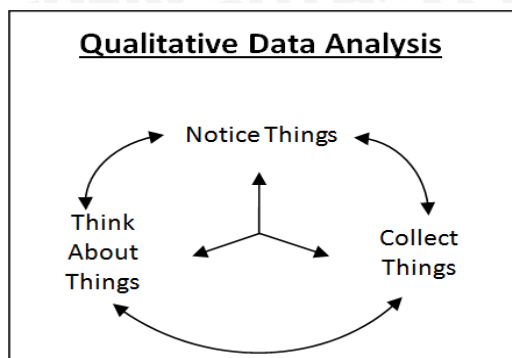
1. Informasi yang diperoleh didefinisikan secara bebas
2. Proses penelitian dilakukan secara fleksible dan tidak terstruktur karena protokol, prosedur penelitian formal serta teori-teori belum ada,

3. Peneliti selalu mewaspadaai munculnya ide-ide baru serta wawasan baru selama proses penelitian berlangsung. Ketika muncul ide atau gagasan baru, peneliti mengarahkan penelitian ke dalam ide atau gagasan baru tersebut hingga kemungkinan yang ada tereksplorasi hingga ditemukan ide atau gagasan baru lain,
4. Kreatifitas dan kecerdikan peneliti diperlukan dalam penelitian eksploratif.

Disimpulkan bahwa penelitian eksploratif berawal dari sebuah pemikiran tentang suatu fenomena yang dimulai dari memperhatikan hal-hal yang ada dan baru dalam data sehingga perlu adanya pengumpulan data dan pemikiran tentang hal-hal yang baru terhadap data yang ada. Maka model analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian eksploratif adalah model analisis data Siedel. Proses analisis data kualitatif menurut Siedel dalam Annahar (2013;49) tidak bersifat liner dimana peneliti tidak hanya memperhatikan, mengumpulkan dan kemudian memikirkan tentang fenomena, dan kemudian menulis laporan, melainkan proses peneilitian mempunyai karakter sebagai berikut:

1. Berulang-ulang dan progresif, ketika peneliti berfikir tentang suatu hal, peneliti juga mulai melihat hal-hal baru dalam data, kemudian mengumpulkan dan berfikir tentang hal-hal baru yang lain. Pada prinsipnya proses tersebut bersifat spiral terbatas.
2. Rekursif, merupakan salah satu bagian dapat menghubungkan kembali ke bagian sebelumnya. Pada saat peneliti sedang sibuk mengumpulkan data, secara bersamaan mungkin mulai melihat hal-hal baru untuk dikumpulkan.
3. Holografik, yaitu setiap langkah dalam proses penelitian mengandung seluruh proses. Ketika peneliti pertama kali mengetahui hal-hal yang sudah dikumpulkan dan berfikir tentang hal-hal tersebut.

Model analisis data Siedel dalam Annahar (2013;49) terdiri dari tiga hadapan yaitu terdiri dari *Noticing Things*, *Collecting Things*, dan *Thinking ababout Things*, yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4. Model analisis data Siedel

Sumber: Annahar (2013;49)

1. *Noticing Things (and Coding Them)*

Noticing berarti melakukan pengamatan, menulis catatan lapangan, merekam wawancara, pengumpulan dokumen dan sebagainya. Ketika peneliti melakukan ini, akan dibuat catatan hal-hal yang didapat dan diperhatikan selama proses wawancara dan observasi. Setelah didapatkan hasil rekaman dan catatan wawancara, perhatian akan dipusatkan pada catatan tersebut, dan memperhatikan hal-hal menarik dalam catatan. Hal-hal dalam catatan akan disebut dengan kode A, B, C dll, tetapi kemungkinan besar akan dikembangkan skema penamaan yang lebih deskriptif dan lebih berkembang. *Coding things*, *coding* data adalah proses sederhana yang sudah diketahui oleh banyak orang. Misalnya ketika membaca buku atau catatan hasil wawancara, dilakukan pemberian garis bawah, tanda atau membuat catatan pinggir. Dalam hal ini *coding* akan diperlukan sebagai alat penyelidikan, atau alat untuk memfasilitasi penemuan dan penyelidikan lebih lanjut dari data.

2. *Collecting Things (Collecting and Sorting Instances of Things)*

Dalam proses ini yang dimaksud dengan pengumpulan bukan pengumpulan data dari lapangan namun pengelompokkan data yang sudah didapatkan. Dari masing-masing kode yang telah dilakukan sebelumnya data dikelompokkan ke dalam karakteristik yang seragam untuk kemudian disusun menjadi sebuah gambaran yang utuh. *Sorting* adalah proses dimana akan dilakukan proses penyaringan data, mencari jenis, kelas, urutan, proses, pola atau keutuhan. Tujuan dari proses ini adalah untuk merakit atau merekonstruksi data dengan cara yang bermakna atau mudah dipahami.

3. *Thinking about Things*

Dalam proses *thinking*, akan diperiksa data yang dikumpulkan. Tujuan proses ini adalah: (1) untuk membuat beberapa jenis pengertian dari setiap koleksi data, (2) mencari pola dan hubungan di dalam koleksi data, dan (3) untuk membuat penemuan umum tentang fenomena yang diteliti.

Analisis data kualitatif model Seidel ini, memungkinkan langkah-langkah yang fleksibel seperti ilustrasi gambar diatas karena itu peneliti memilih model analisis ini. Penelitian ini memudahkan peneliti melakukan proses pengamatan terhadap keadaan dilapangan dan sumber-sumber yang ada, pengkelompokan dan pemilihan data serta memikirkan atau memaknai data, melihat pola-pola hubungannya, dan menemukan fenomena yang terjadi didalam penelitian. Masing-masing tahap dapat dilakukan dengan berurutan atau tidak berurutan karena model ini sejalan dengan jenis penelitian *exploratory* yang juga bersifat fleksibel dalam tahapan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Malang

a) Sejarah Kabupaten Malang

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awalnya abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya dipimpin oleh Bupati. Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16.

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa prasasti yang ditulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari jum'at legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisar jatuh pada tanggal 28 November 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerjaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu (www.malangkab.go.id).

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti *Satata Gama Karta Raharja* (Menata Semua Untuk Kesejahteraan) (RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015).

b) Visi dan Misi Kabupaten Malang

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk tahun periode 2010-2015, dicanangkan Visi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera, maka

penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;64-65):

- 1) **Mandiri**, yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas.
- 2) **Agamis**, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
- 3) **Demokratis**, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

- 4) **Produktif**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
- 5) **Maju**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- 6) **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 7) **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- 8) **Berdaya Saing**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut maka dibutuhkan misi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;65-66) :

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
- 2) Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
- 3) Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
- 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

c) Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km² atau 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Malang terdiri dari (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 10):

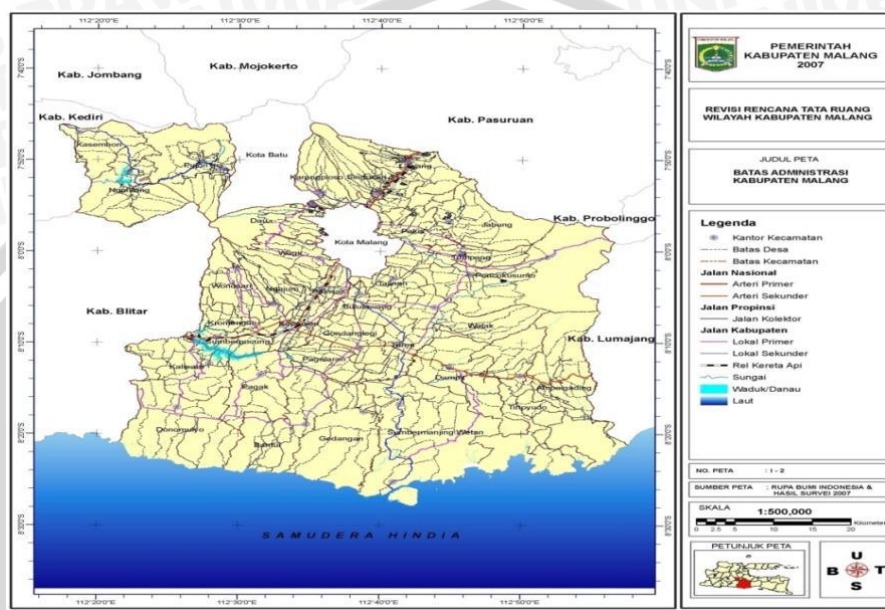
Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu.



Gambar 5. Peta Kabupaten Malang Tahun 2014

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang, 2014

Secara administratif wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.217 Rukun Warga (RW) dan 14.718 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000m dari permukaan laut. Wilayah datar Kabupaten Malang sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Sedangkan wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian

besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;11).

Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

d) Kependudukan dan Sosial Ekonomi Kabupaten Malang

Jumlah penduduk Kabupaten Malang secara keseluruhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Malang Dalam Angka 2014 jumlah penduduk Kabupaten Malang ditahun 2013 berjumlah 2.473.612 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.240.269 jiwa dan 1.233.343 jiwa dari keseluruhan 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

Tabel 4. Data Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun (Jiwa)			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	2.425.311	2.447.051	2.459.982	2.473.612
• Laki-Laki	1.217.377	1.232.841	1.234.173	1.240.269
• Perempuan	1.207.934	1.214.210	1.225.809	1.233.343
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	100,78	101,53	100,68	100,56
Rumah Tangga	700.162	674.020	663.495	669.652

Sumber: Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kabupaten Malang meningkat. Sehingga pada tahun 2013 kepadatan penduduk Kabupaten Malang mencapai 880 jiwa/km². Secara keseluruhan penyebaran penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,1313.

Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk Kabupaten Malang didominasi sektor pertanian. Secara rinci mata pencaharian penduduk Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2013

Uraian Mata Pencarian	Satuan (Jiwa)
Pertanian	524.372
Pertambangan	4.950
Industri Pengolahan	209.633
Listrik, Gas Dan Air	1.487
Konstruksi	88.050
Perdagangan	307.930
Angkutan & Kom	60.786
Jasa	95.376
Lainnya	148.178

Sumber: Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka, 2014

Dilihat dari tabel 5. dimana presentase mata pencarian penduduk Kabupaten Malang tidak terlepas dari potensi unggulan yang dimiliki yaitu pertanian. Pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Berdasarkan data pertanian pada dokumen RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 tanaman unggulan pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang

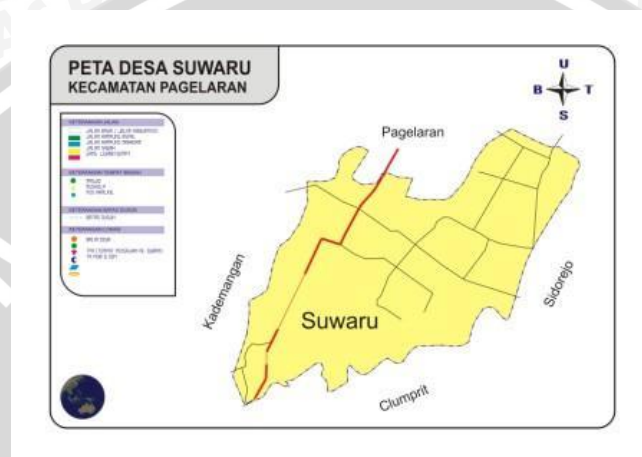
potensi adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Dengan terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya lokal maka potensi yang dimiliki Kabupaten Malang dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

2. Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

a) Gambaran Umum

Desa Suwaru merupakan salah satu Desa diantara 10 (sepuluh) Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Secara geografis terletak disebelah tenggara Kota Malang dengan jarak ± 40 Km. Luas wilayah Desa 265 Km² dengan kondisi wilayah berupa dataran yang berada pada ketinggian 300-460 m dari permukaan laut, sedangkan curah hujan rata-rata 33,33 mm setiap tahun. Secara administrasi Desa Suwaru terdiri dari 2 Dusun, yaitu (1) Dusun Krajan terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT) (2) Dusun Recobanteng terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 2 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan Batas wilayah Desa Suwaru secara administrasi sebagai berikut (Selanyang Pandang Desa Suwaru Tahun 2013;1):

Sebelah Utara : Desa Pagelaran
 Sebelah Timur : Desa Sidorejo, Desa Clumprit
 Sebelah Selatan : Desa Wonokerto Kecamatan Bantur
 Sebelah Barat : Desa Kademangan



Gambar 6. Peta Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Tahun 2013
 Sumber: Dokumen Selayang Pandang Desa Suwaru, 2013;15

b) Visi dan Misi Desa Suwaru

Dengan mengacu program-program pembangunan yang berada di Pemerintah Kabupaten Malang, maka visi dan misi Desa Suwaru sebagai berikut (Selayang Pandang Desa Suwaru Tahun 2013;2-3):

Visi Desa Suwaru

“Terwujudnya Masyarakat Desa Suwaru yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera Mandiri melalui Pelayanan yang Berkualitas”

Misi Desa Suwaru

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan aparatur pemerintah desa dan masyarakat, kesadaran dan ketaatan pada hukum serta kesedaran terhadap arti pentingnya pendidikan

- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya Perangkat Desa dan Peningkatan kedisiplinan sebagai upaya terciptanya Perangkat Desa yang bersih dan berwibawa
- 3) Mendorong terselenggaranya manajemen Pemerintah Desa yang baik guna terbentuknya pelayanan prima dan peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada kepuasan publik
- 4) Membangkitkan semangat warga agar lebih proaktif dalam mengelola potensi yang dimiliki
- 5) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, mendukung dan memfasilitasi pembangunan yang merata
- 6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana umum sehingga dapat berdaya guna dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan Pemerintah, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial
- 8) Meningkatkan partisipasi dan kemampuan Lembaga Masyarakat

c) Kondisi Kependudukan dan Sosial Ekonomi Desa Suwaru

Luas wilayah Desa Suwaru mencapai 265 Km² dengan jumlah penduduk berjumlah 1.987 jiwa yang terdiri dari:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Suwaru

	Jumlah (Jiwa)
Laki-Laki	1.005
Perempuan	982
Jumlah KK	565

Sumber: Dokumen Selayang Pandang Desa Suwaru, 2013;1

Sumber pendapatan utama Desa Suwaru berasal dari pertanian. Luas lahan pertanian di Desa Suwaru adalah 105 Hektar terdiri dari Pertanian Sawah 70 Ha dan Pertanian Tegalan 35 Ha. Komoditi/Produk unggulan yang dihasilkan di Desa Suwaru adalah salak. Jumlah penduduk yang berkerja sesuai dengan mata pencaharian di Desa Suwaru terdiri sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Suwaru yang Bekerja

Mata Pencaharian	Jumlah Pekerja (Jiwa)
Perkebunan	17
Pertenakan	119
Perdagangan	61
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	50
TNI/Polri	11
Buruh Prabik/Industri	175
Buruh Tani	179
Buruh Bangunan	57
Jasa	21
Lainnya	358
Jumlah	1.048

Sumber: Dokumen Kecamatan Pagelaran Dalam Angka, 2014

Desa Suwaru sebagian besar atau didominasi masyarakat/penduduk yang beragama Kristen yang berjumlah 1.288 jiwa.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengembangan UMKM berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

Secara geografis Kabupaten Malang terletak di wilayah daratan tinggi yang memiliki lahan pertanian subur dengan hasilnya relatif melimpah dan beraneka macam sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan tersebut memerlukan strategi berbasis sumber daya daerah agar dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dari sumber daya Kabupaten Malang. Hampir semua wilayah di Kabupaten Malang memiliki keunggulan sumber daya alamnya, akan tetapi tidak semuanya usaha yang ada dapat berkembang dan menjadi besar. Melalui gerakan 1 (satu) desa atau kelurahan dan 1 (satu) kecamatan masing-masing mengembangkan 1 (satu) produk unggulan atau lebih dikenal dengan *one village one product* (OVOP). Adanya OVOP ini menciptakan usaha kecil di desa yang meratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Desa Suwaru merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang menghasilkan komoditas pertanian yang khas dari Kabupaten Malang yaitu Salak Suwaru. Peneliti memilih di Desa Suwaru, karena disana terdapat usaha masyarakat yang sudah berkembang lama dalam mengelolah salak suwaru yang memiliki ciri khas ras tersendiri dibandingkan salak-salak lainnya. Dengan melakukan penelitian terhadap potensi sumber daya lokal di Desa Suwaru, dimaksudkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang

dalam merencanakan pengembangan usaha masyarakat yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal agar dapat menjadi unggulan produk desa atau OVOP.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Desa Suwaru sudah cukup tepat sebagai desa yang perlu dikembangkan dan diperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis sumber daya lokal. Sehingga terwujudnya OVOP. Desa Suwaru sudah sejak lama menjadi daerah penghasil salak suwaru dan memiliki tanah yang subur. Hal ini didukung oleh pemaparan dari SS (Laki-Laki, 80 Tahun), selaku pemilik usaha lokal olahan buah salak suwaru UD. Intan mengatakan bahwa:

“Tahun 1987an, Desa Suwaru termasuk desa yang menghasilkan buah unggulan di Kabupaten Malang bahkan menjadi salak suwaru yang dihasilkan menjadi buah unggulan di Provinsi Jawa Timur juga, sampai-sampai setiap kali musim panen kita tidak bisa menerima salak dari daerah lain untuk dijual disini baik lapak dipinggir jalan maupun lapak-lapak di Pasar Suwaru” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan buah salak UD. Intan Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa salak suwaru memang menjadi salah satu buah unggulan di Kabupaten Malang. Sebagai perwakilan dari pemerintahan Desa Suwaru, pernyataan dari RL (Laki-Laki, 58 Tahun), selaku Sekretaris Desa Suwaru menunjukkan bahwa Desa Suwaru memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian salak, yang menyatakan bahwa:

“Sekitar tahun 1980an, hampir 80% lahan yang ada di Desa Suwaru ini adalah lahan pertanian. Ya, hampir semua kepala keluarga mempunyai perkebunan salak. Sehingga penghasilan utama masyarakat disini ya petani salak. Kalau sudah musim panen salak, pasar Suwaru ramai dengan tengkulak-tengkulak yang akan membeli salak suwaru bahkan sampai dari luar malang” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Desa Suwaru).

Melihat kondisi perekonomian, persaingan global dan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, menuntut kreatifitas dan kemandirian suatu wilayah untuk mengembangkannya yang sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *One Village One Product* (OVOP) merupakan kebijakan pemerintah dengan mencanangkan pengembangan produk unggulan daerah agar dapat meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Sekitar awal tahun 2010an, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengembangkan OVOP disetiap desa. Jadi masyarakat desa harus mempunyai usaha dari memanfaatkan potensi sumber daya desanya untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. Ataupun juga usaha masyarakat yang sudah ada dikembangkan dan diperkuat menjadi unggulan desa tersebut. Walaupun di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 tidak menggunakan istilah OVOP melainkan gerakan “cinta dan bangga mengkonsumsi produk lokal”. Dimana setiap 1 desa atau 1 kecamatan mempunyai produk unggulan utama” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa OVOP merupakan usaha masyarakat desa dalam hal ini bisa dikatakan sebagai usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan agar menjadi unggulan. Hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan dari MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala

Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“OVOP adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat yang menjadi unggulan daerah ataupun salah satu desa. Dimana produksi OVOP itu tanpa henti, jadi bukan musiman. Setiap tahun ada pasti ada produksinya, ya setiap tahun tanpa henti memproduksi. Memang benar usulan potensi produk unggulan daerah (OVOP) Kabupaten Malang yang diterima oleh pemerintah pusat berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM No.13/Dep.7/III/2010, yaitu industri pembuatan kerajinan ketipung di Desa Sumber Pucung dan industri keripik buah. Tapi OVOP di Kabupaten Malang sendiri terdiri dari berbagai macam produk, jadi tidak satu produk yang menjadi produk unggulan OVOP. Itu hanya produk unggulan secara luas di Kabupaten Malang yang dipilih oleh pusat. Buah-buahan di Malang kan banyak macamnya” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP memiliki dasar regulasi yang jelas. Dasar regulasi yang digunakan adalah RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 dan Surat Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM No.13/Dep.7/III/2010. Hal ini menjadikan landasan bahwa sumber daya alam Kabupaten Malang terutama buah-buahan yang tumbuh subur melalui OVOP dapat meningkatkan kualitas produksi, perluasan pasar dan UMKM di Kabupaten Malang mampu berinovasi menciptakan berbagai produk.

Pelaksanaan pengembangan UMKM berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP ini harus mengikutsertakan seluruh jajaran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari berbagai tingkat kalangan. Pemangku kepentingan utama (*key stakeholder*) adalah pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan usahawan

(pelaku usaha dan perbankan). Sedangkan pemangku kepentingan lainnya adalah perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya.

a) Kelembagaan dan aktor/*stakeholder* yang terlibat

Pelaksanaan dalam pengembangan ekonomi lokal yang menjadi kunci fokus adalah siapa saja aktor/*stakeholder* dan lembaga yang mempengaruhi suatu kebijakan ataupun terkena dampak dari kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Kalau terkait OVOP, banyak aktor/*stakeholder* yang terlibat dalam melaksanakannya. Tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena OVOP di Kabupaten Malang itu tidak menjadi satu program khusus hanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang harus dilakukan dan dikembangkan. Jadi semua SKPD di Kabupaten Malang bisa terlibat dalam mengembangkan OVOP di masing-masing desa dengan melihat potensi desa tersebut apa yang bagus dan layak dikembangkan dan dikuatkan lebih besar lagi” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Banyaknya aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Kabupaten Malang juga disampaikan oleh IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengembangan OVOP ini, banyak SKPD yang terlibat. Dikarenakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar produk itu layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Menjadikan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat agar menjadi produk unggulan itu tidak gampang. Mulai cara pengolahannya, pengemasan, pemasaran, perijinan seperti BPOM, ijin usaha, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, modal juga harus diperhatikan dalam mengembangkan suatu produk agar menjadi unggulan desa/daerah agar produksinya tetap terjaga dan kualitasnya memenuhi syarat dipasarkan diluar

daerah bahkan luar negeri” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Keterlibatan aktor dari segala bidang untuk memenuhi peran dan kapasitas para aktor dalam mengembangkan produk yang dihasilkan UMKM melalui OVOP, SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha olahan buah salak suwaru UD. Intan mengatakan bahwa:

“Pada tahun 1992an itu, booming produksi salak sehingga harganya turun drastis. Lalu dibina oleh Dinas Pertanian, karena salak suwaru sebagai buah unggulan kok gak ada harganya akhirnya dicari jalan keluarnya untuk mencari nilai tambah dari buah salak. Akhirnya dikirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan olahan buah. Mula-mula dijadikan jenang/dodol salak sampainya di tahun 2006 kita (UD.Intan) bisa mengembangkan salak menjadi keripik salak. Pelatihan ini dilakukan setiap sebulan sekali didampingi juga dari Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan buah salak UD. Intan Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa banyak aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP yang ada di Desa Suwaru Kabupaten Malang. Semua kelembagaan dan aktor memiliki peran dan kontribusi tersendiri dalam mempengaruhi suatu kebijakan ataupun terkena dampak dari kebijakan. Aktor/*stakeholder* dan kelembagaan yang berperan didalamnya adalah Pemerintah, Masyarakat Lokal, Swasta serta Lembaga Riset. Aktor dari Pemerintah terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. Sedangkan dari aktor dari Masyarakat lokal terdiri dari Pemilik usaha olahan buah salak yaitu (UD.Intan), Petani salak sekitar Desa Suwaru, dan Pedangan salak suwaru. Sektor Swasta dalam hal ini berhubungan dengan lembaga keuangan swasta. Selanjutnya

terkait dengan lembaga riset, merupakan aktor yang berasal dari akademisi perguruan tinggi.

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal. Dibutuhkan koordinasi dan peran berbagai pihak untuk pelaksanaannya pada lingkup satuan kerja perangkat daerah. Pemerintah menunjuk dinas terkait untuk merencanakan serta mengembangkan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP ditingkat daerah Kabupaten/Kota koordinasi berada ditingkat Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan arahan Kementerian Koperasi, didalam pengembangan OVOP yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wadah koperasi dan UKM, hal ini yang menjadikan Dinas Koperasi berwewenang dalam mengembangkan OVOP di tingkat Kabupaten/Kota” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Kewenangan Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Malang dapat dilihat dari adanya sosialisasi OVOP kepada masyarakat disetiap adanya penyuluhan berbagai bidang yang ada. Penyuluhan OVOP ini juga melibatkan SKPD-SKPD lain di Kabupaten Malang. Hal tersebut disampaikan oleh MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Untuk sosialisai disesuaikan dengan program yang ada, seperti pada waktu penyuluhan bimbingan teknologi disisipkan materi tentang OVOP. Sehingga OVOP ini dikaitkan berbagai kegiatan yang dikembangkan melalui organisasi koperasi atau kelompok usaha masyarakat. Kalau dalam skala Kabupaten, kan banyak produk-produk unggulannya, jadi sosialisasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri dalam hal ini bisa bupati, sekda kepada dinas-dinas dan perwakilan pelaku usaha” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Pemberian sarana promosi juga dilakukan untuk mengembangkan usaha masyarakat desa dalam skala UMKM. Hal ini senada disampaikan oleh IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Untuk pengembangan produk-produk OVOP di Kabupaten Malang agar bisa mendapatkan pasarnya, disetiap ada pameran, Dinas Koperasi dan UMKM selalu memberikan informasi kepada Kecamatan atau Desa untuk mengirimkan perwakilannya mengikuti pameran. Setiap tahunnya Dinas Koperasi mempunyai beberapa pagelaran pameran UMKM di Kabupaten Malang terutama UMKM yang dimiliki oleh Kecamatan. Bisa dari ibu-ibu PKK atupun UMKM yang sudah berkembang disana” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Adanya peran pemerintah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada juga disampaikan oleh S (Laki-Laki, 55 Tahun) selaku Kepala Bidang Perijinan Makanan dan Minuman pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang menyatakan bahwa:

“Disperindag setiap tahunnya pasti mengadakan pameran produk-produk lokal yang dimiliki masyarakat. Ya, kurang lebih 7 kali pameran selama 2015. Bisa kerjasama dengan dinas-dinas lain ataupun acara disperindag sendiri. Ini dilakukan agar usaha masyarakat mendapatkan pasarnya di Kabupaten Malang” (Hasil wawancara tanggal 29 Juni 2015 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Peran pemerintah dalam hal pemasaran juga dirasakan oleh para pengusaha UMKM, hal ini disampaikan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku Manajer Pemasaran produksi UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Kalau soal pameran, kami (UD.Intan) pernah mengikuti pameran hasil produksi UMKM/Kelompok Usaha Bersama tingkat Kabupaten. Pada saat itu salah satunya yang dipilih oleh pihak kecamatan yaitu kami untuk mewakili produk unggulan yang ada di Kecamatan Pagelaran” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).



Gambar 7. Pameran Produk Unggulan Antar Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2012

Sumber: Data sekunder yang diperoleh penulis dari UD. Intan, 2015

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintah mendukung usaha yang dikembangkan oleh masyarakat dengan membuka pasar bagi UMKM di desa-desa agar dapat memperluas pemasarannya. Hal tersebut dikarenakan promosi seperti pameran sangat penting dalam menunjang pengembangan usaha yang ada. Dukungan ini merupakan bentuk kesadaran pemerintah terhadap usaha masyarakat dalam program pengembangan sumberdaya ekonomi lokal.

Untuk menunjung pemasaran produk yang dihasilkan, pemerintah juga memberikan fasilitas kemudahan perijinan ijin produksi makanan dan minuman yang dikembangkan oleh masyarakat. Ini dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat di ekspor ke luar negeri ataupun dipasarkan di daerah lain. Hal ini disampaikan oleh S (Laki-Laki, 55 Tahun) selaku Kepala Bidang Perijinan Makanan dan Minuman pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang menyatakan bahwa:

“Setiap pelaku usaha di Kabupaten Malang yang ingin memiliki ijin usaha produksinya pasti diperindag membantu dan memudahkan ijinnya asalkan syarat-syarat sudah sesuai. Kalau industri dalam skala UMKM kami, memberikan fasilitas/penyuluhan pentingnya setiap usaha rumahan/UMKM harus mempunyai sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga biasanya disebut SPP-IRT atau P-IRT dan juga biayanya gratis. Setiap industri rumahan atau UMKM harus mempunyai P-IRT ini agar pengolahan pangan/produksinya yang higienis, bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen dan yang terpenting adalah kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Walaupun bukan diperindag yang mengeluarkan P-IRTnya melainkan Dinas Kesehatan tetapi diperindag membantu dalam pengurusanannya” (Hasil wawancara tanggal 29 Juni 2015 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang).

Tidak hanya pemudahan dan fasilitas perijinan gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga memberikan prasana alat-alat produksi dan bimbingan tentang pemasaran, produksi dan keuangan. Hal ini disampaikan oleh IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Soal pembinaan dan bantuan modal kepada para pelaku UMKM, dinas hanya memberikan bila ada permintaan. Maka dari itu koperasi, para pelaku UMKM atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) bisa juga dari pihak desa yang mengajukan proposal permintaan pembinaan maupun permodalan. Jadi, masyarakat harus aktif mengajukan proposal bila ingin usahanya lebih berkembang. Dinas tidak bisa memberikan pelatihan bila disana tidak mempunyai dasarnya. Kemarin bahkan setiap tahunnya dinas memberitahukan kepada kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang memiliki usaha bersama atau UMKM yang belum berkembang atau belum mendapatkan pelatihan atupun bantuan bisa mengajukan proposal ke Dinas Koperasi. Untuk mempermudah UMKM yang sudah ada Dinas Koperasi juga membentuk Klinik UMKM yang berfungsi untuk membantu hambatan-hambatan yang ada di koperasi maupun UKM, bisa dibilang sebagai tempat konsultasi” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Peran pemerintah dalam membina dan melatih usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Malang juga disampaikan oleh SS (Laki-laki, 80 Tahun) pemilik UD. Intan menyatakan bahwa:

“Dari bimbingan dan binaan Dinas Pertanian, kami (UD. Intan) mendapatkan bantuan 1 unit mesin alat penggorengan dan juga modal untuk memproduksi. Ya sekitar tahun 2006 kami mendapatkannya. Pada pembinaan itu juga ada pembinaan dari Dinas Koperasi.” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan buah salak UD. Intan Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah peduli dengan usaha masyarakat. Pemerintah memfasilitasi dan memberikan informasi dalam mengembangkan usaha agar bisa produktif dan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Hal ini merupakan salah satu wujud dari tindakan pemerintah dalam pembangunan daerah dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang melibatkan masyarakat.

Peran pemerintah tidak hanya memfasilitasi sarana prasarana dan memberikan informasi berbagai hal mengembangkan usaha. Tetapi pemerintah juga mendorong semangat masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya lokal yang dimiliki. Ini dilakukan agar terciptanya produk baru atau meningkatkan nilai jual dari sumberdaya alam yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Kalau tidak ada dorongan dari dinas untuk mengolah buah salak, saya sendiri tidak berfikir untuk mengolahnya menjadi kripik atau dodol. Soalnya pada saat itu buah salak, khususnya salak suwaru sangat disukai oleh masyarakat dan laku keras dipasaran bahkan sampai luar malang. Namanya juga orang desa, yang penting mendapatkan uang banyak dan bagaimana membudidayakan lebih besar lagi” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Tidak hanya dinas-dinas terkait yang memiliki peran dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Desa Suwaru. Pemerintah Desa Suwaru juga memiliki peran dalam mengembangkan potensi yang ada, hal ini

disampaikan oleh RL (Laki-Laki, 58 Tahun), selaku Sekretaris Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Suwaru dari dulu selalu mengingatkan masyarakat yang masih memiliki kebun salak suwaru supaya tetap mempertahankannya atau membudidayakannya walaupun hanya beberapa puluh meter. Kalau tidak begitu salak suwaru akan hilang. Selain itu untuk mendorong UMKM yang sudah berkembang. Kemarin tanggal 21 April 2015 saat acara kunjungan bupati selain meresmikan Balai Desa Suwaru juga meresmikan koperasi milik mbak Tuti. Ini salah satu dukungan pemerintah kepada masyarakat yang mau mengerjakan potensi yang ada, ya bisa dikatakan apresiasi usaha mbak Tuti” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Desa Suwaru).



Gambar 8. Peresmian Show Room Produk Unggulan Pagelaran Desa Suwaru dan Peresmian Balai Desa Suwaru

Sumber: Data sekunder yang diperoleh penulis dari Kantor Desa Suwaru, 2015

Peran pemerintah daerah baik dari dinas maupun pemerintah Desa Suwaru yang telah mendukung usaha lokal juga disampaikan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku Manajer Pemasaran UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Salah-satu bentuk dorongan semangat dari pemerintah kepada UMKM yang ada di Pagelaran. Ya pas ada kunjungan Pak Rendra (Bupati Malang) di balai desa kemarin meresmikan “Griyo oleh-oleh” ini sebagai *show room* produk unggulan Pagelaran Desa Suwaru. Alasannya supaya usaha masyarakat di Pagelaran ini mendapatkan wadah/tempat untuk memasarkan produknya” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Gryo Oleh-oleh Desa Suwaru).



Gambar 9. Tempat Pemasaran Produk UD. Intan
Sumber: Data primer hasil observasi penulis, 2015

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa para aktor pemerintah baik dari dinas, kecamatan, desa semua sama-sama mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP. Mengembangkan produk unggulan lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal bila dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kearifan lokal daerah setempat. Ini terlihat dari pemerintah tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat Desa Suwaru yang aslinya adalah petani salak.

2) Pelaku Usaha Lokal

Aktor yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal di tingkat lapangan adalah pemilik usaha lokal. Pemilik usaha lokal merupakan pelaku yang melaksanakan atau mengembangkan ekonomi lokal dalam rintisan usaha lokal yang dikembangkan melalui UMKM. Perlu adanya pelaku usaha lokal agar pelaksanaan rencana pemerintah dalam pengembangan usaha lokal melalui OVOP dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu membantu masyarakat yang berusaha mandiri dalam meningkatkan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari MI (Laki-Laki, 57 Tahun)

selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“OVOP ini dikembangkan oleh pemerintah dikarenakan melihat kekuatan UMKM di Indonesia ini sangat besar, tetapi kenyataanya pemasaran produk-produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk-produk luar. Makanya mereka (para pelaku usaha lokal) tidak mendapatkan pasarnya sendiri. Kalau mereka mendapatkan pasarnya kan dapat meningkatkan pendapatnya sehingga kesejahteraan hidupnya juga terjamin dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Adanya peran penting pelaku usaha lokal didalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP dapat menghasilkan produk unggulan dikenal atau dapat dipasarkan secara global disampaikan oleh IW (Perempuan 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dinas menekankan kepada pemerintah desa/kecamatan untuk menggunkan produk lokal dalam segala kegiatan yang ada, seperti acara jamuan makan dalam hal rapat, pertemuan, kegiatan-kegiatan kantor maupun kegiatan masyarakat lokal selalu menggunakan produk-produk masyarakat sekitar. Kalau seperti ini kan kripik salak UD. Intan dapat dikenal oleh masyarakat luar Desa Suwaru sendiri. Disini juga diperlukan strategi UD. Intan seperti kalau harga dengan pemerintah desa/kecamatan membeli produknya untuk kegiatan pemerintah dikasih diskon atau dikasih *free* kripik dengan membeli beberapa kripik. Kalau sudah seperti ini kan kedua pihak juga diuntungkan, rencana pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal dapat berjalan dan pemilik usaha dapat memasarkan produknya lebih luas” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP untuk memasarkan produknya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat luas. Peran pelaku usaha lokal yang harus selalu berinovasi kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat supaya produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh semua masyarakat. Tidak hanya dalam pemasaran saja, pelaku

usaha lokal juga harus memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar terhadap usaha yang dia kelola.

Adanya usaha pengolahan buah salak di Desa Suwaru memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar walaupun tidak banyak, tetapi hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada. Hal ini disampaikan oleh SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Soal mencari pekerja kami (UD. Intan) tidak kemana-mana, tetangga desa sendiri, orang Suwaru. Jumlah tenaga kerja disini total ada 10 orang, 6 orang anggota keluarga dan 2 orang dari Suwaru 2 orang dari Rejobanteng. Walaupun keempat orang tersebut harus dilatih dulu dalam bekerja. Terutama untuk pengoperasian mesin, sekali goreng kalau salah ya bisa rugi sekitar 100rb. Ada 3 orang yang mau belajar dan bisa mengoperasikan mesin penggorengan kripik. Yang terpenting dapat membantu orang-orang sekitar dalam mencari rejeki” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Adanya tempat usaha yang didirikan oleh masyarakat lokal bermanfaat bagi lingkungan sekitar tempat usaha tersebut disampaikan oleh Dw (Perempuan, 34 Tahun) selaku pegawai UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Alasan saya kerja disini (UD. Intan) ya karena tuntutan ekonomi, saya kan cumak lulusan SMP. Jadi kerja ya sulit, terus disini cari pegawai. Ya sudah saya kerja disini. Alhamdulillah sudah 3 tahun saya kerja. Awalnya ya kerjanya yang biasa mudah lha, seperti motong salak, bungkusin. Tapi lama-lama saya juga dilatih untuk mengoperasikan mesin penggorengan oleh mas Bambang, sekitar 1 bulan masih didampingi untuk mengoperasikan mesinnya soalnya urusan mesin-mesin gitu ada aturannya. Kalau salah kan entar gak jadi kripik” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Melibatkan masyarakat sekitar merupakan suatu wujud nyata peran pelaku usaha lokal untuk mengembangkan sumberdaya lokal. Tidak hanya itu dalam urusan ketersediaan bahan baku yang sangat dekat dengan usaha yang dijalankan sehingga dapat menciptakan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini disampaikan oleh

SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Kalau kebun sendiri tidak cukup, kami membelinya dari petani sekitar Suwaru. Sudah dari dulu, kami menggunakan salak suwaru untuk bahan bakunya, kalau menggunakan salak lainnya rasanya berbeda. Ya sudah kami memutuskan mencari dari petani-petani yang mempunyai kebun salak yang bermutu bagus dan dapat menyediakan bahan baku yang kami butuhkan” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015).



Gambar 10. Perkebunan Salak Milik UD. Intan
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penulis, 2015

3) Masyarakat Lokal

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal juga melibatkan peran serta masyarakat lokal untuk mendukung program atau kegiatan yang ada. Adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP yang menekankan satu desa satu produk unggulan merupakan tujuannya. Partisipasi masyarakat terlihat dari masih adanya warga Suwaru yang masih mempertahankan kebun salak dan menjual hasilnya didepan rumah mereka. Masyarakat lokal yang dimaksudkan adalah para petani salak dan pedagang salakdi sekitar Desa Suwaru.

Petani salak merupakan aktor yang berperan penting dalam kelangsungan tersedianya bahan baku salak Suwaru. Hal ini disampaikan oleh ES (Perempuan, 35 Tahun) selaku Manajer Produksi UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Untuk bahan baku salak mengambil dari para petani salak di Suwaru dan di Kademangan. Kebun salak kami juga tidak terlalu luas. Kami biasanya mengambil dari teman-teman bapak, sesama anggota koperasi SALAKA dan warga lain yang tidak masuk dalam koperasi. Kalau yang di Kademangan itu Bu Suryani, beliau mempunyai kebun salak yang lumayan besar dan kualitas salaknya juga sangat bagus” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Ketersedianya bahan baku untuk pengolahan usaha yang dilakukan UD. Intan dari para petani salak Desa Suwaru dipertegas oleh Sd (Laki-Laki, 55 Tahun) selaku petani salak di Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Memang benar, usaha milik pak Sugeng itu biasanya membeli salak dari saya. Tapi ya tidak banyak, tergantung salak yang saya punya. Kan tidak semua pohon salak itu berbuah bagus dan banyak. Jadi setiap ada salak yang matang saya pilih mana yang bagus mana yang tidak. Biar gampang itungannya saat dijual. Biasanya kalau ada yang sudah matang saya menghubungi mbak Yuni kalau membutuhkan salak ada disaya” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di rumah Bapak Sd).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para petani salak memiliki peran yang penting dalam produk-produk yang dihasilkan oleh UD. Intan. Buah salak yang dimiliki oleh para petani dapat membantu ketersedianya bahan baku olahan buah salak. Tidak hanya para petani salak yang masih mempertahankan kebun salaknya tetapi sebagian masyarakat juga masih mempertahankan kebun salaknya dan memperjual belikan hasilnya. Hal tersebut disampaikan oleh JW (Perempuan, 35 Tahun) selaku pedagang buah salak di Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Sudah dari dulu kalau Desa Suwaru terkenal dengan salaknya, makanya kebun salak yang dimiliki keluarga saya masih dipertahankan oleh ibu saya

walaupun tidak seluas dulu. Katanya Desa Suwaru itu identik atau khasnya ya salaknya, jadi masih dipertahankan sampai sekarang. Orang-orang sini yang rumahnya pinggir jalan seperti ini dan masih ada kebun salaknya pasti menjualnya dilapak-lapak depan rumah. Walaupun tidak tetap hasilnya dari jualan salak seperti ini tapi setidaknya bisa menambah pemasukan keuangan keluarga walaupun tidak banyak. Biasanya juga ada tengkulak-tengkulak yang membeli salak untuk dijual lagi di kota” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di rumah Ibu JW).



Gambar 11. Lapak Pedangan Buah Salak di Desa Suwaru
Sumber: Data primer hasil observasi penulis, 2015

Besarnya keinginan para petani salak dan pedagang salak di Desa Suwaru dalam mengembangkan sumberdaya lokal yang dimiliki terlihat dari adanya Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Intan. P4S didirikan atas inisiatif dari masyarakat lokal yang jeli melihat bahwa perlu adanya wadah untuk para petani belajar tentang pertanian salak. Tujuan P4S untuk kegiatan magang penyuluhan terhadap petani dan tempat belajar membudidayakan serta cara mengolah buah salak. Hal tersebut disampaikan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Intan yang menyatakan bahwa:

“Didirikanya P4S bermula dari keberhasilan produk-produk yang dihasilkan oleh UD. Intan diakui oleh berbagai pihak. Hingga beberapa kali banyak didatangi kegiatan magang dan para tamu yang datang untuk melihat proses pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen dan juga pemasaran hasil panen, selain itu juga pengolahan buah salak bagi petani sekitar ataupun masyarakat luar. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan dianggap sebagai kelembagaan swadaya masyarakat desa yang menangani pendidikan dan pelatihan bagi

petani, sekitar tahun 2008 kita dibantu dinas dan pihak terkait untuk mendapatkan SK pengakuan (legalitas) dari Badan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian sebagai pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S). Dengan SK, BPSDM Nomor, 120/Kpts/SM.730/J/9/08 tahun terbit 2008, kita dapat memberikan sertifikat magang kepada para peserta magang” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Adanya pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S) yang dikelola oleh UD. Intan sebagai tempat konsultasi dan bimbingan para petani Desa Suwaru, hal ini disampaikan oleh Sd (Laki-Laki, 55 Tahun) selaku petani salak di Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Keradaan P4S sangat membantu saya dan teman-teman dalam menanam salak yang berkualitas baik dan bagus. Seperti hasil dari kebun salak saya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan kualitas salaknya. Terus juga kalau ada masalah dengan tanaman salak saya bisanya saya konsultasi kesana” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di rumah bapak Sd).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lokal memerankan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi lokal yang ada di Desa Suwaru melalui pengembangan UMKM yang menekankan bahwa satu dengan satu produk unggulan yaitu salak suwaru. Adanya partisipasi masyarakat terlihat dari petani salak, pedangan salak, tenggulak salak, pengusaha olahan salak yang saling berpengaruh. Peran masing-masing aktor mempunyai kapasitas tersendiri dalam pengembangan dan koordinasi pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada.

4) Koperasi

Koperasi yang ada di Desa Suwaru sudah dari dulu berdiri yaitu Koperasi Kuba Salaka, tetapi manajemennya tidak bagus. Sehingga koperasi itu tidak berkembang dan tidak berjalan dengan baik hingga sekarang. Hal ini disampaikan oleh SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Sejak tahun 1995an sudah terbentuk koperasi di Desa Suwaru yaitu Kuba Salaka, tetapi lama-kelamaan koperasi itu tidak ada kabarnya. Tidak tahu mulai kapan sudah tidak berjalan. Dulu sering di adakan pertemuan seperti rapat tahunan, rapat bulanan. Tetapi sudah hampir 8 tahunan lah tidak ada undangan buat saya. Posisi saya di koperasi itu sebagai penasehat. Jadi saya datangnya pas ada rapat-rapat saja. Setahu saya, koperasi ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan masalah pada manajemen permodalan. Dimana modal yang dipinjamkan kepada para petani tidak dikembalikan sesuai dengan jatuh temponya bahkan tidak dikembalikan. Jadi modal yang ada tidak bisa diputar dan koperasinya tidak berjalan” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Adanya koperasi di Desa Suwaru juga disampaikan oleh Sd (Laki-Laki, 55 Tahun) selaku petani salak di Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Dulu ada koperasi petani salak tetapi gak tahu kok gak berkembang sekarang. Saya kan cumak anggota koperasi biasa jadi tidak tahu menahu kenapa tidak berkembang. Soal peminjaman modal saya sendiri sebagai anggota sudah mengembalikan tempat waktu, tidak tahu lagi yang lainnya” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di rumah bapak Sd).

Tidak berjalan koperasi sebagai wakil pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada di unit Desa disampaikan oleh RL (Laki-Laki, 58 Tahun), selaku Sekretaris Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Koperasi di Desa Suwaru setahu saya ada tetapi tidak berkembang. Akhir-akhir ini koperasi ini mulai berkembang lagi, ya sekitar tahun 2012. Namanya Koperasi Kuba, masyarakat Desa Suwaru mulai mengembangkan lagi koperasi ini tetapi tidak fokus kepada salak melainkan fokus terhadap perternakan lele” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bawah koperasi yang ada di Desa Suwaru yang semula berfokus pada pertanian yaitu buah salak sekarang berfokus pada perternakan ikan lele. Ini dikarenakan pasar dan potensi perternakan ikan lele lebih untung dibandingkan dengan salak. Hal ini disampaikan oleh JB (Laki-laki, 40 Tahun) selaku anggota koperasi Kuba Salaka di Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Memang benar koperasi Kuba Salaka yang berdiri dulu sekarang lebih berfokus pada perternakan lele di tahun 2012, saya dan anggota lainnya sepakat untuk menfokuskan pada perternakan lele karena pasar dan potensi ikan lele lebih menguntungkan dari pada buah salak. Kalau lele kan ternaknya cepat dan hasilnya kelihatan, kalau salak kan panennya tidak tentu kan banyak kadang juga dikit dan juga tidak semua berkualitas baik. Terus juga sudah ada UD. Intan dan P4S nya yang mengembangkan produk unggulan salak tetap ada hingga sekarang. Dan juga perputaran keuangan tidak jalan, jadi koperasi merasa rugi dan akhirnya fakum beberapa tahun belakangan ini” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

5) Lembaga Keuangan

Aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang tidak kalah penting yaitu pihak swasta. Aktor swasta dalam hal ini bersifat sebagai lembaga keuangan yang ada di daerah yang membantu masalah permodalan usaha yang dijalankan oleh para pengusaha atau membantu pemerintah menyediakan modal bagi usaha masyarakat sebagai bentuk kerjasama kepada pemerintah. Lembaga ini bisa berbentuk koperasi, perbankan atau lembaga keuangan perusahaan. Di Desa Suwaru lembaga keuangan yang mendukung pengembangan usaha buah salak UD. Intan berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP yang berperan adalah PG. Krebet.

Salah satu perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini menyalurkan pinjaman kepada usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang dalam membantu mengembangkan usaha masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Untuk soal modal kami dalam mengembangkan usaha ini, kami meminjam uang kepada PG. Kreet. Hasil dari pinjaman tersebut kami bisa membeli mesin penggorengan kripik salak sebanyak 2 unit berkapasitas 10 kg. PG. Kreet salah satu perusahaan BUMN memberikan pinjaman dengan bunga ringan dari bank-bank yang meminjamkan modal usaha. Dengan bunga yang ringan bisa menguntungkan usaha kami.” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru)

Permodalan yang diberikan oleh PG. Kreet kepada usaha masyarakat lokal di Kabupaten Malang juga disampaikan oleh Pu (Laki-laki, 49 Tahun) selaku pegawai PG. Kreet yang menyatakan bahwa:

“Peminjaman uang atau modal kepada usaha kecil yang ada di Kabupaten Malang memang sudah ada program tersendiri di PG. Kreet. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh peminjam. Dan dari PG. Kreet juga menyeleksi apakah usaha kecil tersebut mampu dan layak kami berikan pinjaman modal usaha. Ada tim verifikasi soal penyaluran modal tersebut” (Hasil wawancara tanggal 30 Juni 2015 di Kantor PG. Kreet).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran aktor dalam pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran adalah PG. Kreet yang merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah. PG. Kreet memberikan pinjaman agar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan negara kepada masyarakat dan pemerintah sekitar tempat perusahaan berdiri. Hal tersebut menunjukkan peran swasta ada dalam hal permodalan guna mendukung kelancaran perekonomian pengembangan usaha kecil.

Pemerintah juga menyediakan prekeditan modal yang disalurkan kepada masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan. Lembaga ini memberikan bantuan modal kepada masyarakat Kecamatan Pagelaran melalui kelompok perempuan atau usaha ibu-ibu rumah tangga yang berada di daerah Kecamatan Pagelaran. Hal ini disampaikan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekarsari Desa Suwaru yang menyatakan:

“Para anggota KUB yang baru dirikan ini berasal dari usaha ibu-ibu yang ada di Desa Suwaru. Saya dan para pengurus lainnya mendirikan KUB ini untuk memberdayakan sumberdaya manusia dan membantu lebih mengembangkan usaha yang sudah ada. Faktor lain yang menjadi alasan juga adanya program PNPM Kecamatan Pagelaran yang memberikan kemudahan peminjaman modal kepada kelompok usaha. Maka dari itu mulai tahun ini kami membentuk secara resmi kelembagaan kelompok ini” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Peran PNPM dalam membantu permodalan kepada kelompok usaha bersama khususnya perepumpuan disampaikan oleh MA (Laki-laki, 59 Tahun) selaku Ketua PNPM Mandiri Perdesaan Kecataman Pagelaran yang menyatakan bahwa:

“Adanya PNPM ini membantu para perempuan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha tetapi mengalami kesulitan modal usaha dalam bentuk Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Dengan bunga yang ringan yaitu 1,5% perbulan dan syaratnya pun juga mudah. Adanya SPP ini memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan” (Hasil wawancara tanggal 03 September 2015 di Kantor PNPM Kecamatan Pagelaran)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan atau membentuk lembaga yang mempunyai tujuan memberdayakan masyarakat serta untuk penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan melalui PNPM. Adanya PNMP Kecamtan Pagelaran membantu kelompok masyarakat

untuk mengembangkan usahanya atau membentuk usaha baru untuk dikembangkan.

6) Perguruan Tinggi

Selain adanya peran pemerintah, masyarakat, swasta dalam pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya ekonomi lokal terdapat pula aktor lain yaitu perguruan tinggi. Aktor dari pihak akademisi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Desa Suwaru baik itu secara kelembagaan maupun perseorangan. Perguruan tinggi tersebut adalah Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Peran perguruan tinggi tersebut memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam mengolah buah salak yang baik dan benar. Hal ini disampaikan oleh SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Kami juga dilatih dan didampingi oleh salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk mengolah buah salak ini menjadi berbagai produk. Seminggu sekali kami dilatih dan didampingi bagaimana cara membuat kripik yang enak dan layak dipasarkan” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan).

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Malang juga disampaikan oleh IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Peran perguruan tinggi dalam UKM biasanya pendampingan, pelatihan, bagaiman suatu produk bisa menghasilkan produk lain yang bernilai tinggi. Bisa juga tentang seminar bagaimana memasarkan suatu produk dalam pasar atau media lain. Soal pendampingan atau pelatihan kami yang meminta bantuan, mengajukan proposal pelatihan kepada perguruan tinggi terkait. Kebanyakan kerjasama ini dengan Universitas Brawijaya” (Hasil wawancara

tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran dalam membantu seorang pengusaha menjadi handal untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas dan bernilai tinggi. Adanya perguruan tinggi dalam pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru sangat membantu terlihat dari usaha tersebut dapat berkembang hingga sekarang. Walaupun peran perguruan tinggi ini hanya sekedar memberikan pelatihan dan bimbingan hingga hasil usaha kecil tersebut sesuai dengan kualitas yang diharapkan namun tetap memiliki peran dan bagian dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP.

b) Aspek-Aspek dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tidak dapat dipungkiri dalam mengembangkan suatu usaha dibutuhkan beberapa aspek-aspek yang harus diketahui apakah usaha yang dirintis tersebut dapat berkembang lebih luas atau tidak dengan munculnya suatu kebijakan yang terjadi. Adanya beberapa aspek yang harus diketahui atau dianalisis dalam menjalankan usaha berguna untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam usaha tersebut. Ini dilakukan karena berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan dalam mengembangkan usaha agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari IW (Perempuan, 41 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Itu pasti dilakukan oleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu mereka (pemilik usaha) tahu mana yang menjadi hambatan dalam usahanya. Dinas juga memberikan gambaran aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam merintis dan mengembangkan usahanya. Kebanyakan usaha yang dilajankan oleh masyarakat desa itu tidak jeli melihat peluang dan hambatan yang ada. Jadi setiap sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh dinas kepada masyarakat, dinas selalu memberikan materi-materi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Setiap koperasi yang ada di unit desa pasti memiliki klinik koperasi atau forum anggota, dimana klinik/forum tersebut memberikan informasi dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada usaha anggotanya” (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Diperlukannya aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha juga disampaikan oleh ES (Perempuan, 35 Tahun) selaku Manajer Produksi UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Setiap setahun sekali kami (UD. Intan) selalu melakukan evaluasi atau laporan dari hasil kerja kita kepada bapak (pemilik usaha UD. Intan). Dengan laporan tersebut kami dapat mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang terjadi. Walaupun ini usaha keluarga tapi tetap setiap tahunnya juga kita memberikan laporan tahun usaha ini. Hal ini dilakukan agar usaha ini dapat berkembang terus menerus dan juga dari laporan tersebut kita mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah atau kerugian yang ada” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru)”

Sebagai usaha yang dikelola oleh beberapa orang harus adanya manajemen kepengurusan yang jelas juga disampaikan oleh Sugeng Setyoadi (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Namanya juga usaha keluarga jadi yang menangani semua ya keluarga sendiri, anak-anak saya sendiri. Sudah ada tugas masing-masing, jadi kalau ada masalah ngurusnya gampang. Setiap usaha pasti ada saja permasalahannya baik dari segi produksi, pemasaran maupun modal. Ya, bisa dibilang manajemennya harus jelas dan tahu mana yang harus diperbaiki.” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha.

Hampir semua UMKM di Indonesia menggunakan modal yang tidak banyak dan keuntungan modal tersebut harus diputar lagi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Adapun aspek-aspek penting yang harus diperhatikan didalam mengembangkan UMKM pada usaha lokal UD. Intan Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang adalah aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan.

1) Aspek Manajemen

Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam aspek manajemen suatu usaha. Manajemen suatu usaha/UMKM ataupun perusahaan semua harus jelas agar tidak menimbulkan masalah dalam kepengurusannya dan koordinasi antar karyawan. Hal ini sesuai pernyataan dari SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Sudah pasti harus ada manajemen yang jelas agar usaha ini dapat terus berkembang. Kalau soal siapa yang menanganin produksi, pemasaran, keuangan dan lain-lain UD. Intan ini hampir sama dengan P4S Intan. Peran saya hanya sebagai pemilik. Yang menjalankan ya anak-anak saya” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa UD. Intan sebagai usaha keci menengah menekankan bahwa harus ada koordinasi yang jelas dalam menjalankan suatu usaha, hal ini dikarenakan untuk berkembangnya usaha tersebut. Selain harus adanya manajemen organisasi yang jelas, didalam UMKM juga dibutuhkan manajemen usaha yang menyangkut tentang terdaptarnya merek dagang atau hasil produksi. UD. Intan telah mendaftarkan hasil produksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Hal ini disampaikan oleh ES (Perempuan, 35 Tahun) selaku manajer produksi UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Produk-produk yang dihasilkan dan bahan-bahan yang digunakan semua aman, kami sudah mendapatkan P-IRT dari Dinas Kesehatan. Mulai dari bahan-bahan yang digunakan, cara produksinya, tempat produksi mulai dari dapur, tempat penyimpanan, karyawannya dan lain-lain semua sudah di survei apakah sudah memenuhi persyaratan apa belum. No. P-IRTnya 214350701352” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di usaha olahan Ud. Intan Desa Suwaru).

2) Aspek Produksi

Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pengembangan UMKM adalah produksi. Produksi menekankan tersedianya bahan baku dalam usaha tersebut, peralatan, hingga cara produksi dan hasil yang diproduksi. Usaha olahan buah salak di Desa Suwaru Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku akan produksi kripik dan dodol salak suwaru selain dari hasil kebun milik sendiri membeli dari kebun salak petani desa Suwaru dan desa Kademangan. Hingga sekarang UD. Intan memiliki mesin penggorengan kripik sebanyak 6 unit dengan kapasitas yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan oleh ES (Perempuan, 35 Tahun) selaku manajer produksi UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Mesin penggorengan kripik kami mempunyai 6 unit, 4 unit dengan kapasitas 5 kg dan 2 unit dengan kapasitas 10kg. Dalam sehari setidaknya kalau kripik salak kami produksi 3 kali. 2 kali yang 5 kg dan 1 kali yang 10 kg. Untuk mengurangi kadar minyak pada kripik kami mempunyai 2 unit, 2 lemari pendingin untuk menyimpan buah-buah yang sudah dipotong. Produksinya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk dodol produksinya tidak pasti soalnya tanpa bahan pengawet jadi tidak bisa tahan lama-lama. Hasil produksinya setiap harinya tidak menuntun harus kripik salak jadi digilir. Yang intinya hasil produksi bisa memenuhi permintaan pasar, jadi kita stock juga tidak banyak dan tidak sedikit pula” (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru).



Gambar 12. Alat-alat Produksi Milik UD. Intan
Sumber: Data primer hasil observasi penulis, 2015

Adanya alat-alat modern tersebut memudahkan hasil produksi yang berkualitas dan berstandar global. Karena alat penggorengan kripik tersebut dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu yang bisa diatur untuk menghasilkan kripik salak yang sesuai. Adanya lemari pendingin dan alat pengepresan memberikan manfaat untuk bahan baku dan hasil produksi agar bertahan lama.

3) Aspek Pemasaran

Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha adalah pasar. UMKM yang dikembangkan harus memiliki peluang pasar yang memadai. Perlu diperhatikan bahwa pasar sangat menentukan produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat diterima, dinikmati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Produk yang dihasilkan UD. Intan sudah dipasarkan hingga keluar kota. Hal ini disampaikan

oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku manajer pemasaran UD. Intan yang menyatakan:

“Untuk pemasaran kripik dan dodol salak sudah sampai di Jakarta dan Bali. Di Jakarta kami bekerjasama dengan Bu Winda di Bali Pak Rikis. Kalau Malang para pengusaha oleh-oleh di Dau, Batu, Malang Kota. Kebanyakan mengambilnya tanpa merek, jadi pakai merek mereka sendiri soalnya mengambilnya banyak 5-10kg sekali minta” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan adanya outlet penjualan hasil produksi UD. Intan, maka dibangun lha “Griyo Oleh-Oleh”. Keterangan datang dari ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku manajer pemasaran UD. Intan yang menyatakan:

“Griyo oleh-oleh ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk yang dihasilkan oleh UD. Intan. Kalau konsumen mau beli langsung kan gampang kalau dipinggir jalan gini gak usah masuk masuk ke gang. Saya sendiri memikirkan hal ini karena banyaknya wisatawan yang lewat ke pantai-pantai selatan saat musim liburan. Ini salah satu peluang untuk mempromosikan kalau di Suwaru juga ada toko oleh-olehnya, khas pula yaitu olahan dari salak. Dengan adanya griyo oleh-oleh ini juga membantu memasarkan usaha-usaha kecil yang ada di sekitar Suwaru dan Kecamatan Pagelaran” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa UD. Intan telah memiliki pasar untuk hasil produksinya dan memiliki strategi pemasaran agar usaha dan hasil produksinya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dengan begitu Usaha UD. Intan dalam mengembangkan olahan buah salak sebagai produk unggulan di Desa Suwaru dapat berkembang lebih luas.

4) Aspek Keuangan

Aspek terakhir yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha adalah keuangan. Keuangan UMKM di anggap sebagai penentu terakhir akan usaha yang dijalankan atau dikembangkan mendapatkan keuntungan atau kerugian atas biaya produksi dengan pendapat yang diperoleh. Berdasarkan keterangan dari ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku manajer pemasaran UD. Intan dapat diperoleh data keuangan UD. Intan atas penjualan seluruh hasil produksi sebagai berikut:

Tabel 8. Data Keuangan UD. Intan Tahun 2010-2013

Tahun	Jenis usaha	Biaya Produksi/tahun	Pendapatan kotor/tahun	Pendapatan bersih/tahun
2010	-jenang salak -kripik nangka -kripik salak	175.000.000	195.000.000	20.000.000
2011	-jenang salak -jenang sirsat -kripik nangka -kripik salak	200.000.000	230.000.000	30.0000.000
2012	-jenang salak -jenang sirsat -kripik nangka -kripik salak -kripik pisang	230.000.000	276.000.000	46.000.000
2013	-jenang salak -jenang sirsat -kripik nangka -kripik salak -kripik pisang -kripik pepaya -kripik nanas	270.000.000	322.000.000	52.000.000

Sumber: Data Sekunder UD. Intan, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa UD. Intan setiap tahunnya selalu komitmen memproduksi kripik salak dan jenang/dodol salak dan mengembangkan usaha kripik dan dodol lebih bervariasi. Hal ini menunjukan

dengan bertambahnya produk-produk baru yang dihasilkan menambah sumber pendapatan UD. Intan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

Pengembangan UMKM yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru Kabupaten Malang melalui OVOP memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor inilah yang kemudian memiliki pengaruh dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha masyarakat lokal yang ada di Desa Suwaru. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kordinasi antar aktor serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Suwaru.

a) Faktor Pendukung Pengembangan UMKM berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP.

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal pada sektor UMKM yang menekankan bahwa satu desa dengan satu produk unggulan atau OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang ini didukung oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Melihat kearifan lokal masyarakat Suwaru yang sebagian besar masih mempertahankan dan membudidayakan salak suwaru sampai saat ini bisa dijadikan faktor pendukung pengembangan OVOP di Desa Suwaru. Kesadaran masyarakat akan potensi sumberdaya alam yang dimiliki ini lha yang menjadikan Suwaru identik dengan salaknya. Tinggal bagaimana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Desa Suwaru” (Hasil

wawancara 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan usaha lokal yang berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP juga disampaikan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku manajer pemasaran UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Adanya usaha yang kami jalankan ini sukses sampai sekarang membuka peluang bagi masyarakat sekitar yang ingin menjadikan salak suwaru tidak hanya menjadi produk baru makanan atau minum. Puji syukur, masyarakat disini itu inovatif, kemarin pas pertemuan rutin ibu-ibu gereja, mencoba membuat sale salak. Masih belum banyak industri rumahan yang membuat sale salak. Makanya KUB Mekarsari mencoba menghadirkan produk baru dari salak suwaru” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Keberhasilan dari manajemen yang jelas dalam pengembangan usaha UD. Intan juga disampaikan oleh SS (Laki-Laki, 80 Tahun) selaku pemilik usaha UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya manajemen yang jelas disegala urusan menjadikan usaha ini satu-satunya yang berhasil dan berkembang dari 6 desa yang mengikuti pelatihan dan bimbingan dari dinas. Keenam desa itu Desa Suwaru, Pagelaran, Gondanglegi, Kademangan, Sidoarjo dan Clumprit” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di usaha olahan UD. Intan)

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukan bahwa beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru dalam pelaksanaannya.

b) Faktor Penghambat Pengembangan UMKM berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP.

Pelaksanaan pengembangan UMKM berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang ini memiliki beberapa hambatan. Salah satunya adalah belum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani secara khusus sektor pertanian salak. Hal ini disampaikan oleh MI (Laki-Laki, 57 Tahun) selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Daerah yang secara khusus menangani OVOP di Kabupaten Malang belum ada. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti dan faham akan arti pentingnya di setiap satu desa memiliki produk unggulan dari sumberdaya lokal” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

Faktor penghambat selanjutnya diungkapkan oleh ET (Perempuan, 38 Tahun) selaku manajer pemasaran UD. Intan yang menyatakan bahwa:

“Belum bisa seluas memasarkan produk kripik dengan merek sendiri yaitu Osari. Soalnya kalau pakai merek sendiri para pengusaha toko oleh-oleh tidak mau menerima produk Osari, dari pada rugi tidak ada yang membeli ya sudah kami terpaksa menjual tanpa merek” (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2015 di Griyo oleh-oleh Desa Suwaru).

Pernyataan tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan usaha berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru juga datang dari RL (Laki-Laki, 58 Tahun), selaku Sekretaris Desa Suwaru yang menyatakan bahwa:

“Keaktifan anggota koperasi Kuba Salaka dalam mengembangkan dan membudidayakan salak suwaru kurang terlaksana. Ini karena harga jual salak suwaru murah berbeda dengan dahulu yang mahal. Sehingga menjadi petani salak yang membudidayakan salak dirasa tidak menguntungkan perekonomian

mereke. Ini berimbas pada keaktifan koperasi itu. Untuk menggerakkan lagi koperasi tersebut masyarakat sini mulai menernak lele dan mengolah lele” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Desa Suwaru).

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas dapat disimpulkan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah kearifan lokal dan masih ada partisipasi masyarakat dalam membudidayakan salak dan mengolah buah salak menjadikan nilai tambah dari hasil olahannya serta manajemen dari segala aspek dalam UMKM menjadikan usaha tersebut berkembang. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah/Kelembagaan yang berkerja menangani tentang OVOP, kesulitan memasarkan produk dengan merek dagang sendiri, harga jual buah salak turun dari tahun ke tahun.

C. Pembahasan

1. Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tanah atau lahan bercocok tanam yang subur. Ini dikarenakan Kabupaten Malang berada di dataran tinggi, dikelilingi oleh pegunungan dan suhu serta curah hujan yang rendah. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Malang kaya akan sumberdaya alamnya terutama sektor pertanian pangan yaitu tanaman hortikultura seperti buah-buahan. Hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Malang memiliki sumberdaya alam sektor buah-buahan yang menjadi ciri khas dari daerah itu.

Mengembangkan produk yang potensial di Kabupaten Malang dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan memiliki keunggulan kompetitif, tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Malang. Sumber daya alam sektor tanaman hortikultura buah yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Malang salah satunya adalah salak suwaru. Salak suwaru tumbuh dan berkembang subur di daerah Kecamatan Pagelaran terutama di Desa Suwaru.

Sejak dahulu Desa Suwaru terkenal dengan hasil sumberdaya alamnya yaitu salak suwaru dengan luas lahan perkebunan yang dimiliki masyarakat mencapai 35 Ha. Potensi sumberdaya alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk mengembangkan suatu produk yang dihasilkan dari buah salak. Pengembangan olahan buah salak menjadi produk usaha kecil atau usaha masyarakat lokal sejak tahun 2006 tidak terlepas dari upaya yang dilakukan

pemerintah Kabupaten Malang dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengembangan usaha masyarakat lokal atau UMKM yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat perlu adanya tatanan peran masing-masing aktor yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah melibatkan semua elemen-elemen yang ada. Sehingga tujuan dan hasil dari adanya pembangunan daerah dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Berdasarkan pada kondisi, kekhasan, dan potensi sumber-sumber komoditas yang ada di daerah tersebut maka model pembangunan yang tepat adalah menekankan pada pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Menurut Said (2015;54) pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Sesuai dengan pengertian tersebut yang menjadi titik point dalam pengembangan ekonomi lokal adalah ada dan tersedianya sumber daya alam yang dimiliki di daerah tersebut, terlibatnya para aktor, serta karakteristik atau kearifan lokal daerah tersebut.

Mengembangkan produk unggulan dengan memanfaatkan sumber daya lokal selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Rill dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP) serta

Keputusan Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2008 agar program OVOP agar dikembangkan di Provinsi lain. Berdasarkan regulasi tersebut dimaksudkan agar pendekatan OVOP dapat meningkatkan pendapatan, kebanggaan, dan kemandirian masyarakat dalam kemampuan pemasaran dan daya saing produk Koperasi maupun UMKM sesuai standar internasional. Sehingga Koperasi dan UMKM dapat menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

Sama halnya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal, pendekatan OVOP juga menitikberatkan akan adanya peran aktor/*stakeholder* yang ada di dalamnya. Berdasarkan konsep OVOP disebutkan bahwa usaha masyarakat dalam koperasi ataupun UMKM memiliki peran penting dan pemerintah juga memiliki peran dalam menciptakan dan mendorong usaha yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pendekatan OVOP tidak hanya sumberdaya yang ada tetapi kepentingan dan peran aktor yang ada didalamnya juga penting.

a) Kelembagaan dan aktor/*stakeholder* yang terlibat

Tahapan yang pertama dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang harus diperhatikan adalah identifikasi aktor/*stakeholder* yang terlibat didalamnya. Menurut Said (2015;3) menyatakan bahwa aktor yang dimaksud dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah aktor dan kelembagaan yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah, adapun aktor-aktor yang terlibat adalah Pelaku usaha lokal, Pelaku usaha baru, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Masyarakat

Lokal, Koperasi, Lembaga keuangan di daerah, dan Perguruan tinggi. Setiap aktor yang berperan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Desa Suwaru memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Peran tersebut setidaknya telah membantu dan mendukung di Desa Suwaru memiliki potensi adalah salak suwaru dan olahannya. Peran aktor yang ada menunjukkan komitmen dan koordinasi dalam melakukan pengembangan sumberdaya lokal di Desa Suwaru untuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui OVOP. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan ada beberapa aktor yang menjalankan perannya serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah didalam hal ini berkewenangan mengembangkan sumber daya ekonomi lokal karena merupakan salah satu wujud dari pembangunan ekonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan berhak untuk melakukan pembangunan di daerahnya demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu *stakeholder* di tingkat daerah yang mengembangkan usaha berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di wilayah Kabupaten Malang adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Untuk mengembangkan potensi sumberdaya lokal sektor pertanian sub sektor tanaman hortikultura berupa buah-buahan, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Malang mencanangkan visi dan misi Dinas yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan.

Untuk mencapai tujuan terlaksananya pengembangan ekonomi lokal mempunyai tahapan-tahapan yang berguna untuk menentukan potensi daerah tersebut dapat dikembangkan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal. Menurut Said (2015:29) tahapan ke tiga yaitu penyusunan rencana dan anggaran. Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Kabupaten Malang melalui OVOP tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Pada point ke-7 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan. Untuk mencapai tujuan point ke-7 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 mengarusutamakan peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Koperasi Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 yang dilakukan adalah salah satunya adalah mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

Dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pendekatan OVOP menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, (2010;25) peran pemerintah yaitu:

- a. Fasilitas, yaitu mempersiapkan “lapangan pertandingan” yang baik buat pelaku ekonomi lokal untuk persaingan sehat di pasar dan memperliharakan keadaan persaingan sehat antara pelaku ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang berupa pemberian kegiatan pelatihan dan bimbingan dalam mengolah buah salak menjadi olahan makanan ringan berupa kripik dan jenang/dodol salak. Fasilitas yang diberikan tidak hanya sebatas pelatihan semata melainkan juga sarana promosi produk yang dihasilkan berupa keikut sertaan dalam pameran/basar produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Untuk menunjang pemasaran pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang serta Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyediakan fasilitas perijinan dan sertifikasi dalam berbagai bentuk seperti P-IRT, perijinan usaha.
- b. Informasi, yaitu mencari dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal dan memberikan informasi yang benar kepada semua pelaku ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah juga memberikan informasi mengenai pasar, mutu yang harus standar internasional karena produk yang dihasilkan diupayakan untuk menembus pasar global maupun internasional. Hal ini ditunjukan dari adanya klinik UMKM yang didirikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan informasi berbagai hal dan membantu mengembangkan usaha lebih luas. Seperti informasi tentang pameran atau basar usaha antar produk-produk usaha lokal di Kabupaten

Malang, informasi tentang sertifikasi P-IRT untuk menjamin keamanan produksi.

- c. Mendorong semangat, adalah memberikan insentif dan stimulan yang tepat kepada pelaku ekonomi lokal agar mereka lebih mandiri. Perlu adanya bentuk dorongan dari pemerintah agar masyarakat lokal yang ada di Desa Suwaru mau lebih mengembangkan sumberdaya alam yang dimiliki. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dorongan semangat yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang di Desa Suwaru dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal adalah meresmikan *showroom* atau outlet toko oleh-oleh yang dikelola oleh UMKM Desa Suwaru (UD. Intan) sebagai toko resmi hasil produk unggulan Desa Suwaru yaitu olahan buah salak dan hasil produksi UMKM sekitar Desa Suwaru dan Kecamatan Pagelaran.

2) Pelaku Usaha Lokal

Masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru adalah pemilik usaha olahan buah salak yaitu UD. Intan. Sebagai pelaku usaha lokal UD. Intan termasuk *stakeholder* tingkat lapangan. Hal ini dikarenakan pemilik usaha yang melakukan proses kegiatan ekonomi mulai dari mendapatkan bahan baku sampai proses pemasaran hasil produksi. Seperti pengertian pelaku usaha lokal menurut Said (2015;3) yang menyatakan bahwa adanya pelaku usaha lokal berperan dalam mendukung

penciptaan lapangan pekerjaan. Pada usaha lokal UD. Intan tenaga kerja selain dari anggota keluarga juga berasal dari masyarakat Desa Suwaru yaitu 4 orang, 2 masyarakat dari Desa Suwaru, 2 orang dari Desa Rejobanteng.

Selain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, adanya UD. Intan juga memperngaruhi tersedianya bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh UD. Intan adalah buah salak suwaru maka dibutuhkan berbagai cara untuk menyediakan bahan baku. Sehingga UD. Intan tetap mempertahankan dan membudidayakan tanaman salak suwaru serta menjalin kerja sama dengan petani salak Desa Suwaru dan Desa Kademangan untuk menyediakan bahan baku. Selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, kerja sama ini bermanfaat untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Suwaru dan sekitarnya.

Berdasarkan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tentang prinsip-prinsip OVOP yang harus dijalankan dalam pengembangan produk-produk unggulan di desa harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;19-20):

a. Lokal tapi Global

Prinsip lokal tapi global yaitu membuat kekhususan produk lokal yang dapat dipasarkan bukan saja di Indonesia, tetapi juga di pasaran global dan dapat menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Produk yang dihasilkan oleh UD. Intan terutama kripik salak pemasarannya sudah sampai luar Malang Raya yaitu Bali dan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip lokal tapi global dalam pengembangan gerakan OVOP yang membuat kekhususan

produk lokal yang dapat dipasarkan bukan saja di wilayah sentra produksi, tetapi juga di pasaran global Indonesia dan dapat menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Terbukti dari tahun ketahun peningkatan pendapatan dari hasil produksi terus meningkat.

b. Kemandirian dan Kreativitas

Kemandirian dan kreativitas yang dimaksud adalah Sebagai pelaku dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal melalui gerakan OVOP, pelaku usaha lokal dituntut untuk menentukan produk spesifik lokal melalui penyadaran potensi lokal akan dikembangkan yang nantinya menyebabkan kerjasama dan kepedulian, dan kreativitas dengan spirit kemandirian. Kemandirian usaha lokal UD. Intan yang ada di Desa Suwaru ditunjukkan dari kepengurusan manajemen diatur semua oleh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga baik anak maupun menantu memiliki peran dan tugas masing-masing sehingga dituntut kemandirian dalam kepengurusan.

Sedangkan kreativitas pada UD. Intan terlihat dari produk-produk yang dihasilkan tidak hanya olahan buah salak suwaru semata melainkan olahan buah sirsak, nanas, nangka, pisang, durian dan pepaya. Usaha lokal UD. Intan terlihat jeli dalam melihat potensi yang dimiliki di daerah sekitar untuk mengembangkan peluang usaha yang lebih bervariasi.



Gambar 13. Produk-Produk UD. Intan
Sumber: Data primer dari hasil observasi penulis, 2015

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan komponen terpenting dalam gerakan OVOP dimana dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif mampu menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang bisnis di sekitar sumberdaya alam yang dimiliki. Di Desa Suwaru pengembangan sumberdaya manusia terlihat dari adanya tenaga kerja UD. Intan 3 orang yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan mesin penggorengan kripik. Ketiga pekerja tersebut dilatih dan dibimbing oleh pemilik usaha agar mampu mengoperasikan mesin walaupun bagian operasi mesin ada sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam berbagai bidang.

3) Masyarakat Lokal

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal juga melibatkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal merupakan aktor yang berada di tingkat lapangan. Hal ini menjadikan komunikasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah harus terjalin dengan baik agar dapat terlaksananya pengembangan sumberdaya

ekonomi lokal. Menurut Said (2015;3) Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor utama dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi yang mengkoordinir proses sumberdaya alam diperoleh, distribusi, pengelolaan, serta pengelolaan sumberdaya manusia yang ada juga bermitra atau bekerjasama dengan pihak lain. Masyarakat lokal yang ada di Desa Suwaru dalam aktor pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang dimaksudkan adalah para petani salak suwaru, pedagang/tengkulak salak suwaru dan masyarakat Desa Suwaru sendiri.

Petani salak sangat berperan dalam kelangsungan dan terlaksananya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Hal ini dikarenakan para petani berperan dalam kelangsungan adanya sumberdaya alam yaitu salak suwaru. Hal ini ditunjukkan masih adanya petani yang membudidayakan salak suwaru dan pekerjaan ini menjadi mata pencariannya. Mayoritas masyarakat lokal Desa Suwaru masih mempunyai lahan perkebunan/pekarangan salak disetiap lahan mereka. Baik ini dikelola sendiri maupun dikelola oleh orang lain.

Berdasarkan survey/observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Suwaru hampir seluruh petani salak yang ada adalah para lansia yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu. Hal ini dikarenakan menjadi petani salak bagi kalangan usia produktif tidak menghasilkan uang atau keuntungan yang lebih banyak. Berbeda dengan dahulu saat salak suwaru menjadi prioritas komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Malang bahkan Jawa Timur, dimana harga jual salak suwaru sangatlah tinggi sehingga hasil jual dapat menutupi biaya tanam.

Tabel 9. Waktu dan Cara Panen Salak Suwaru

Waktu Panen Salak Suwaru	Bulan Panen Salak Suwaru		Puncak Panen
	Juli-Agustus	Desember-Januari	September
Rata-rata Hasil Produksi	30.000 ton		
Umur Tanaman yang sudah dikembangkan	>4 tahun		
Cara pembudidayaan dengan pemupukan	Jenis Pupuk	Umur Tanaman	Waktu Pemupukan
	Pupuk kandang (organik)		Setahun sekali
	Pupuk Buatan	<1 tahun	1 bulan sekali
		1-2 tahun	2 bulan sekali
		2-3 tahun	3 bulan sekali
		>3 tahun	6 bulan sekali
Cara pembudidayaan dengan Pengarian	Penyiraman dilakukan perminggu secara periodik		
Cara Panen	Buah dipetin secara manual dan yang sudah masak		
Rantai Pemasaran	Petani-Pedangan/Pengepul-Pedangan Besar (Tengkulak)-Konsumen		

Sumber: Data sekunder hasil observasi penulis, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dalam setahun petani salak memanen hasil tanam yang dilakukan setiap pada bulan Oktober-November saat musin penghujan dapat dirasakan panennya saatnya bulan Juli-Januari pada tahun berikutnya. Cara pembudidayaan petani salak suwaru dengan memadupadankan organik dan kimiawi, hal ini dilakukan untuk menghasilkan kualitas salak yang bagus dan baik serta untuk mempercepat hasil panen. Hasil panen juga dipasarkan melalui tengkulak atau pedangan besar.

Pemasaran hasil produksi yang dijual kepada para tengkulak, membantu para petani dalam memasarkan hasil produksinya. Tetapi hal ini juga dapat

merugikan petani dengan perilaku tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga yang murah. Hal ini menjadikan para petani lebih menyukai bila hasil panennya dijual didepan rumah sendiri atau lapak-lapak pinggir jalan dan juga memasok kebutuhan bahan baku untuk usaha lokal (UD. Intan) yang ada di Desa Suwaru.

4) Koperasi

Salah satu aktor yang memiliki peran adalah koperasi. Koperasi memiliki peran sebagai wadah atau tempat dimana koordinasi antara petani untuk membudidayakan dan mengolah hasil panen. Menurut Said (2015;3) Koperasi merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinir urusan sumberdaya pada sektor tertentu yang ada di kawasan khusus. Urusan yang dimaksud adalah urusan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya modal, serta sumberdaya pendukung lainnya.

Koperasi yang ada di Desa Suwaru secara legalitas sudah terbentuk sudah lama tetapi dengan berjalannya waktu koperasi yang ada tidak berkembang dengan baik. Terjadi masalah dalam internal koperasi yang menjadikan koperasi Kuba Salaka ini tidak berjalan. Masalah internal yang terjadi pada koperasi ini menjadikan salak suwaru yang sudah lama menjadi produk unggulan di Desa Suwaru dan Kabupaten Malang mengalami penurunan hasil produksi maupun pemasaran. Dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana untuk menentukan dan mengontrol hasil panen, pemasaran hasil produksi, hingga permodalan bagi petani untuk mengembangkan salak suwaru.

Adanya koperasi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP menurut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;52) dapat berfungsi dibidang usaha, yaitu untuk memediasi akses pembiayaan, untuk memediasi akses produksi, untuk memediasi akses pemasaran, untuk memenuhi persyaratan pengucuran program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Suwaru, koperasi yang ada tidak dapat berfungsi sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah

Untuk mengembalikan tugas dan peran suatu lembaga koperasi, para anggota koperasi Kuba Salaka melakukan program atau kelompok usaha yang bergerak dalam bidang peternakan lele. Di Tahun 2012 para anggota koperasi dan masyarakat Desa Suwaru mulai mengembangkan usaha pembudidayaan lele dan hasil pengolahan lele. Ini dilakukan untuk menciptakan pekerjaan bagi masyarakat lokal dengan melihat peluang yang dimiliki di Desa Suwaru dengan irigasi yang tertata.

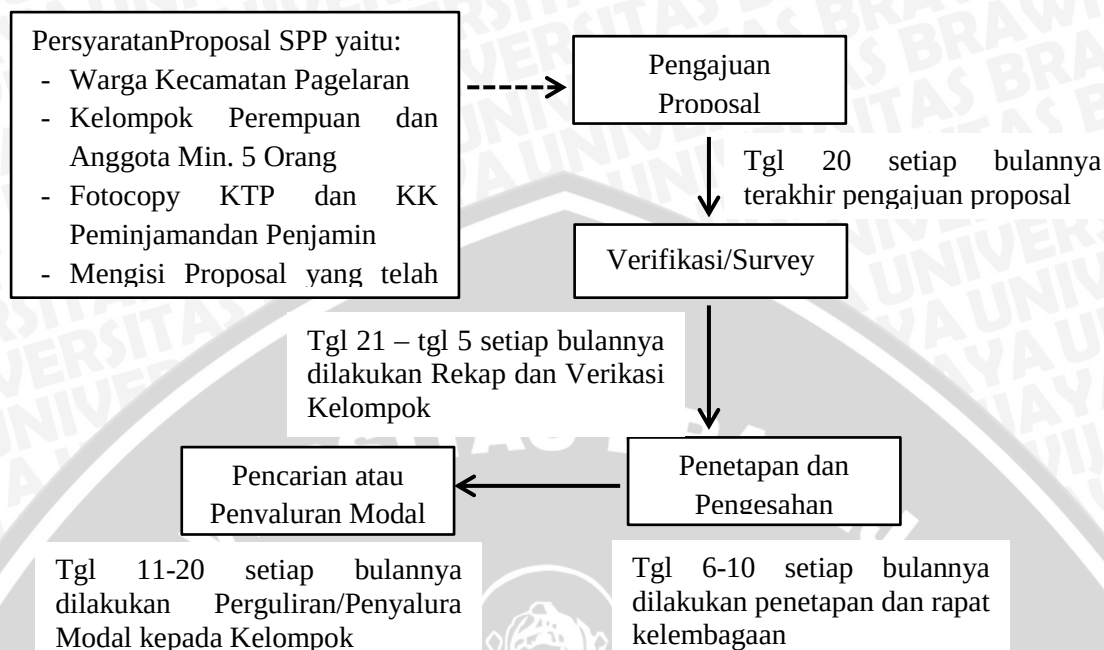
5) Lembaga Keuangan di Daerah

Modal sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha baik untuk produksi maupun untuk pemasaran. Maka dari itu dibutuhkan lembaga keuangan yang dirasa dapat membantu usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Aktor yang berperan pengembangan sumberdaya lokal selain pemerintah dan masyarakat adalah pihak swasta. Menurut Said (2015;3) Lembaga keuangan yang ada di daerah memiliki peran dalam menyediakan sumberdaya modal dalam menunjang proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang berasal dari Pemerintah Daerah atau berasal dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan

sektor swasta. Sektor ini memberikan manfaat bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program perkreditan modal yang diberikan kepada usaha masyarakat lokal oleh PG. Kretet. Pabrik gula yang berada di Desa Kretet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ini merupakan perusahaan milik negara.

Program perkreditan modal yang dilakukan oleh PG. Kretet merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah Kabupaten Malang melalui penyaluran modal usaha kepada masyarakat lokal dengan bunga yang ringan. Setiap usaha masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Malang dapat melakukan perkreditan modal dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh PG. Kretet. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha adalah adanya jaminan berupa harta benda atau sertifikat barang berharga yang tidak bergerak seperti rumah, lahan pertanian atau perkebunan serta memiliki usaha yang berkembang. Jumlah kredit modal yang diperoleh tergantung dari hasil verifikasi tim lapangan PG. Kretet yang melakukan *survei* terhadap usaha masyarakat serta omset pendapatan yang dihasilkan setiap tahunnya dari usaha tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, selain adanya program perkreditan dari PG. Kretet. Lembaga lain yang menyediakan modal dalam pengembangan sumberdaya lokal yang berada ditingkat kecamatan adalah PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagelaran. Melalui PNPM ini usaha atau kelompok usaha bersama terutama usaha perempuan di Kecamatan Pagelaran mendapatkan modal yang cukup dengan mudah dan bunga yang ringan.



Gambar 14. Skema Pengajuan dan Penyaluran Prekreditasi Modal SPP PNPB Mandiri Pedesaan Kecamatan Pagelaran
Sumber: Data Sekunder dari hasil observasi penulis, 2015

Berdasarkan skema di atas dapat dilihat dalam pengajuan pinjaman kepada PNPB Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagelaran mudah dan cepat bila semua syarat yang telah ditentukan oleh Tim Unit Perekapan Kelompok (UPK) dan Tim Verifikasi Perguliran PNPB Kecamatan Pagelaran telah memenuhi. Bunga yang dibebankan kepada kelompok usaha/perempuan ringan dengan 1,5% setiap bulannya dari jumlah pinjaman. Kemudahan yang lain ialah tidak adanya jaminan untuk melakukan pengajuan proposal SPP berbeda dengan pihak-pihak swasta dalam perkreditan modal usaha.

6) Perguruan Tinggi

Aktor yang terdapat dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal tidak hanya dari peran pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha terdapat pula aktor lain yaitu perguruan tinggi. Menurut Said (2015;3)

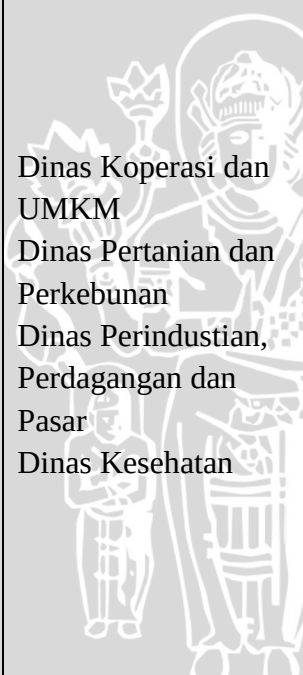
perguruan tinggi merupakan akto pendukung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang memberikan evaluasi dan kontribusi akademis terhadap proses pengembangan baik secara perseorangan maupun dari hasil kerjasama dengan pemerintah.

Perguruan tinggi yang memberikan kontribusinya dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Kabupaten Malang khususnya di Desa Suwaru baik secara kelembagaan maupun perseorangan adalah Universitas Brawijaya Malang. Peran Perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah memberikan konsultasi dan bantuan pelatihan dan pengolahan buah salak. Fakultas yang telah memberikan bantuan terhadap usaha pengolahan buah salak yaitu Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya. Melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang dengan salah satu dosen FTP Universitas Brawijaya melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap usaha pengolahan buah salak UD. Intan. Kerjasama ini dilakukan oleh dinas terkait untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Suwaru untuk meningkatkan nilai jual dari salak meningkat menjadi olahan kripik dan jenang/dodol salak.

Seluruh aktor/*stakeholder* yang telah memberikan peran dan kontribusi pada pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan koordinasi satu sama lain. Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan informasi atas adanya kegiatan yang

dilakukan dan memberikan tanggung jawab akan perannya sesuai dengan kapasitas setiap aktor. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Peran aktor/*stakeholder* yang terlibat dalam Pengembangan UMKM berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

Aktor/ <i>Stakeholder</i> yang Terlibat		Peran atau Kontribusi
Pemerintah	 Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Kesehatan	Facilitasi sarana dan prasana pengembangan usaha dalam bentuk pelatihan dan bimbingan pengolahan buah salak. Serta perijinan segala bentuk untuk menunjang pemasaran dan pengembangan produk seperti ijin usaha dan P-IRT.
		Menginformasikan berbagai peluang pemasaran, harga jualan produksi dipasaran melalui Klinik UMKM yang didirikan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM
		Mendorong semangat masyarakat lokal untuk terus mengembangkan usahanya. Hal ini terwujud dalam peresemian outlet/toko oleh-oleh yang dimiliki pelaku usaha sebagai toko oleh-oleh resmi di Desa Suwaru yang memproduksi produk unggulan dari salah satu komoditas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang yaitu salak suwaru
Pelaku Usaha Lokal	UD. Intan	Mengolah potensi lokal yang dimiliki Desa Suwaru yaitu buah salak menjadi olahan kripik dan jenang salak. Sehingga salak suwaru dikenal atau bisa dipasarkan secara global sebagai produk unggulan di Desa Suwaru

		Kabupaten Malang. Hal ini terlihat dari pemasaran produksi UD. Intan sudah mencapai Jakarta dan Bali
		Memanfaatkan potensi lain yang berada disekitar Desa Suwaru dapat dikembangkan dan meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Ini terlihat dari berbagai macam produk olahan kripik dan dodol yang diproduksi oleh UD. Intan selain olahan dari salak.
		Memberdayakan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dengan memperkerjakan sebagai karyawan dan menjalin kerja sama dengan para petani salak untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan.
Masyarakat Lokal	Petani salak dan Pedangan salak	Membudidayakan salak suwaru agar terus menjadi produk unggulan di Desa Suwaru dan Kabupaten Malang. Serta memasarkan salak suwaru disepanjang jalan utama di Desa Suwaru untuk menunjukan bahwa Desa Suwaru sebagai desa penghasil salak.
Koperasi	Koperasi Kuba Salaka	Sebagai lembaga yang pengkontrol para petani salak terhadap hasil panennya. Tempat penyedia modal dan informasi bagi para petani untuk membudidayakan tanaman salak.
Lemabaga Keuangan	PG. Krebet	Menyediakan perkreditan modal dengan bunga yang ringan dengan ketentuan memiliki usaha dan jaminan harta tak bergerak. PG. Krebet ini menjadi lembaga permodalan dalam

		mengembangkan usaha UD. Intan. Karena jumlah kredit yang diberikan untuk menunjang produksi UD. Intan dengan membeli 2 unit mesin penggorengan berpasitas 10kg.
	PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Pagelaran	Menyedikan perkreditan modal terutama untuk kelompok usaha bersama khususnya perempuan dengan bunga ringan. Adanya PNPM ini menjadi lembaga keuangan yang ada di daerah memudahkan KUB Mekarsari yang baru didirikan untuk mengembangkan usaha para anggota yang ada.
Perguruan Tinggi	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya	Memberikan pelatihan dan bimbingan berbagai ilmu pengetahuan mengenai produk yang akan dihasilkan dengan kandungan dan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sumber: Data primer dari hasil observasi Penulis, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa peran antar aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Desa Suwaru saling memberikan kontribusi perannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hasil penelitian terlihat pula koordinasi yang dilakukan oleh para aktor dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam mengembangkan usaha kecil yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui produk unggulan yang ada di Desa Suwaru. Selain itu peran setiap aktor yang terlibat mengarahkan koordinasi terhadap dukungan baik sarana prasana, ketersediaan bahan baku dan modal untuk menunjang upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal.

b) Aspek-Aspek dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mengembangkan usaha baik dalam bentuk perusahaan maupun UMKM perlu adanya faktor-faktor atau aspek-aspek yang harus dipertimbangkan apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau dilaksanakan. Menurut Suryana (2006;184) dibutuhkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan beberapa aspek yang memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah manajemen/pengelolaan, produksi, pemasaran, serta finansial/keungan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha UD. Intan dalam pengolahan buah salak yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1) Aspek Manajemen

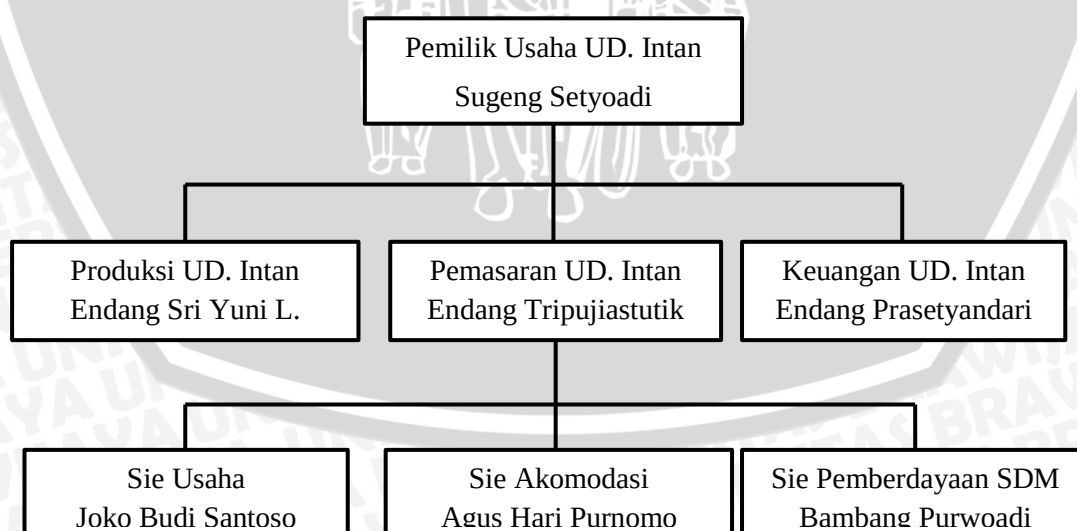
Pada dasarnya manajemen UMKM merupakan tempat terutama dalam pemasaran produk sehingga apabila pemasaran produk kurang efisien, sistem akuntansi dan audit yang baik belum diterapkan, kurang mampunya beradaptasi dengan lingkungan usaha, manajer kurang kompeten, belum memenuhi kepuasan pelanggan, etika manajemen kurang mendukung. Oleh karena itu, menurut Kuncoro (2010;89) pengembangan UMKM dari sisi manajemen diprioritaskan pada dua hal yakni diperhatikan yaitu: (1) peningkatan manajemen administrasi, keuangan, dan proses produksi; (2) layanan pengembangan bisnis. Sedangkan aspek manajemen yang harus diperhatikan menurut Suryana (2006;186) berkaitan dengan sumberdaya manusia dalam kepemilikan usaha, manajemen usaha, karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian aspek manajemen yang ada di UD. Intan untuk terus mengembangkan usaha tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Manajemen Organisasi UD. Intan Tahun 2015

Nama Pemilik	Sugeng Setyoadi
Alamat Tempat Usaha	Tempat Produksi: Jl. Purbowijoyo RT 09 RW 03 Desa Suwaru Kec Pagelaran-Malang Tempat Usaha: Jl Raya Suwaru No 7 RT02/RW.02 Desa Suwaru Kec Pagelaran-Malang
Bidang Usaha	Aneka Kripik Buah dan Aneka Jenang/dodol Buah. Produksi utama Kripik dan Jenang/dodol Salak Suwaru. Produksi lainnya kripik nangka, kripik pisang, kripik pepaya, kripik nanas jenang/dodol sirsat, dodol apel, dodol durian
Jumla Karyawan/Tenaga Kerja	10 Karyawan
Perijinan dagang usaha	No. P-IRT 214350701352
Manajemen/struktur Organisasi Usaha	Tergambar pada Gambar 15.

Sumber: Data primer dari hasil observasi penulis, 2015



Gambar 15. Struktur Manajemen Organisasi UD. Intan

Sumber: Data Sekunder dari hasil observasi penulis, 2015

Berdasarkan tabel dan gambar diatas terlihat bahwa manajemen UD. Intan terarah dan terorganisis dengan baik. Ini ditunjukkan dengan adanya manajemen kepengurusan yang jelas. Sehingga adminitrasi terhadap segala usaha yang ada di UD. Intan mulai dari pemasaran, produksi, keuangan, hingga sumberdaya manusia tertata rapi dan terkoordinasi bila terjadi hambatan-hambatan. Adanya manajemen yang jelas bermanfaat menyelesaikan atau mengurai hambatan-hambatan yang terjadi.

Adanya manajemen juga berpengaruh terhadap produktivitas sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga produksi. Perlu adanya manajemen untuk melatih dan membimbing pekerja karena setiap pekerja yang ada di UMKM terbatas kerampilan, pendidikan hingga rendahnya pengalaman kerja. Para karyawan produksi UD. Intan yang berjumlah 4 orang sampai saat ini ada 3 orang yang sudah terlatih dan terampil dalam memproduksi olahan buah salak.

2) Aspek Produksi

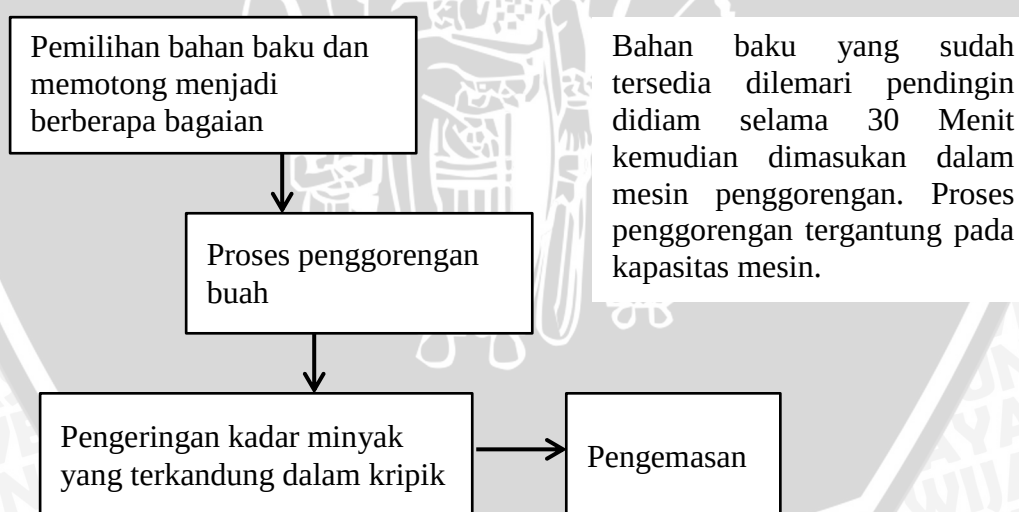
Menurut Kuncoro (2010;89) hasil produksi dalam UMKM dipengaruhi oleh peningkatan proses produksi melalui peningkatan alat produksi, efisiensi dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditunjukan untuk memperbaiki proses produksi UMKM. Sedangkan menurut Suryana (2006;186) sspek produksi, berkaitan dengan bahan baku, mesin dan peralatan, volume produksi. Kedua pemikiran tersebut menekankan bahwa aspek/faktor produksi dalam mengembangkan UMKM dipengaruhi oleh kapasitas produksi, bahan baku, fasilitas dan sarana produksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, aspek produksi UD. Intan dipengaruhi oleh kapaistas produksi dan jumlah pekerja. Bagian operasional ada 3 karyawan sekaligus berkerja dalam proses produksi hingga pengemasan. Proses produksi UD. Intan dilakukan setiap hari senin-hari jum'at.

Tabel 12. Waktu dan Proses Produksi UD. Intan

Waktu Produksi	3 kali produksi kripik dalam sehari.
Kapasitas Mesin	4 Unit kapasitas 5 Kg 2 Unit kapasitas 10 Kg
Mesin yang digunakan dalam sekali produksi satu variasi kripik	1 unit kapasitas 10kg dan 2 unit kapasitas 5kg
Hasil produksi	Bergantung pada bahan baku yang ada dan permintaan pasar
Proses Produksi	Tergambar dalam gambar 16.

Sumber: Data primer dari hasil observasi penulis, 2015



Gambar 16. Proses Produksi Kripik UD. Intan

Sumber: Data primer dari hasil observasi penulis

3) Aspek Pemasaran

Kedekatan setiap faktor yang ada didalam pegembangan usaha menjadi pengaruh dalam memasarkan hasil produksi. Adanya akses atau peluang pasara

terhadap hasil produksi dibutuhkan beberapa hal yang harus dipenuhi. Menurut Kuncoro (2010;89) untuk menjamin pasar bagi produk-produk dari UMKM diperlukan upaya meningkatkan daya saing produk-produk UMKM, salah satunya dengan usaha untuk dapat memenuhi standard pembelian/industri, seperti HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektuan) dan standar mutu internasional (ISO) dan perluasan pasar pemasaran. Sedangkan menurut Suryana (2006;186) pemasaran, berkaitan dengan perkembangan pasar terhadap produk, prospek pasar dan pemasaran, sasaran pemasaran, dan rencana pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha olahan buah salak UD. Intan di Desa Suwaru Kabupaten Malang terlihat bahwa pemasaran yang dilakukan masih belum mampu kepasar global. Hasil produksi UD. Intan dipasarkan melalui sistem pemasaran tanpa merek dagang atau brand produksi UD. Intan. Walaupun hal ini merugikan untuk merek dagang UD. Intan tapi hal ini lebih menguntungkan pemasaran menjadi lebih luas dan keuntungan yang didapatkan.

Sarana pemasaran dilakukan oleh UD. Intan untuk lebih memasarkan hasil produksinya dengan merek dagang sendiri, UD. Intan mendirikan outlet atau toko. Toko tersebut bertujuan untuk mempermudah konsumen mendapatkan dan mengenalkan konsumen atas hasil produksi UD. Intan yaitu olahan buah salak yang identik dengan Desa Suwaru. Hal ini juga bertujuan untuk lebih mengembangkan produk unggulan yang ada di Desa Suwaru.

4) Aspek Keuangan

Aspek terakhir yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha adalah keadaan finansial atau keuangan usaha tersebut dalam menjalankan

usahnya. Menurut Suryana (2006;186) aspek keuangan, berkaitan dengan kebutuhan akan sumber dana, keuntungan dan kerugian usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, usaha olahan UD. Intan mendapatkan kenaikan keuntungan dari tahun ketahun. Keuntungan tersebut dirasa cukup untuk mengembangkan usaha UD. Intan lebu^h besar lagi. Pendapatan ini belum termasuk pemasukan dari toko oleh-oleh yang sebagian besar produk yang dijual adalah hasil produksi UD. Intan. Pendapatan yang diperoleh UD. Intan berpengaruh terhadap kerjasama yang dilakukan untuk lebih mengembangkan produksinya. Secara finansial usaha ini prospek bisnis kerja sama dengan perusahaan/distributor oleh-oleh secara global layak untuk dilakukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

a) Faktor Pendukung Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui OVOP

Faktor-faktor pendukung yang ada tidak terlepas dari beberapa aspek yang ada disekitar lingkungan usaha. Keterkaitan antara lingkungan dan usaha menjadi penentu adanya dukungan terhadap usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pengembangan UMKM yang berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal melalui pendekatan OVOP di Desa Suwaru didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Kesadaran para pelaku usaha dan petani akan potensi yang miliki. Menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK kunci sukses pendekatan OVOP adalah adanya kesadaran pentingnya para pelaku usaha atau petani di daerah dan pedesaan dapat secara sukarela mengarahkan konsentrasi pemikirannya terhadap suatu komoditas atau produk yang paling sesuai untuk dirinya, lingkungannya dan desa setempat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;18). Masyarakat desa Suwaru terutama para petani salak masih mempertahankan lahan perkebunan salak suwaru dan membudidayakan salak suwaru untuk tetap menjadi produk unggulan di Desa Suwaru. Pelaku usaha UD. Intan juga memilih usaha olahan kripik dan jenang atau dodol salak suwaru menjadi produksi utama yang dikembangkan di Desa Suwaru.
- 2) Adanya inovasi dan kreativitas masyarakat lokal. Salah satunya prinsip-prinsip OVOP adalah lokal tapi global. Menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dalam memasarkan produk lokal agar menjadi produk global yang dimaksudkan dalam prinsip tersebut perlu adanya inovasi dan kreativitas dari masyarakat dalam menghasilkan produk lokal yang khas dan layak pasar (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;20). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Suwaru Kabupaten Malang, perkumpulan masyarakat lokal yang ada yaitu KUB Mekarsari membuat inovasi baru dalam mengolah potensi yang dimiliki Desa Suwaru. Inovasi yang dilakukan yaitu membentuk atau membuat salak suwaru menjadi produk olahan sale salak. Kreativitas masyarakat dari

KUB Mekarsari tidak terlepas dari adanya pertemuan rutin yang dilakukan dan memberdayakan masyarakat Desa Suwaru terutama ibu-ibu.

- 3) Adanya kepengurusan manajemen usaha yang jelas. Menurut Kuncoro (2010;89) pengembangan UMKM dari sisi manajemen diprioritaskan salah satu yaitu manajemen administrasi, keuangan, dan proses produksi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di usaha olahan buah salak UD. Intan Desa Suwaru Kabupaten Malang manajemen usaha UD. Intan sangat jelas adanya dan tertat rapi mulai berdiri di tahun 2006 hingga sekarang. Keterlibatan seluruh anggota keluarga didalamnya menjadi faktor pendukung lain didalam manajemen usaha ini.

b) Faktor Penghambat Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal Melalui OVOP

- 1) Belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam menangani produk-produk yang dihasilkan dari *One Village One Product* (OVOP) maupun kelembagaan secara khusus melaksanakan OVOP. Kelembagaan dan aktor yang ada dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal menurut Said (2015;3) salah satunya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik secara mandiri dibentuk maupun hasil kemitraan dengan pihak lain dalam mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah pada sektor tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam pengemban UMKM yang berbasis pada pengembangan sumberdaya

ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang, tidak adanya BUMD yang secara khusus menangani OVOP, baik dalam kemitraan dengan pihak swasta maupun pembentukan dari pemerintah daerah Kabupaten Malang. Adanya BUMD yang secara khusus menangani OVOP di Kabupaten Malang dapat mempercepat keberhasilan tujuan dan sasaran pendekatan OVOP terhadap desa atau daerah Kabupaten Malang.

- 2) Pemasaran hasil produksi UD. Intan belum bisa dipasarkan secara luas dengan merek dagang sendiri yaitu Osari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pemasaran produk yang dihasilkan dari usaha olahan buah salak di Desa Suwaru Kabupaten Malang, UD. Intan belum mampu memasarkan hasil produksinya menggunakan merek dagang UD. Intan di luar desa Suwaru. Permintaan pasar untuk produksi UD. Intan selalu tidak menggunakan merek dagang mereka. Hal ini menjadikan penghambat bagi UD. Intan dalam mengenalkan hasil produksi yang mereka miliki dengan merek dagang mereka.
- 3) Tidak berjalannya koperasi yang ada yaitu Koperasi Kuba Salaka. Menurut Said (2015;3) koperasi merupakan salah satu kelembagaan atau aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, di Desa Suwaru sudah ada koperasi yaitu Koperasi Kuba Salak tetapi koperasi ini tidak berjalan dengan baik dibidang pertanian salak. Koperasi yang ada di Desa Suwaru pada awalnya terbentuk karena potensi yang memiliki yaitu perkebunan

salak suwaru dan masyarakat lokal yang memilih bekerja sebagai petani salak dan pedagang salak. Tetapi dengan berjalannya waktu dan harga salak yang tidak menentu yang cenderung turun, menjadikan koperasi ini tidak berfokus lagi pada pengembangan dan pembudidayaan salak suwaru.

Sehingga tidak berjalannya koperasi Kuba Salaka menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP. Hakekatnya peran koperasi dalam pendekatan melalui OVOP sangatlah penting hal ini sesuai dengan berfungsi koperasi untuk memediasi akses pembiayaan, untuk memediasi akses produksi, untuk memediasi akses pemasaran dan untuk memenuhi persyaratan pengucuran program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2010;52). Tidak berfungsinya koperasi Kuba Salak dikarenakan perputaran modal koperasi tidak berjalan dengan baik pada saat koperasi berfokus pada pertanian salak suwaru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

- a) Kelembagaan dan aktor/*stakeholder* yang terlibat

Keterlibatan aktor dan kelembagaan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang didukung oleh potensi Desa Suwaru sebagai daerah penghasil salak suwaru terbesar di Kabupaten Malang serta produk yang dihasilkan dari olahan salak suwaru menjadi produk unggulan di Desa Suwaru, dan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat didalamnya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan aktor yang berperan penting dikarenakan pemerintah daerah sebagai aktor/*stakeholder* tingkat daerah dalam pengembangan UMKM berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP. Sebagai aktor ditingkat daerah SKPD di Kabupaten Malang berkewajiban dan bertugas memberikan fasilitasi sarana prasana untuk pengembangan produk unggulan di Desa Suwaru, memberikan informasi mengenai berbagai macam dan bentuk tentang pemasaran dan hambatan yang terjadi dalam bentuk klinik UMKM Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang serta mendorong semangat para pelaku usaha untuk tetap mengembangkan potensi yang dimiliki melalui peresmian toko oleh-oleh khas dari Desa Suwaru oleh Bupati Kabupaten Malang. Tetapi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat lokal dan para pengusaha tentang OVOP masih kurang hal ini dikarenakan OVOP tidak menjadi satu program khusus yang berada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

2) Pelaku Usaha Lokal

Kerlibatan pelaku usaha lokal UD. Intan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam yaitu salak suwaru terus berkembang hingga sekarang dan aktif melakukan inovasi menciptakan produk-produk baru terhadap potensi lokal lainnya di Desa Suwaru.

3) Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal sangat terlihat dan aktif bergerak dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Suwaru. Masih banyaknya pedangan salak yang berjualan dipinggir jalan utama di Desa Suwaru dan para petani salak atau pemilik perkebunan salak yang masih membudidayakan salak suwaru.

4) Koperasi

Peran koperasi yang ada di Desa Suwaru yaitu Kuba Salaka dalam pengembangan salak suwaru dirasa kurang ada. Padahal tujuan koperasi ini dibentuk untuk mengembangkan sumberdaya lokal yaitu salak suwaru menjadi produk unggulan di Desa Suwaru hingga Kabupaten Malang.

5) Lembaga Keuangan di Daerah

Lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu koperasi tidak berkembang dengan baik terhadap permodalan usaha kepada para anggota koperasi Kuba Salaka. Adanya lembaga lain yang bergerak dalam Badan Usaha Milik Negara yaitu PG. Krebet, memberikan peran dalam membantu keuangan pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya.

6) Perguruan Tinggi

Sedikit banyak memberikan perannya terhadap pengembangan usaha lokal berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru. Baik secara kelembagaan maupun perseorangan perguruan tinggi yang ada di Malang memberikan perannya sebagai kalangan dari akademisi.

b) Aspek-aspek dalam pengembangan UMKM

Didalam pengembangan usaha olahan buah salak di Desa Suwaru terdapat aspek-aspek yang perlu dikembangkan agar usaha tersebut dapat berkembang dan menguntungkan secara terus menerus. Aspek-aspek yang terdapat dalam usaha olahan UD. Intan Desa Suwaru adalah sebagai berikut:

1) Aspek Manajemen

Keperngurusan manajemen didalam UD. Intan tertata rapi dan terorganisi dengan baik. Keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadikan komunikasi antar sektor berjalan dengan lancar dalam menghadapi berbagai masalah serta memanfaatkan sumberdaya manusia yang tersedia yang sudah terampil dan mengetahui tentang usaha yang dijalankan UD. Intan.

2) Aspek Produksi

Usaha olahan UD. Intan selalu memperhatikan produksi yang dihasilkan. Dari tahun ketahun selalu meningkatkan hasil produksinya dan terus berinovasi menciptakan produk baru dari sumberdaya yang dimiliki di lingkungan sekitar Desa Suwaru.

3) Aspek Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan oleh UD. Intan belum mampu berkembang secara global walaupun usaha yang dijalankan sudah berjalan sejak tahun 2006. Tetapi pemilik usaha UD. Intan melakukan strategi pemasaran dengan mendirikan toko hasil-hasil produksi dari UD. Intan.

4) Aspek Keuangan

Pendapatan yang terus meningkat disetiap tahunnya menjadikan usaha UD. Intan dapat terus mengembangkan usaha tersebut lebih besar dari sekarang dan menjadi prospek bisnis yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang besar ini juga meningkatkan kesejahteraan keluarga karena usaha tersebut dikelola oleh anggota keluarga.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM berbasis sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP di Desa Suwaru Kabupaten Malang

a) Faktor Pendukung Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP

- 1) Kearifan lokal masyarakat lokal Desa Suwaru tetap terjaga dengan mempertahankan dan membudidayakan salak suwaru walaupun harga

jual dari salak suwaru tidak setinggi saat salak suwaru menjadi produk unggulan di Kabupaten Malang.

- 2) Adanya inovasi dan partisipasi masyarakat lokal yang terus mengembangkan dan meningkatkan nilai julan salak suwaru dengan menciptakan produk-produk baru olahan buah salak selain kripik dan jenang/dodol.
 - 3) Tertata dan terorganisir kepengurusan manajemen usaha UD. Intan dalam menjalankan usahanya. Sehingga koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang ada.
- b) Faktor Penghambat Pengembangan UMKM Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal melalui OVOP
- 1) Belum terbentuknya lembaga atau badan usaha milik daerah yang menangani pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui OVOP
 - 2) Belum mempunya usaha UD. Intan memasarkan hasil produksinya menggunakan merk dagang sendiri.
 - 3) Koperasi yang ada tidak berjalan sebagai mana mestinya sebagai koperasi yang berfokus pada perkebunan salak suwaru.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dilapangan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya segera dibentuk Badan Usaha Milik Daerah atau kelembagaan khusus yang berfokus pada pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dibidang OVOP oleh Pemerintah Kabupaten Malang agar tercapainya tujuan OVOP untuk peningkatan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat.
2. Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Desa Suwaru harus lebih memberdayakan dan mendorong masyarakat Desa Suwaru untuk mengaktifkan kembali keperngurusan koperasi Kuba Salaka sebagai koperasi unit desa yang menangani berbagai hal terhadap potensi desa yaitu salak suwaru.
3. Sebaiknya sosialisasi tentang pengembangan UMKM melalui pendekatan OVOP di Kabupaten Malang lebih ditingkatkan dalam satu program khusus agar tidak terjadi kesalah pahaman dan interpretasi tentang pendakatan OVOP di Kabupaten Malang kepada masyarakat dan para UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar Pada Pemikiran & Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE Universitas Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Annahar, Nasrun. 2013. *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah*. Universitas Brawijaya Malang: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Anomin. 2012. *Majukan Koperasi UKM di Kab.Malang dengan pendekatan OVOP*. Malang, diakses pada tanggal 11 Januari 2015 dari <http://www.malangkab.go.id/berita.html>
- Anomin. 2014. 13. *Kab. Malang*, diakses pada tanggal 25 Desember 2014 dari <http://www.pertanian.jatimprov.go.id/index.php/sentra-hortikultura/13-kab-malang>.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Blakely, Edward James. 1989. *Planning Local Economic Development*. United Kingdom: SAGE Publications, Inc.
- Febryanti, Nur Azizah. 2014. *Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Industri Kreatif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Universitas Brawijaya Malang: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2010. *Blue Print One Village One Product*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM, diaskes pada tanggal 10 Januari 2015 dari http://www.smeccda.com/e-book/Bloe_print_ovop.pdf
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

- _____. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J.Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
- Priyono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Said, Abdullah. 2015. *Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal*. Malang: Jurnal yang tidak dipublikasikan.
- _____. 2015. *Konsep Pengembangan Potensi Sumber-Sumber Ekonomi Daerah*. Malang: Jurnal yang tidak dipublikasikan.
- Saiman, Leonardus. 2012. *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia & Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi Dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Ery. 2007. *Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 18 No. 2 Agustus 2007, hal 103-123.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2006. *Kewirausahaan; Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Adi Mahastya.

Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Zuhal. 2012. *Gelombang Ekonomi Inovasi*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2016 dari

http://www.ristek.go.id/file/upload/ebook_web/details_gelombang_ekonomi.html



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5811 /UN10.3/PG/2015

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak / Ibu / Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa :

Nama : Siti Aminatul Indah Fatmawati

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 37 Pagelaran-Malang

NIM : 115030107111081

Jurusan : Administrasi Publik

Kosentrasi : -

Tema : Pengembangan Usaha Olahan Buah Salak Melalui Pendekatan
One Village One Product (OVOP) Sebagai Upaya
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang)

Lamanya : 3 (Tiga) Bulan terhitung dari tanggal 20 April – 20 Juli 2015

Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu / Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 17 April 2015

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ ~~1225~~ /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 5811/UN10.3/PG/2015 Tanggal 17 April 2015 Perihal Ijin Riset/Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Riset/Survey** oleh :

Nama / Instansi : Siti Aminatul Indah Fatmawati / Mhs. Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Pengembangan Usaha Olahan Buah Salak Melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Kec. Pagelaran, Kab. Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Desa Suwaru, Desa Kademangan, dan Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang

Lamanya : 20 April s.d. 20 Juli 2015

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 20 April 2015

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Pembina

TEMBUSAN :

NIP : 19671204 199303 1 007

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang
4. Sdr. Camat Pagelaran Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Desa Suwaru Kec. Pagelaran Kab. Malang
6. Sdr. Kepala Desa Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang
7. Sdr. Kepala Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAGELARAN
DESA SUWARU

Alamat : Jalan Raya No. 03 Telp (0341) 7346713 - Pagelaran

Suwaru, 22 April 2015

Nomor : 140/109/421.625.001/2015
Lampiran : -
Perihal : Memberi ijin Riset/ Survey.

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesbang dan
Politik Universitas Brawijaya
Malang
Di

MALANG

Membalas surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Universitas Brawijaya
Malang Nomor : 072/1225/421.205/2015 , Tanggal 20 April 2015 tentang Permohonan
Ijin Riset/ Survey;

Kepada :
Nama : **SITI AMINATUL INDAH FATMAWATI**
Instansi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Hariyono No. 163 Malang.
Judul Survey : Pengembangan Usaha Olahan Buah Salak.
Lamanya : Tanggal 20 April s/d 20 Juli 2015

Kami Kepala Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan ini Tidak
keberatan menerima Mahasiswa tersebut dan tidak keberatan untuk melaksanakan Survey

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.


KEPALA DESA SUWARU
Tedjo Sampurno
TEDJO SAMPURNO

Daftar Wawancara

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

1. Apa yang menjadi latar belakang adanya pendekatan OVOP di Kabupaten Malang dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi yang ada?
2. Siapa saja aktor atau kelembagaan yang terlibat di dalamnya?
3. Bagaimana sosialisasi kepada para pengusaha lokal atau masyarakat tentang adanya OVOP yang akan dilakukan?
4. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah untuk mendukung adanya OVOP terutama kepada UMKM yang ada di Kabupaten Malang?
5. Terkait bahan baku yang diperlukan UMKM apakah boleh mengambil dari daerah lain yang masih berdekatan dengan wilayah atau sentra usaha?
6. Adakah spesifik produk OVOP yang menjadi ikon OVOP di Kabupaten Malang?
7. Bagaimana bentuk pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada UMKM yang ada?
8. Untuk pemasaran/pengenalan produk UMKM yang apa yang dilakukan oleh dinas?
9. Adakah kemitraan atau kerjasama pemerintah dengan pihak lain?
10. Adakah kelembagaan atau badan usaha milik daerah yang berkewenangan khusus pada bidang OVOP?
11. Apa harapan pemerintah dari adanya OVOP di Kabupaten Malang?

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

1. Peran dan fasilitas apa yang diberikan dinas untuk mengembangkan usaha masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Malang?
2. Berkaitan dengan pengurusan ijin usaha, apakah ada biayanya atau gratis dalam mengurusnya?
3. Berkaitan dengan pasar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM terutama produk-produk yang menjadi OVOP di desa-desa yang ada di Kabupaten Malang, apakah tidak ada sarana tempat pemasaran seperti toko oleh-oleh khas dari Kabupaten Malang seperti halnya di Kota Malang terdapat “Gudang Oleh-oleh” sebagai tempat pemasaran produk-produk UMKM di Kota Malang?

Pemerintah Desa Suwaru

1. Apa yang menjadikan salak suwaru menjadi produk unggulan di Desa Suwaru ?
2. Sejauh ini berapa hektar lahan perkebunan yang ada di Desa Suwaru ?
3. Seperti apa bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada UMKM yang ada yaitu UD. Intan serta para petani dan pedagang salak ?
4. Adakah koperasi di Desa Suwaru yang secara khusus mengelola perkebunan salak suwaru?
5. Bagaimana peran koperasi tersebut sejauh ini ?

Usaha Olahan Buah Salak UD. Intan

1. Bagaimana usaha ini berdiri sampai sekarang?
2. Bagaimana memperoleh bahan baku untuk pembuatan kripik maupun jenang atau dodol salak?
3. Seperti apa bentuk kerjasama dengan para petani salak?
4. Dalam menangani proses produksi, apakah melibatkan masyarakat sekitar seperti karyawannya?
5. Berkaitan dengan modal, sejauh ini bagaimana UD. Intan mendapatkan bantuan modal yang lebih besar?
6. Fasilitas apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah?
7. Bagaiman peran koperasi yang ada di Desa Suwaru terhadap usaha yang dijalankan ini?
8. Untuk lebih mengenalkan produk-produk yang dihasilkan UD. Intan lebih luas lagi, adakah masalah-masalah yang dihadapi ?

Petani Salak Desa Suwaru

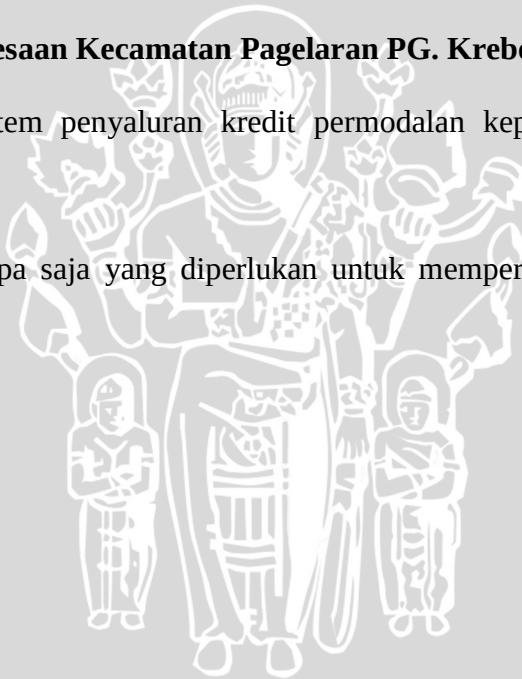
1. Apakah benar, pengusaha lokal di Desa Suwaru UD. Intan mengambil salak untuk bahan baku disini?
2. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pemilik usaha UD. Intan?
3. Bagaimana anda mengelola kebun salak yang dimiliki agar tetap menghasilkan salak suwaru yang unggulan ?
4. Adakah peran koperasi dalam mengelola perkebunan anda ?

Pedagang Salak Suwaru

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap salak suwaru yang tumbuh subur di Desa Suwaru ?
2. Bagaimana anda mendapatkan salak suwaru untuk dijual ?
3. Adakah peran pemerintah dalam mengawasi perdagangan salak suwaru ?
4. Apa yang menjadikan atau alasan untuk tetap menjadi pedagang salak suwaru ?

PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagelaran PG. Krebet

1. Bagaimana sistem penyaluran kredit permodalan kepada para pemilik usaha?
2. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk memperoleh modal kredit dari sini?



2.USULAN

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, No.13/Dep.7/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010, kepada Pemerintah Kepala Daerah se Indonesia, berhasil menerima usulan potensi komoditas/unggulan daerah/pedesaan, sebagai tercantum di bawah :

**DAFTAR USULAN POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH
ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)
TAHUN 2010**

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
1	Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	1. Kerupuk Sanjai Balado
			2. Bordir Kerancang
		Kab Lima Puluh Kota	Tenun Halaban
		Kab. Tanah Datar	Tenun Pandai Sikek
2	Sumatera Selatan	Palembang	Lemari Ukiran Kayu Khas Palembang
		Lahat	1. Karet
			2. Sawit
		Ogan Ilir	1. Tenun Songket
			2. Rumah Bongkar Pasang
		Musi Banyuasin	Gambir
		Empat Lawang	1. Kopi Bubuk
			2. Lempok Durian
		OKU Selatan	Kopi Biji/Kopi Bubuk
		Pagar Alam	Kopi Biji/Kopi Bubuk

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
		Muara Enim	Kopi Biji/Kopi Bubuk
3	Bengkulu	Kota Bengkulu	1. Lempuk Durian
		Kabupaten Kepahiang	1. Jagung Marning 2. Pepaya
		Kabupaten Kaur	1. Ikan Asin
		Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Anyaman Bambu 2. Kerajinan Batu
4	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	1. Nanas 2. Karet
		Bangka	1. Timah 2. Kelapa Sawit
		Belitung	1. Ikan Beku 2. Sayur mayur
		Belitung Timur	1. Karet 2. Lada
		Bangka Barat	1. Durian
		Bangka Selatan	1. Terasi 2. Ebi Kering
5	Jawa Barat	Tasikmalaya	Komoditi Bordir

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
		Cianjur	1. Sayuran Dataran Tinggi
			a. Tomat
			b. Kacang Merah
			c. Kacang Kapri
			d. Wortel
			e. Sawi
			2. Tanaman Pangan
			Padi Pandan Wangi
6	Jawa Tengah	Wonosobo	1. Carica
7	Jawa Timur	Pacitan	Batik
8	Bali	Klungkung	1. IK Kupas (Pelepah Pisang)
			2. IK Lukisan Tradisional (Kamasan)
		Jembrana	1. Tenun Cagcag Jembrana
			2. Kakao
		Gianyar	Bambu Rebung Tabah
			(<i>Gigantochloa Nigrocioiata</i>)
		Karang Asem	1. Sapi Bali
			2. Arak Tradisional Bali
		Tabanan	1. Keramik/Gerabah
			2. Genteng Pres (Ds. Pejaten)
		Badung	1. Sayur mayur :
			- Tomat
			- Brokoli

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
			2. Ternak Sapi
			3. Markisa
9	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1. Aloevera/Lidah Buaya
		Kabupaten Kubu Raya	1. Tempurung Kelapa
			2. Gula Aren
		Kota Singkawang	Tanah Kualin/Keramik
		Kabupaten Sambas	Kerajinan Tenun
		Kabupaten Sintang	Kerajinan Tenun
10	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	1. Anyaman Purun
			2. Agro Jeruk
			3. Kapal Kayu
		Banjar	1. Batu Mulia/Permata
			2. Sulam Bordir
		Tanah Laut	1. Sapi
			2. Ikan Kering
		Hulu Sungai Selatan	1. Propeller
			2. Kerajinan Imitasi
11	Kalimantan Tengah	I. Kotawaringin Timur	Kopra
			Sarang Walet
		II. Kabupaten Kapuas	Aneka Anyaman Rotan

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
12	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Kopi
		Toraja Utara	Tenunan Marendeng
		Soppeng	Industri Tembakau dan Rokok
		Luwu	Rumput Laut
		Enrekang	Kopi
		Bulukumba	Rumput Laut
		Bantaeng	Industri Kasur dan Bantal
		Pinrang	Beras
		Selayar	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan &
			Biota Laut lainnya :
			a. Ikan Kering
			b. Teripang Kering
			c. Rumput Laut Kering
			d. Ekor/Sirip Ikan Hiu
			e. Cumi-cumi Kering
		Bone	Songko To Bone
		Pangkep	Ikan Bandeng/Udang Windu
		Makassar	Markisa
		Gowa	Markisa

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PRODUK UNGGULAN
13	Sulawesi Barat	Polman	Rumput Laut
		Mamasa	Kopi
		Majene	Coklat (Kakao)
		Mamuju	Coklat (Kakao)
		Matra	Kelapa Sawit
14	Maluku	Maluku Barat Daya	Rumput Laut
		Maluku Tenggara Barat	Rumput Laut
		Seram Bagian Barat	1. Rumput Laut 2. Minyak Kayu Putih
		Seram Bagian Timur	Rumput Laut
		Maluku Tenggara	Koptanel Elonel
		Buru	Minyak Kayu Putih
		Kota Ambon	Rumput Laut
		Kep Aru	Rumput Laut

Adapun usulan lainnya adalah :

1. Provinsi Aceh :

- a. **Kerajinan Sulaman** – keindahan sulaman Aceh sangat indah. Dapat diarahkan sebagai produk ekspor dengan merubah disain dijadikan penyekat dinding, hiasan dinding, sarung bantal kursi dan **table runner**. Di Aceh lazim menggunakan beludru sebagai bahan baku, untuk ekspor sebaiknya dirubah dengan bahan katun. Disain motif dan komposisi warna disesuaikan tujuan pasar.

2. Provinsi Sumatera Utara :

- a. **Damar** – sebagai bahan baku hio yang mempunyai nilai jual tinggi.
- b. **Kerajinan Tenun Ulos Tapanuli** – dibuat dalam bentuk produk interior; taplak meja, sarung bantal kursi, **kordijn, placematt, coaster** dan **table runner**. Disain motif dan komposisi warna disesuaikan selera tujuan pasar.
- c. **Sayur-mayur** – dari dataran tinggi. Selama ini Sumatera Utara memasok kebutuhan sayur-mayur ke Singapura.

3. Provinsi Sumatera Barat

- a. **Kerajinan Bordiran** – terkenal halus. Dibuat dalam bentuk **shawl, table runner**, sarung bantal kursi, **placematt, coaster**, hiasan dinding dan penyekat dinding. Disain motif dan komposisi warna disesuaikan selera tujuan pasar.
- b. **Kerajinan Tenun Songket** – kerajinan tenun songket tradisional hanya dapat untuk pasar dalam negeri. Peluang ekspor ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk tujuan pasar negara-negara lainnya dapat diproduksi dalam bentuk sarung bantal kursi, table runner dan hiasan dinding. Disain motif, komposisi warna dan ukuran disesuaikan selera tujuan pasar.
- c. **Kerajinan Tenun Halaban** – kerajinan tenun dalam bentuk tradisional hanya untuk pasar dalam negeri. Untuk pangsa ekspor dapat diproduksi untuk hiasan dinding, penyekat dinding dan **table runner**. Disain motif, komposisi warna dan ukuran disesuaikan permintaan selera tujuan pasar.

4. Provinsi Sumatera Selatan

- a. **Karpet Kayu** – produk karpet kayu memiliki nilai jual tinggi. Dapat dijadikan produk ekspor dengan memperhatikan kandungan kadar air di dalam kayu, karena dapat menjadi kendala persyaratan negara tujuan. Sistem **finishing** dan ukuran disesuaikan permintaan tujuan pasar.
- b. **Serat Pisang** – Jepang, Amerika Serikat, Spanyol dan Itali merupakan negara-negara yang mengagumi produk kerajinan yang terbuat dari bahan baku alami. Serat pisang

sudah menjadi bahan baku kerajinan tenun dan anyam-anyaman (tikar, tas, tempat tisu, **placematt** dan lain-lain). Selain menjadi andalan produk kerajinan dalam negeri, tenunan serat pisang mampu menjadi produk unggulan.

- c. **Kerajinan Tenun Songket** – hasil tenun songket tradisional hanya untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Untuk pasar negara-negara lainnya diperlukan inovasi dan kreativitas disain pada motif dan komposisi warna. Dibuat untuk produk interior; **table runner**, sarung bantal kursi, hiasan dinding dan penyekat dinding.

5. Provinsi Bengkulu

- a. **Lada** – lada dari Bengkulu cukup digemari. Dapat dijadikan Program **OVOP** sebagai produk ekspor yang sudah dikemas secara elok.

6. Provinsi Bangka-Belitung

- a. **Kerajinan Tenun Cual** – selain dapat diproduksi untuk pasar dalam negeri, tenun dan batik cual dapat dijadikan produk ekspor. Khususnya ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Disain motif dan komposisi warna disesuaikan permintaan pasar ekspor.
- b. **Kerajinan Rotan** – secara tradisional hasil komoditi rotan di Bangka hanya untuk keranjang dan pengki. Melalui Program **OVOP** dapat dijadikan alternatif pusat kerajinan rotan untuk pangsa ekspor. Diperlukan inovasi disain dan perbaikan sistem **finishing**.
- c. **Sukun** - keripik sukun memiliki rasa gurih permanen. Digemari masyarakat sebagai penghidang pada sore hari saat minum teh/kopi. Keripik sukun dapat menjadi produk unggulan daerah dan layak memasuki pasar ekspor, khususnya ke Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

7. Provinsi Lampung

- a. **Kopi Luwak** – Lampung merupakan penghasil kopi luwak paling terkemuka di dunia. Berpotensi menjadi andalan ekspor Program **OVOP**.
- b. **Tapis Lampung** – sejak dahulukala kerajinan tapis Lampung terkenal tidak hanya di Indonesia. Di khasanah tekstil tradisional dunia, tapis Lampung kuno menjadi produk incaran para kolektor tekstil bergengsi. Nuansa budaya dan rilegi tersirat dalam sarung-sarung Tapis Lampung. Untuk menjadikan produk ekspor, Tapis Lampung dapat dimodifikasi menjadi hiasan dinding, table centre, table runner dan sarung bantal kursi. Disain motif dan komposisi warna disesuaikan permintaan pasar.

8. Provinsi Jambi

- a. **Buah Jeruk** – Jambi memiliki jeruk Jambi yang cukup terkenal. Pengembangan budidaya jeruk Jambi melalui Program **OVOP**, akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
- b. **Batik** – ciri khas batik tradisional Jambi terdapat pada disain motif dan komposisi warna. Motif kaligrafi menjadi awal terciptanya kerajinan batik. Warna khas batik Jambi adalah putih, indigo dan maroon. Untuk melayani pasar batik, kini batik Jambi mampu tampil dengan inovasi motifnya.

9. Provinsi Riau

- a. **Bingkai Kayu** – kemudahan memperoleh pasokan kayu di Provinsi Riau, menjadikan Pekanbaru sebagai produsen industri kerajinan bingkai kayu. Bingkai kayu yang dihasilkan, berupa bingkai cermin dan bingkai foto. Selain dapat memasok pasar lokal, dapat pula dijadikan pemasok pasar dalam negeri. Melalui pengembangan disain dan teknologi, para pelaku Usaha Kecil pembuat bingkai kayu tersebut dapat diarahkan memasok pangsa ekspor, tanpa melupakan kadar air yang terkandung di dalam kayunya.
- b. **Kerajinan Tenun Songket** – tenun songket dari kawasan Riau dapat didapatkan di Pekanbaru. Umumnya para pengrajin adalah para Pengusaha Kecil yang mampu memasok pasar ekspor ke Malaysia. Peningkatan kualitas, disain dan komposisi warna perlu menjadi perhatian agar kerajinan tenun songket di provinsi ini tidak punah.

10. Provinsi Kalimantan Barat

- a. **Arang Berikat** – produk arang berikat layak dimasukkan ke dalam Program **OVOP**. Negara-negara di Timur Tengah menggunakan arang berikat dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk itu perlu ditekuni bagaimana mempromosikan arang berikat ke dalam perencanaan promosi yang lebih luas.
- b. **Tempurung Kelapa** – tempurung kelapa sejak 15 tahun lalu telah dijadikan bahan baku berbagai produk kerajinan. Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Solo dapat dijadikan contoh pengembangan produk tempurung kelapa. Layak dimasukkan ke dalam Program **OVOP** untuk membuat produk furniture pilihan (meja makan, **side bed table**, meja kerja, rak dll) bingkai kaca dan foto, nampan, **placematt** dan **coaster**.
- c. **Keramik** – popularitas pembuatan keramik di Singkawang telah tersohor. Namun hingga kini produksi keramik di pusat kerajinan keramik tersebut masih membuat replika keramik-keramik kuno bernuansa seni dan budaya Cina. Melalui pengembangan disain dan kualitas keramik asal Singkawang dapat menjadi produk ekspor unggulan.

11. Provinsi Kalimantan Tengah

- a. **Kerajinan Tikar** – di Kabupaten Sembaban kerajinan tikar menjadi produk unggulan. Tikar jenis ini digemari di dalam negeri karena keindahan anyamannya. Untuk mengarahkan menjadi produk kerajinan tikar pangsa ekspor, tidaklah sulit. Peningkatan kualitas bahan baku dan finishing kerajinan tikar di Sembaban dapat memasuki pasar ekspor.
- b. **Kerajinan Tudungsaji** – kerajinan tudungsaji dari Kotawaringin Timur dapat memenuhi pasar dalam negeri maupun ekspor. Khususnya untuk pasar kota-kota besar di dalam negeri dan ekspor ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Namun harus mendapatkan bimbingan kualitas, ukuran, disain, finishing dan kemasan produk.

12. Provinsi Kalimantan Selatan

- a. **Batu Mulia** – penghasil batu mulia berada di Daerah Banjar. Kualitas batu mulia/permata setempat hanya dapat dipasarkan di dalam negeri. Masih memerlukan bimbingan peningkatan kualitas, disain dan kemasan, agar dapat meningkatkan nilai tambah.
- b. **Kerajinan Anyaman Purun** – salah-satu hasil kerajinan suku Dayak yang khas dari Daerah Barito Kuala. Indah dan unik serta memiliki nuansa etnik. Selain terkenal di dalam negeri, kerajinan anyaman purun dapat dijadikan produk ekspor bernilai jual tinggi. Inovasi disain memerlukan bimbingan agar manfaat dan penggunaan kerajinan tersebut dapat lebih luas.

13. Provinsi Sulawesi Selatan

- a. **Kopi** – Kabupaten Toraja memiliki kualitas kopi teraf internasional dan sudah memiliki keunikan kemasan. Dikemas dalam kotak kayu berukiran khas seni Toraja. Kopi Toraja dapat dijadikan produk ekspor.
- b. **Sirip Ikan Hiu** – sirip ikan Hiu menjadi salah-satu andalan Kabupaten Selayar. Peningkatan kualitas sejak dari pemotongan sirip hingga proses pendinginannya dapat menjadikan komoditi andalan untuk pasar ekspor.
- c. **Markisa** – Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa tempat penghasil buah Markisa, terutama Toraja dan Gowa. Konsentrasi pembuatan sirup Markisa dengan memperbaiki kemasan dan citrasanya akan menjadikan Gowa sebagai pengeksport andalan.

14. Provinsi Sulawesi Utara

- a. **Virgin Coconut Oil (VCO)** – produk **VCO** merupakan salah-satu komponen bahan baku kosmetik. Melimpahnya **VCO** di provinsi ini dapat mendorong Sulawesi Utara memiliki

produk unggulan ekspor. Bimbingan proses produksi dan kebersihan akan menempatkan **VCO** sebagai **leading product**.

- b. **Tempurung Kelapa** – melimpahnya tempurung kelapa di Sulawesi menjadi pendorong agar dapat mengembangkan disain produk untuk memenuhi pasar ekspor. Melalui Program **OVOP** dapat dibimbing untuk membuat cinderamata, **furniture** pilihan (meja makan, meja kerja, **side bed table** dll), bingkai cermin dan foto, **coaster**, **placematt** dan nampan.

15.Provinsi Maluku

- a. **Minyak Kayu Putih** – Seram dan Buru merupakan daerah penghasil minyak kayu putih berkualitas. Melalui perbaikan botol kemasan dan proses pembuatannya dapat meningkatkan nilai tambah. Layak dijadikan unggulan dalam Program **OVOP**.
- b. **Rumput Laut** – menjadi komoditi andalan di Provinsi Maluku. Inovasi dan kreativitas produk berbahan baku rumput laut diperlukan pelatihan dan bimbingan melalui Program **OVOP**. Dapat menjadi produk andalan untuk pasar ekspor.

16.Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. **Gerabah** – Desa Banyumulek merupakan pusat kerajinan gerabah yang handal. Melalui Program **OVOP** dapat dilakukan pengembangan disain, peningkatan kualitas dan kemasan. Memiliki daya jual tinggi untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.
- b. **Mutiara** – produk mutiara memiliki peluang pasar internasional, khususnya ke Jepang. Peningkatan disain, kualitas **finishing**, ukuran dan warna disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk ekspor perlu dicermati apakah faktor pengikat mutiara (perak/emas) sudah sesuai permintaan pasar.

17.Provinsi Bali

- a. **Buah Salak** – popularitas Buah Salak dari Bali sudah dikenal. Diperlukan inovasi produk agar Buah Salak dapat dijadikan produk ekspor berupa minuman dan makanan (manisan dan **pudding**).
- b. **Kerajinan Tenun** – tenunan dari Kabupaten Gianyar dapat dijadikan produk ekspor unggulan. Peningkatan kualitas benang tenun, zat pewarna, disain motif dan komposisi warna dapat dijadikan bahan baku berbagai produk **interior**.

18.Provinsi Jawa Timur

- a. **Kerajinan Batik** – Kabupaten Pacitan memiliki kerajinan batik yang membutuhkan pengembangan disain motif dan komposisi warna untuk memperkaya khasanah batik nasional.

- b. **Ketipung** - Desa Sumber Pucung di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar memiliki kerajinan alat musik ketipung yang dikerjakan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan disain, peningkatan kualitas, penyelarasan komposisi warna dan sistem **finishing** akan memperluas pasar ekspor.
- c. **Keripik Buah** – sumberdaya alam Kabupaten Malang yang memiliki aneka jenis dari buah-buahan, mendorong meningkatnya produsen keripik. Menggunakan berbagai jenis buah-buahan yang tumbuh subur, Usaha Kecil dan Menengah di kabupaten ini mampu berinovasi. Melalui Program **OVOP** dapat ditingkatkan kualitas produk dan perluasan pasar.

19.Provinsi Jawa Tengah

- a. **Papaya Carica** – tumbuh subur di Kabupaten Wonosobo. Papaya Carica sudah diproduksi menjadi beberapa jenis produk makanan. Melalui Program **OVOP** diperlukan bimbingan untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, kemasan dan perluasan pasar.
- b. **Kerajinan Kaca** – di Solo (Surakarta) marak berkembang kegiatan usaha kerajinan kaca yang ditekuni para pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Di sini kerajinan kaca memproduksi kaca cermin berbagai disain dan ukuran, tempat tisu, **coaster** dan tempat perhiasan. Layak dijadikan target Program **OVOP**, agar kualitas proses produksi, disain, bahan penunjang dan finishing dapat ditingkatkan. Mampu dijadikan produk ekspor unggulan.

20.Provinsi Jawa Barat

- a. **Kerajinan Bordir** – Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan produk kerajinan bordir yang sudah mampu merambah pasar kota-kota besar di Indonesia. Peningkatan kualitas bahan baku dapat memperluas pasar.
- b. **Kerajinan Batik** – batik Cirebon dan Garut di provinsi ini memerlukan perhatian serius. Khususnya batik Garut. Pelestarian kekayaan batik di Indonesia dapat dilakukan melalui Program **OVOP**.

21.Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. **Anyaman Enceng Gondok** – enceng gondok sebagai bahan baku kerajinan anyaman berbagai jenis produk, dapat diandalkan menjadi salah-satu unggulan ekspor.
- b. **Kerajinan Gerabah** – masyarakat Desa Kasongan secara turun-temurun menekuni usaha kerajinan gerabah. Pengembangan disain dan kualitas pembakaran dapat memperluas pasar. Dapat menjadi produk andalan ekspor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Aminatul Indah Fatmawati
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 09 Agustus 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : Sarjana Administrasi Publik (S.AP)
Universitas Brawijaya Malang
Alamat Sekarang : Jl. Panglima Sudirman No. 37 RT/RW: 15/02
Pagelaran-Desa Pagelaran Kabupaten Malang (65174)
Telepon : 087859932363
Motto Hidup : Impian jangan hanya dalam ingatan saja, harus diusahakan
dengan kerja keras. Dimaksimalkan dengan kerja cerdas,
dan dibarengi dengan doa-doa.



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 02 Pagelaran (1999-2004)
SMP N 01 Gondanglegi (2005-2008)
SMA N 01 Gondanglegi (2009-2011)
Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi (2011-2016)

PENGALAMAN ORGANISASI

Bendahara Umum Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3)
FIA UB 2013